



# RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

2020-2024



**MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28/B/RO/XI/2020/01 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2020-2024**

**MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156)  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
  6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Manajemen Kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 976);
  7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2020-2024.

KESATU : Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Luar Negeri merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Luar Negeri untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra Kementerian Luar Negeri menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, dan program Kementerian Luar Negeri. Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2020 – 2024 disusun sebagai acuan bagi:

- a. Penyusunan Renstra Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) Kementerian Luar Negeri dan Rencana Kerja setiap Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Luar Negeri, serta Perwakilan Republik Indonesia;
- c. Koordinasi Perencanaan Kegiatan antar Unit Organisasi Eselon I dan Satuan Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;
- d. Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kementerian Luar Negeri.

- KEDUA : Renstra Kementerian Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Data dan informasi kinerja Renstra Kemenlu yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenlu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2020

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



RETNO L.P. MARSUDI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI  
NOMOR 28/B/RO/XI/2020/01 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
TAHUN 2020-2024

# **RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2020-2024**

# KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menerbitkan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024 sebagai wujud manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024 menyajikan Visi, Misi dan Tujuan yang dituangkan dalam Sasaran Strategis, Arah kebijakan dan Strategi. Keseluruhan elemen perencanaan tersebut disusun secara tajam dan konkrit dengan merujuk pada amanah konstitusi dan RPJMN 2020-2024 serta mempertimbangkan dinamika situasi nasional dan global.

Adapun Visi yang ingin dicapai Kementerian Luar Negeri adalah “Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk itu, Prioritas Politik Luar Negeri 2020-2024 akan bertumpu pada Prioritas 4+1 yakni: Penguatan Diplomasi Ekonomi; Diplomasi Perlindungan; Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan; Meningkatkan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia; serta memperkuat Infrastruktur Diplomasi.

Akhir kata, kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri dan seluruh pemangku kepentingan yang telah bersama-sama memajukan politik luar negeri sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia.

Jakarta, Oktober 2020

Menteri Luar Negeri



Retno L.P. Marsudi

# DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Executive Summary .....	iv
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Capaian Rencana Strategis Kemenlu 2015-2019.....	3
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	52
2. VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	80
2.1. Visi .....	80
2.2. Misi.....	80
2.3. Tujuan/Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri.....	80
3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	83
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	83
3.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional .....	83
3.1.2. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik .....	84
3.1.3. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.....	86
3.1.4. Kebudayaan dan Karakter Bangsa .....	89
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/ Lembaga .....	91
3.2.1. Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri .....	91
3.2.2. Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri.....	91
3.2.3. Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri terkait Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19.....	106
3.3. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	110
3.3.1 Kerangka Regulasi .....	110
3.3.2. Kerangka Kelembagaan .....	111
4. TARGET KINERJA.....	119
4.1. Target Kinerja Kemenlu Tahun 2020 s.d. 2024 .....	119

5. PENUTUP .....	124
LAMPIRAN .....	125
Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga .....	125
Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi.....	190

## EXECUTIVE SUMMARY

---

Periode tahun 2020-2024 akan menjadi tantangan bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai isu politik dan keamanan, ekonomi, perlindungan HAM, dan sosial budaya. Hal ini mengingat tahun 2020 diawali dengan meluasnya dampak pandemi Covid-19 di banyak negara. Sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengantisipasi dan menangani isu-isu tersebut, Indonesia perlu membangun dan melaksanakan hubungan kerja sama internasional yang konkret dengan negara-negara mitra dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral.

Dalam hal diplomasi, periode lima tahun mendatang akan dihadapkan pada berbagai bentuk peluang dan tantangan yang turut memengaruhi dinamika ekonomi, politik, dan sosial dalam tatanan global. Kementerian Luar Negeri diamanatkan oleh Presiden RI untuk berperan dalam upaya penanganan dampak pandemi, yaitu melalui optimalisasi diplomasi ekonomi dan kesehatan.

Visi yang ingin dicapai oleh Kemenlu pada periode tahun 2020-2024 adalah :

**“Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.**

Dalam upaya pencapaian Visi dan pelaksanaan Prioritas Politik Luar Negeri tersebut, Kemenlu telah menetapkan 5 (lima) misi, 6 (enam) tujuan/sasaran strategis, 10 arah kebijakan dan strategi-strateginya, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Kemenlu untuk dapat dicapai pada tahun 2020-2024. Pembahasan terkait hal-hal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut dan terperinci dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024 ini.

Selain itu, Kemenlu juga memiliki Prioritas Politik Luar Negeri untuk lima tahun mendatang yang bertumpu pada Prioritas 4+1, yakni Penguatan Diplomasi Ekonomi; Diplomasi Perlindungan; Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan; Peningkatkan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia; plus Penguatan Infrastruktur Diplomasi.

Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi dilakukan dengan meningkatkan dan memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis dan saling menguntungkan dengan pasar utamanya, serta terus melakukan langkah terobosan untuk menembus pasar potensial yang lebih luas.

Dalam hal Diplomasi Perlindungan, Kemenlu telah membangun sistem perlindungan WNI di luar negeri, yaitu melalui Portal Peduli WNI dan *Safe Travel*. Kedepannya, Kemenlu akan meningkatkan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri melalui transformasi digital, penguatan kapasitas SDM di Kementerian dan Perwakilan RI.

Untuk Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan, strategi yang akan dilakukan yaitu penegakan dan penguatan keamanan di laut, udara, dan wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku.

Dalam hal Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia, kinerja diplomasi multilateral Indonesia akan dicapai melalui pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB dan terpilihnya Indonesia menjadi Pemimpin/Anggota Dewan pada berbagai Forum Internasional. Sementara pada tingkat regional, Indonesia akan meningkatkan peran dan kepemimpinannya melalui kerja sama ASEAN dengan mitra wicara. Salah satunya yaitu dengan mendorong dukungan mitra wicara terhadap ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* dan implementasinya.

Sehubungan dengan Prioritas Penguatan Infrastruktur Diplomasi, Kemenlu akan memastikan berjalannya identifikasi potensi, pengembangan kompetensi, penetapan pola karier, pemetaan talenta, serta pemberian *reward* dan *punishment* yang tepat dan objektif berdasarkan kinerja.

# I. PENDAHULUAN

---

## I.1 Kondisi Umum

Dalam kurun waktu 2015-2019, perkembangan dinamika situasi global ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Di samping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi, baik di tingkat global maupun regional, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia.

Berdasarkan laporan *Global Peace Index 2019*,<sup>1</sup> telah terjadi tren penurunan perdamaian global sejak tahun 2008 sebesar 3,78%. Terorisme dan konflik internal merupakan faktor yang dinilai paling mempengaruhi situasi global tersebut. Peningkatan aktivitas teroris terdapat di 104 negara, dengan total kematian karena konflik mengalami peningkatan sebesar 140% antara tahun 2006 dan 2017.

Situasi ketidakamanan yang terjadi di berbagai belahan dunia berakibat langsung terhadap perekonomian. Untuk tahun 2018, dampak kekerasan global terhadap ekonomi tercatat sebesar USD 14,1 triliun dalam hal *purchasing power parity* (PPP) atau setara dengan 11,2% dari aktivitas perekonomian global.

Indonesia tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Sepanjang kurun waktu 2015-2019, pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri tersebut menggunakan pendekatan diplomasi untuk rakyat. Manfaat pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri dipastikan agar dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia, sesuai instruksi/komitmen Presiden Republik Indonesia.

Tujuan pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri Indonesia pada prinsipnya meliputi dua aspek yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu pertama, mencapai kepentingan nasional, dan kedua, berkontribusi terhadap ketertiban dunia sesuai amanat UUD 1945.

Dalam mencapai kepentingan nasional, pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri difokuskan pada 4 (empat) area prioritas diplomasi, yaitu:

---

<sup>1</sup> Global Peace Index 2019, The Institute for Economics & Peace, Sydney, <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GPI-2019-web003.pdf> diakses pada 24 November 2019



Sesuai komitmen diplomasi untuk rakyat, pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri senantiasa diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, diantaranya melalui penguatan diplomasi ekonomi, pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri, dan peningkatan hubungan baik dengan negara-negara di kawasan sehingga negara dan seluruh rakyat Indonesia dapat tetap menikmati situasi damai.

Dalam upaya menjaga tatanan dunia, Indonesia mengoptimalkan keanggotaan pada berbagai organisasi regional dan multilateral untuk berkerjasama memecahkan berbagai masalah global, terus mendorong stabilitas dan perdamaian, serta menciptakan norma dan hukum internasional yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi perdamaian. Di tengah dinamika global sepanjang periode 2015-2019 yang ditandai dengan gejolak di sejumlah kawasan, Indonesia memprakarsai berbagai resolusi dan dokumen kesepakatan antarnegara yang mendorong penghentian kekerasan bersenjata, dan penyelesaian konflik secara damai.

Terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB merupakan pengakuan internasional terhadap peran penting Indonesia, dan sekaligus membuka peluang yang semakin besar bagi Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global sekaligus memprakarsai norma dan hukum internasional untuk tatanan dunia yang adil dan damai. Indonesia juga terus berperan penting dalam ASEAN, yang telah terbukti mampu menjaga perdamaian, stabilitas dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara, termasuk mendorong kepemimpinan ASEAN dalam menciptakan arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif.

Dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra), Kementerian Luar Negeri selama 2015-2019 telah melaksanakan berbagai tindak prioritas bidang politik luar negeri RI dan juga program-program kerja lainnya dalam tataran bilateral, regional maupun multilateral. Berbagai aktivitas yang dilakukan ditujukan untuk memperkuat peranan Indonesia di fora internasional dengan tetap mengacu pada prinsip politik luar negeri RI yang bebas dan aktif.

Kementerian Luar Negeri telah berhasil meningkatkan kerja sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerja sama seluruh bidang (politik, ekonomi, sosial budaya) pada hubungan bilateral, regional dan internasional untuk kepentingan rakyat.

### 1.1.1 Capaian Rencana Strategis Kemenlu 2015-2019

#### Diplomasi Politik Luar Negeri

Sesuai amanat UUD 1945, Indonesia diharapkan berkontribusi pada upaya menjaga perdamaian dunia dan meningkatkan peran kepemimpinan Indonesia di dunia internasional dalam konteks keanggotaan di Organisasi Internasional. Keterpilihan Indonesia merepresentasikan kepercayaan dunia internasional terhadap peran dan kontribusi Indonesia di berbagai isu internasional yang penting. Kementerian Luar Negeri secara konsisten melakukan upaya penggalangan dukungan guna memastikan keterpilihan Indonesia baik dalam konteks pencalonan negara maupun individu melalui pemanfaatan kampanye konvensional dengan didukung oleh intensifikasi sosialisasi melalui sosial media dan platform media digital lainnya.

Keberhasilan pencalonan Indonesia di tingkat negara maupun individu di berbagai Organisasi Internasional yang utama selama RPJMN 2015-2019 adalah terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Dalam hal ini, sejalan dengan prioritas sebagai Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020, Indonesia telah berperan aktif dalam berbagai pembahasan isu-isu keamanan dan perdamaian internasional yang masuk dalam agenda pembahasan DK PBB.



Sumber: Website Kementerian Luar Negeri  
Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Mei 2019

Indonesia menjabat sebagai Presiden DK PBB pada bulan Mei 2019 dengan mengambil tema besar “Menabur Benih Perdamaian” (“*Investing in Peace*”) dan memberikan dukungan Indonesia bagi Palestina. Selama masa Presidensinya, Indonesia telah memimpin lebih dari 40 pertemuan DK PBB, menyelenggarakan sejumlah pertemuan *side event* dalam format *Arria Formula* dan menghasilkan 11 *outcome documents*, yaitu: 4 resolusi, 1 *Presidential Statement*, 3 *Press Statement* dan 3 *Press Element*.

Selama keanggotaan tidak tetapnya di DK PBB, Indonesia menjadi Ketua 3 (tiga) Komite Sanksi di DK PBB mengenai terorisme dan non proliferasi serta *co-penholdership* untuk isu Afghanistan dan Palestina. Sepanjang 2019, Indonesia berperan aktif dalam proses penyusunan dan adopsi 45 Resolusi DK PBB, 13 *Presidential Statement* DK PBB, serta 61 *Press Statement* DK PBB. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menyelenggarakan 5 (lima) program peningkatan kapasitas untuk sesama negara berkembang, termasuk Palestina, Nigeria, Suriname dan ASEAN dalam kerangka *Sustaining Peace*.

Guna perbaikan metode kerja DK PBB, Indonesia telah memprakarsai penyelenggaraan *Sofa Talk Meeting* dan *Regional Wrap-up Session* yang didasarkan pada nilai-nilai musyawarah untuk mufakat. Di samping itu, untuk pertama kalinya, Indonesia menyelenggarakan pertemuan *UN Security Council Members’ Retreat “Wrap Up of The Year: Lessons Learned and Way Forward”*, di Bali pada 26-27 November 2019.

Terkait isu Palestina, Indonesia senantiasa berjuang agar DK PBB terus memberikan perhatian terhadap isu Palestina. Bersama negara-negara anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia memprakarsai *Press Statement* mengenai pemukiman ilegal Israel di Palestina. Di samping itu, Indonesia juga memprakarsai *Press Statement* mengenai penutupan *Temporary Presence in Hebron (TPIH)*.

Dukungan Indonesia terhadap Palestina juga diwujudkan melalui **bantuan kemanusiaan sebesar USD 1 juta** dari Pemerintah RI untuk program bantuan pangan dan layanan kesehatan bagi pengungsi Palestina melalui *United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees In the Near East* (UNRWA). Indonesia juga telah meningkatkan kontribusi rutin/tahunan kepada UNRWA menjadi USD 200.000 setiap tahunnya (sejak Juni 2018) serta memberikan berbagai bantuan pembangunan kapasitas kepada Palestina.

Dalam rangka mengukuhkan peran nyata Indonesia dalam pemeliharaan keamanan internasional, Indonesia menargetkan menjadi 10 negara kontributor terbesar untuk misi pemeliharaan perdamaian (MPP) PBB. Aspirasi ini merupakan pengejawantahan amanah Konstitusi UUD 1945 untuk turut menjaga perdamaian dunia. Pada bulan November 2018, Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai salah satu dari 10 negara kontributor terbesar untuk misi pemeliharaan perdamaian (MPP) PBB (peringkat 7 dari 124 Negara-negara), dengan jumlah kontribusi 3.545 personel, termasuk 94 personel perempuan.

Dukungan Pemerintah RI terhadap partisipasi Indonesia di MPP PBB dilakukan pada tingkat tertinggi, dimana Presiden RI Joko Widodo telah memimpin langsung upacara pelepasan kontingen *Rapid Deployment Battalion* (RDB) ke MONUSCO. Penggelaran RDB membawa kontribusi Indonesia ke angka 3.545 personel. Capaian tersebut merupakan jumlah kontribusi tertinggi Indonesia untuk MPP PBB sejak target Visi 4000 pertama kali dicetuskan oleh Presiden RI di tahun 2012.

Selain itu, Indonesia, bersama dengan Australia, menggagas pembentukan *Bali Process* pada tahun 2002 guna memperkuat upaya kawasan dalam menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang serta kejahatan lintas negara terkait lainnya. Saat ini *Bali Process* diikuti oleh 49 peserta (43 negara, dua yurisdiksi, dan empat organisasi internasional). Pada penyelenggaraan *Bali Process Ministerial Conference* ke-7 tahun 2018 telah dihasilkan sebuah dokumen rekomendasi yang disebut *AAA Recommendation*. Dokumen *AAA Recommendation* memuat hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah dan sektor swasta dalam menanggulangi isu perdagangan manusia termasuk terselenggaranya transparansi dalam proses perekrutan pekerja dalam rantai pasokan barang dan jasa.

Di isu penanggulangan terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (ekstremisme berbasis kekerasan), peningkatan peran Indonesia di sepanjang 2014-2019 juga semakin ditunjukkan dengan berbagai inisiatif dan kepemimpinan Indonesia di isu penanggulangan terorisme. Dalam kerangka DK PBB, dalam keanggotaan Indonesia di DK PBB, Indonesia juga mengetuai Komite Sanksi 1267 yang mengawasi pemberian sanksi mereka yang terafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda, dan turut serta mendorong langkah bersama penanganan pendanaan terorisme melalui berbagai Resolusi DK terkait, maupun upaya menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF). Di luar kerangka PBB, Indonesia juga aktif dalam *Global Counter Terrorism Forum* (GCTF), serta aktif sebagai ketua bersama (*co-chairs*) di *GCTF Working Group on Counter Violence Extremism* (WG CVE) bersama Australia.

Di samping itu, Indonesia juga berperan aktif dalam pemajuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta pembahasan dan penanganan isu-isu kemanusiaan. Berbagai kegiatan diplomasi di bidang HAM dan diplomasi kemanusiaan Indonesia memiliki tujuan 2 (dua) arah yang saling memperkuat, yaitu (i) memperkuat kepemimpinan Indonesia dan ikut serta mewujudkan nilai-nilai HAM dan kemanusiaan yang disepakati pada tingkat regional dan global, serta (ii) memperkuat upaya nasional di bidang-bidang tersebut melalui kerja sama internasional.

Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai kegiatan seperti kampanye Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM periode 2020-2022; peran pemajuan HAM di ASEAN dan OKI; kontribusi konstruktif pada Persidangan Dewan HAM PBB (pada Sesi Maret, Juni, dan September); dan partisipasi Indonesia dalam pertemuan *High Level Week Commission on*

*the Status of Women/CSW ke-63* di New York pada bulan Maret 2019. Dalam partisipasi aktif Kemenlu di sidang-sidang PBB termasuk *side-events* terkait isu perempuan (a.l. CSW) kerap melibatkan dukungan dan partisipasi pemangku kepentingan seperti KPPA, Komnas Perempuan, KOWANI, IWAPI, Gojek, *Peace Village/Kampung Damai* dan Dharma Wanita Persatuan.

Capaian lainnya adalah kontribusi Pemri pada *Global Platform for Disaster Risk Reduction* di Jenewa, 13-19 Mei 2019; penyelenggaraan *Regional Conference on Humanitarian Assistance* di Jakarta pada 8 Agustus 2019 yang melibatkan 42 negara di kawasan, organisasi internasional dan berbagai LSM Kemanusiaan a.l. Baznas, MDMC, PMI, ACT, CWSI, DIDRN, Dompot Dhuafa, Dompot Peduli; upaya pemenangan pemilihan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM di New York tanggal 17 Oktober 2019; Partisipasi pada Persidangan SMU PBB ke-74 khususnya pada Agenda-Agenda Komite 3; penyelenggaraan *Regional Seminar of the Convention against Torture Initiative (CTI)* di Bali, 26-28 November 2019 yang diselenggarakan Indonesia sebagai salah satu *Core State* CTI bekerja sama dengan Sekretariat CTI di Jenewa dan menghadirkan perwakilan negara mitra dan pemangku kepentingan seperti *Association for the Prevention of Torture* dan *Human Rights Working Group*; *ICRC-IFRC Conference* di Jenewa, Desember 2019; partisipasi Indonesia dalam *Global Refugee Forum* pada tanggal 16-18 Desember 2019 di Jenewa.

Telah juga dilaksanakan dialog HAM Bilateral dengan Negara-Negara Mitra antara lain Iran, Russia, Norwegia dan Uni Eropa selama 2019. Indonesia juga telah melakukan penjajagan untuk kerja sama serupa dengan Jepang, Jordania, Turki, RRT, dan sejumlah negara sahabat lainnya. Pada saat yang sama menginisiasi untuk menghidupkan kembali dialog serupa dengan Swedia.

Di sisi lain, perhatian Pemerintah Indonesia terhadap penanganan isu pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri juga telah mengalami peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Hal ini utamanya didorong oleh semakin meningkatnya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Indonesia dan adanya krisis pengungsi global yang berdampak bagi banyak negara. Meskipun Indonesia bukan merupakan negara pihak dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 terkait pengungsi, namun dalam penanganan pengungsi, Indonesia senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan dan norma-norma hukum internasional yang berlaku. Hal ini diwujudkan melalui penandatanganan *MoU on Data Sharing* antara Pemerintah Indonesia dan UNHCR pada 15 Agustus 2019, serta terus menggiatkan koordinasi penanganan pengungsi melalui Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri di bawah mandat Perpres 125/2016. Untuk memperkuat kerja sama internasional penanganan pengungsi ini, juga tengah dijajaki penyusunan MoU serupa dengan IOM-Jakarta. Meningkatnya perhatian publik pada isu pengungsi di Indonesia terjadi manakala sekitar 1500 pengungsi luar negeri melakukan unjuk rasa di depan kantor UNHCR Jakarta pada Juli-Agustus 2019. Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan fungsi

sebagai motor dan koordinator dalam penanganan isu tersebut, bekerja sama dengan K/L terkait, LSM dan pihak swasta.

Pada isu perlindungan pekerja migran, Indonesia menggagas pembentukan norma internasional khususnya untuk membentuk kerangka perlindungan pekerja yang aman, teregulasi, dan teratur (tata kelola migrasi). Indonesia menjadi salah satu pemimpin dalam pembentukan norma migrasi internasional dalam *Inter-Governmental Conference to Adopt Global Compact on Migration (IGC-GCM)* di Marrakesh, Maroko, Desember 2018.

Penguatan diplomasi Indonesia dalam ekonomi dan pembangunan nasional juga merupakan program prioritas Kementerian Luar Negeri. Pemerintah Indonesia telah berupaya membuka akses pasar vaksin dan obat-obatan Indonesia ke pasar non-tradisional khususnya negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Hal ini untuk mendukung kemandirian negara dan membantu produsen nasional dalam mengenal kondisi pasar vaksin dan obat-obatan di pasar non-tradisional khususnya negara anggota OKI. Upaya tersebut tertuang dalam Dokumen Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi 2019-2021 mengenai Kemandirian Vaksin dan Obat-Obatan pada pertemuan pertama Kepala Regulator Obat-Obatan Nasional negara OKI bulan November 2018.

Pemerintah Indonesia juga menguatkan kerja sama di bidang ekonomi kreatif, ekonomi digital, pariwisata, pemeliharaan perdamaian, anti-terorisme, dan dialog lintas agama melalui kepemimpinan Indonesia pada Forum Mexico-Indonesia-Korea-Turkey-Australia (MIKTA). Forum ini telah menyelenggarakan 3 (tiga) pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri untuk menjawab berbagai persoalan global antara lain: ketegangan di semenanjung Korea; terorisme dan radikalisme; perang dagang; serta peran teknologi dan inovasi untuk pertumbuhan global.

Untuk isu ketahanan pangan, perbaikan nutrisi dan peningkatan kesejahteraan petani, Pemerintah Indonesia telah memprakarsai pengesahan *Joint Communique on Implementing the UN Decade of Family Farming (2019-2028) by Strengthening Food Security, Nutrition, and Farmers' Welfare*. Indonesia menjadi negara pertama yang menginisiasi *Conference on Strengthening Southeast Asia's Food Security, Nutrition, and Farmers' Welfare through UN Decade of Family Farming*, 4-5 April 2019 di Jakarta, yang mengesahkan *Joint Communique* tersebut. Melalui Konferensi dan *Joint Communique* dimaksud tampak komitmen dan kepemimpinan Indonesia dalam mengarusutamakan Pertanian Keluarga (*family farming*) untuk mendorong pencapaian ketahanan pangan, nutrisi dan peningkatan kesejahteraan petani.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk melestarikan sektor kelautan, optimalisasi potensi kelautan secara berkelanjutan, meningkatkan *awareness* terhadap pentingnya pelestarian laut, dan seluruh kelompok masyarakat dalam pelestarian laut. Guna mengimplementasikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pertemuan *Our Ocean Conference*, Bali, Indonesia, 28-29 Oktober

2018. Indonesia telah menyampaikan 32 komitmen pada OOC 2018, yang terbagi ke dalam 6 *areas of action*, yaitu *Maritime security*, *Marine Protected Area*, *Sustainable Fisheries*, *Marine Pollution*, *Sustainable Blue Economy*, dan *Climate Change*. Pertemuan ini telah menghasilkan 305 komitmen dengan nilai 10,7 miliar USD, dan pembentukan 14 juta km<sup>2</sup> Kawasan Konservasi Laut (MPAs) baru.

Pada pertemuan *Our Ocean Conference*, Pemerintah Indonesia secara paralel juga menyelenggarakan *Indonesia – Africa Maritime Dialogue* (IAMD) di Bali tanggal 29 Oktober 2019 dengan fokus area pada isu *Sustainable Fisheries* dan *Maritime Security*. IAMD memiliki *outcome* berupa *summary meeting* dan komitmen Indonesia dalam membantu negara-negara Afrika pada sektor maritim.

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan penguatan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di bidang lingkungan hidup yakni telah berhasil meloloskan 5 resolusi terkait lingkungan hidup pada forum 4<sup>th</sup> *United Nations Environment Assembly* di Nairobi, Maret 2019. Resolusi tersebut memberikan kekuatan konservasi, terutama dukungan komunitas internasional, terhadap ekosistem penting di Indonesia, antara lain Hutan Bakau, Lahan Gambut dan Terumbu Karang. Capaian lainnya adalah terpilihnya Wakil Indonesia menjadi *Vice President* untuk *United Nations Environment Assembly* (UNEA) ke-5 pada Tahun 2020-2021. Indonesia juga menjadi anggota pada 3 organ utama *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), yaitu *Standing Committee*, *Animal Committee*, dan *Plant Committee* mewakili Kawasan Asia Pasifik.

Selain itu, Pemerintah Indonesia terus berupaya memajukan dan mengarusutamakan isu perubahan iklim melalui kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral. Upaya dimaksud adalah untuk meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap dampak negatif perubahan iklim seperti cuaca ekstrem dan peningkatan permukaan air laut. Pemerintah Indonesia meluncurkan Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon sebagai dasar pembangunan ekonomi yang menyeimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait telah meluncurkan Program Kampung Iklim (ProKlim) untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca dan mengakui partisipasi aktif masyarakat lokal dalam melaksanakan aksi mitigasi perubahan iklim terintegrasi dan adaptasi. Implementasi ProKlim dimulai pada 2012 dengan total 2.760 desa iklim terdaftar di 33 provinsi di seluruh Indonesia.

Kementerian Luar Negeri RI juga memantapkan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam rangka mencapai kepentingan nasional Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri dan menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.

Kontribusi konkrit Kementerian Luar Negeri yang telah dicapai dalam rangka memperkuat perwujudan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera sesuai kepentingan nasional, antara lain, disepakatinya inisiatif Indonesia terkait *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-34 ASEAN di Bangkok, Thailand, tahun 2019. Kesepakatan ini menjadi konsep bersama negara ASEAN untuk memperkokoh kerja sama yang telah berjalan dan juga untuk pengembangan kerja sama konkrit di bidang maritim, konektivitas, pencapaian *UN Sustainable Development Goals 2030* dan ekonomi serta kerja sama lainnya yang bertumpu pada prinsip-prinsip dan nilai kerja sama ASEAN melalui *ASEAN-led Mechanism*. Bagi Indonesia, pengesahan AOIP merupakan (i) refleksi polugri bebas-aktif, (ii) manifestasi dari visi *Global Maritime Fulcrum* Presiden Joko Widodo, dan, (iii) proyeksi sentralitas ASEAN sebagai lingkaran konsentris pertama polugri Indonesia dan pencapaian kepentingan nasional di bidang konektivitas, pembangunan berkelanjutan dan kerja sama ekonomi.

Dalam mendorong penguatan Sekretariat ASEAN, Indonesia telah memberikan komitmennya melalui peresmian gedung Sekretariat ASEAN oleh Presiden RI bertepatan dengan peringatan HUT ke-52 ASEAN pada 8 Agustus 2019, yang diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat ASEAN dalam melaksanakan mandatnya secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi ASEAN.



**Sumber: Website Setnas ASEAN**

<http://setnas-asean.id/gallery-photos/read/peresmian-gedung-sekretariat-asean>

Lebih lanjut, untuk mendorong peningkatan peran Indonesia dalam penguatan sentralitas dan peran ASEAN dalam guliran arsitektur kawasan dan global, Indonesia memantapkan perannya dalam upaya pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut China Selatan melalui mekanisme ASEAN, yaitu implementasi *ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) serta upaya penyusunan *Code of Conduct in the South China Sea* (COC). Indonesia berperan penting dalam proses negosiasi hingga terselesainya *first reading Code of Conduct* pada bulan Juli 2019. Penguatan peran Indonesia juga terlihat dari upaya mendorong diratifikasinya Protokol Traktat SEANWFZ oleh negara pemilik senjata nuklir serta universalisasi *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* (TAC). Tercatat, 38 Negara dan 1 organisasi regional yang telah menjadi *High Contracting Parties* (HCP) atau 29 HCP di luar Negara Anggota ASEAN.

Sebagai bentuk upaya kepemimpinan yang kuat dan bertanggung jawab dalam menjawab dinamika kawasan dan tantangan global, dalam kerangka AICHR dan *AHA Centre*, Menteri Luar Negeri RI menjadi Menlu pertama ASEAN yang mendapat akses untuk mencari penyelesaian melalui pendekatan yang komprehensif di Myanmar. Selain itu, sebagai pemrakarsa pendirian *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation* (ASEAN-IPR), Indonesia telah menjadi negara tuan rumah bagi Sekretariat ASEAN-IPR sejak tahun 2017. Indonesia juga terus memastikan pelaksanaan aktifitas yang berorientasi pada perdamaian serta manajemen dan resolusi konflik antara lain melalui penyelenggaraan *ASEAN-IPR Regional Youth Conference* dan *Research Study* mengenai peran Indonesia dalam upaya memediasi konflik di Filipina Selatan.

Dalam mendorong kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara, Indonesia berhasil menginisiasi dan mendorong pengesahan *EAS Leaders' Statement on Combating Marine Plastic Debris* yang merupakan prakarsa Indonesia pada KTT *East Asia Summit* ke-13 di Singapura, November 2018. Dari 5 dokumen hasil KTT EAS, hanya Indonesia dan Singapura yang menginisiasi dan menjadi *co-chairs statement* dari negara ASEAN. Sebagai tindak lanjut realisasi dari kesepakatan para Pemimpin EAS tersebut, Indonesia telah menyampaikan suatu inisiatif yaitu *EAS Regional Plan of Action (RPoA) on Combating Marine Plastic Debris* yang saat ini masih dalam pembahasan di tingkat ASEAN (*ASEAN led-mechanism*) melalui badan sektoral ASEAN di bidang lingkungan hidup (ASOEN). Konsep *EAS RPoA on Combating Marine Plastic Debris* yang diajukan Indonesia tersebut merupakan buah pemikiran bersama para pemangku kepentingan nasional yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indonesia juga berhasil memasukkan kerja sama Maritim menjadi salah satu dari 9 area kerja sama *East Asia Summit* pada *Manila Plan of Action to advance the Phnom Penh Declaration on the East Asia Summit Development Initiative 2018-2022* disahkan di Manila pada tahun 2018.

Dalam konteks kerja sama kemitraan ASEAN-Plus Three (APT), sebagai *lead country* Indonesia telah menyiapkan suatu program sebagai implementasi rekomendasi *East Asia Vision Group* (EAVG) No.24 tentang pendirian/pengembangan studi Asia Timur di universitas terkemuka di Kawasan Asia Timur melalui penyelenggaraan *APT Student Camp* dan *APT Seminar on East Asian Studies at Major Universities* yang akan dilaksanakan pada semester kedua tahun 2020, melalui kerja sama Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Universitas Pasundan.

Sebagai *Country Coordinator* kemitraan ASEAN-Selandia Baru periode 2015-2018, Indonesia berhasil meningkatkan status kemitraan ASEAN-Selandia Baru menjadi Kemitraan Strategis dan mendorong implementasi Rencana Aksi hingga 93% (Juli 2018). Sebagai *Country Coordinator* kemitraan ASEAN-Rusia periode 2018-2021, Indonesia telah menetapkan 3 area prioritas kerja sama, yaitu di isu kontra-terorisme, keamanan siber dan penanganan bencana. Indonesia juga berhasil memfasilitasi peningkatan kerja sama ASEAN dengan Rusia menjadi *Strategic Partnership* pada tahun 2018.

Indonesia juga berhasil mengaktifkan kembali kerja sama ASEAN-MERCOSUR yang sudah berhenti sejak tahun 2010 dengan melaksanakan *the 2<sup>nd</sup> ASEAN-MERCOSUR Ministerial Meeting* pada tahun 2017 melalui kerja sama yang baik antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian dan Kementerian Perdagangan. Pertemuan menyepakati perlunya memperkuat kerja sama terutama di bidang ekonomi, perdagangan, investasi serta kerja sama sosial budaya.

Dalam rangka mendukung pemantapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN, Indonesia secara aktif berkontribusi dalam pembahasan dan formulasi Visi Masyarakat ASEAN 2025 di tahun 2015. Berbagai elemen yang menjadi kepentingan Indonesia telah terefleksikan dalam Cetak Biru di 3 Pilar, yang dihasilkan melalui serangkaian pertemuan *High Level Task Force on ASEAN Community's Vision Post-2015* selama tahun 2015. Indonesia juga telah berhasil mendorong implementasi Cetak Biru Masyarakat ASEAN, antara lain melalui kontribusi aktif pada penyelesaian Rencana Aksi Nasional (RAN) di ketiga pilar.

Lebih lanjut, untuk memasyarakatkan ASEAN, Indonesia juga terus berupaya untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain, dengan membentuk lebih banyak Pusat Studi ASEAN di berbagai daerah di Indonesia, melalui kerja sama dengan universitas setempat.

Dalam berdiplomasi di kawasan Pasifik, Indonesia terus berupaya meningkatkan hubungan bilateral dan kerja sama regional dengan negara-negara dan organisasi regional di kawasan melalui kerja sama pembangunan, ekonomi, kemaritiman, lingkungan, sosial budaya, hingga politik dan keamanan. Selain dalam konteks politik luar negeri, Indonesia juga telah melaksanakan inisiatif peningkatan kerja sama dengan Pasifik dalam rangka pemberdayaan kawasan timur Indonesia.

Indonesia terus memperkuat peran dan *engagement* di Pasifik melalui peningkatan kerja sama di forum regional seperti *Pacific Islands Forum* (PIF), *Melanesian Spearhead Group* (MSG), *Coral Triangle Initiative Coral Reef, Fisheries and Food Security* (CTI CFF), PIDF (*Pacific Islands Development Forum*) dan SwPD (*Southwest Pacific Dialog*).

“*Pacific Elevation*” telah diluncurkan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pada Juli 2019 yaitu suatu visi baru Indonesia dalam meningkatkan hubungan dan kemitraan dengan negara-negara dan kawasan Pasifik melalui mekanisme bilateral, regional, dan multilateral. Visi tersebut berfokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan serta didukung upaya pendekatan lainnya di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya. Tujuan *Pacific Elevation* utamanya untuk meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia di kawasan Pasifik dan secara khusus bisa memberikan manfaat langsung bagi kalangan bisnis dan BUMN Indonesia.

Indonesia juga telah menyelenggarakan *Indonesia-South Pacific Forum* (ISPF) di Jakarta pada 21 Maret 2019 untuk mendorong kerja sama pengembangan infrastruktur, konektivitas, pembangunan, dan kemaritiman antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Sementara untuk mendorong kerja sama di bidang perdagangan, pariwisata dan sosial budaya, Indonesia telah menggelar pameran bisnis *Pacific Exposition* dan peluncuran di Auckland pada 11-14 Juli 2019.

Wujud nyata dari pencapaian target sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk sub-agenda dalam RPJMN 2015-2019 “Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif” adalah dengan dihasilkannya beberapa perjanjian/ kesepakatan antara Indonesia dengan negara mitra.

Dinamika di kawasan Asia Tenggara juga diwarnai dengan terjadinya konflik di Rakhine State Myanmar. Pada bulan Agustus 2017, dipicu oleh serangan yang dilakukan oleh *Arakan Rohingya Salvation Army* (ARSA) terhadap pos-pos polisi, dilakukan operasi militer di wilayah tersebut. Berbagai bentrokan senjata telah menyebabkan korban jiwa dan lebih dari 700 ribu etnis Rohingya kehilangan tempat tinggal dan mengungsi ke wilayah Bangladesh, sementara pengungsi Buddha menyelamatkan diri ke Selatan (Sittwe).

Sebagai tetangga dan sebagai bagian dari keluarga besar ASEAN, untuk mewujudkan dan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, Indonesia mengambil peran aktif dalam upaya penyelesaian konflik di Rakhine State.

Merespon situasi yang terjadi, Menteri Luar Negeri pada 4-5 September 2017 melakukan kunjungan ke Myanmar dan Bangladesh. Dalam kunjungan ke Myanmar, Menlu RI telah bertemu dengan *State Counsellor* Myanmar, Aung San Suu Kyi. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri menyampaikan formula 4+1, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan; menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan; perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama; pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan dan +1, yaitu

mengimplementasikan rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Negara Bagian Rakhine yang dipimpin oleh Kofi Annan.

Dari pertemuan tersebut juga berhasil diperoleh kesepakatan dari Pemerintah Myanmar untuk dibukanya akses bantuan kemanusiaan dari Indonesia dan ASEAN dengan mengedepankan prinsip inklusivitas. Dalam pelaksanaan diplomasi kemanusiaan Indonesia ini, Pemerintah Indonesia bersinergi dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Bantuan yang diberikan berupa *emergency relief* seperti obat-obatan; makanan dan kebutuhan dasar; pembangunan sekolah; dan mobil ambulance yang disalurkan baik melalui Pemerintah Myanmar maupun Pemerintah Bangladesh. Bantuan tersebut juga diikuti dengan program pembangunan fasilitas pelayanan publik seperti sekolah dan rumah sakit. PMI dan MER-C, dengan dukungan Pemri telah membangun rumah sakit di Myaung Bywe, Mraukh U, Rakhine State. Serah terima secara teknis atas rumah sakit tersebut telah dilakukan pada 10 Desember 2019.

Situasi kemanusiaan para pengungsi yang semakin memprihatinkan dan belum dapat teralisasinya repatriasi yang aman, sukarela dan bermartabat menjadikan isu ini salah satu prioritas diplomasi Indonesia. Indonesia berpandangan bahwa ASEAN merupakan entitas yang paling tepat untuk membantu agar repatriasi dapat terlaksana. Sebagai organisasi regional ASEAN juga seharusnya menjadi *first responder* terhadap situasi di kawasan.

Untuk itu, Indonesia melalui berbagai pertemuan baik bilateral maupun forum regional dan internasional, mendorong dan mengupayakan keterlibatan ASEAN. Upaya Indonesia tersebut memberikan hasil dimana pada KTT ASEAN ke-33, Myanmar bersedia untuk menerima keterlibatan ASEAN melalui *ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance* (AHA Centre) untuk membantu memfasilitasi proses repatriasi. Untuk memperkuat peran ASEAN pula, Indonesia telah memberikan bantuan sebesar USD 500.000 yang diserahkan pada 20 Desember 2019.

Secara bilateral Indonesia juga terus mengedepankan *constructive engagement* terhadap Myanmar. Komitmen dan keterlibatan Pemerintah Myanmar sangat penting untuk dapat diimplementasikannya berbagai rekomendasi dalam upaya mewujudkan perdamaian di Rakhine State. Terkait hal ini, Indonesia telah pula berkontribusi dan bekerja sama dalam bentuk berbagai kegiatan *sharing best practices* dan *capacity building* seperti *the 1st Indonesia – Myanmar Interfaith Dialogue* (IMID) di Jakarta dan Yogyakarta, pada tanggal 21 – 24 Mei 2017; Pengiriman Tenaga Ahli di Bidang Pertanian untuk memberikan pelatihan di Myanmar, 3-6 Desember 2018; *Indonesia-Myanmar Interfaith Harmony Visit: Sharing Best Practices in Religious Harmony*, di Jakarta dan Yogyakarta, 8-13 September 2019; serta *Training for Peace Process* bagi anggota *Joint Ceasefire Monitoring Committee* Myanmar terkait proses perdamaian di Aceh 24-25 Juli 2019.

### Diplomasi Perbatasan

Secara umum, Indonesia memiliki batas darat dengan 3 (tiga) negara dan batas maritim dengan 10 negara. Untuk penetapan batas negara tersebut, Pemerintah RI memiliki program prioritas nasional, yaitu Diplomasi Perbatasan yang pelaksanaannya dilakukan melalui perundingan penegasan batas darat dan perundingan penetapan batas maritim. Perundingan batas negara merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kedaulatan negara yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Adapun implementasi perundingan penegasan batas darat dan penetapan batas maritim dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dimana Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang dimaksud mengatur bahwa batas wilayah negara Indonesia ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, perundingan penegasan batas darat dan penetapan batas maritim telah ditetapkan menjadi salah satu prioritas nasional Pemerintah RI serta menjadi salah satu prioritas utama Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan perundingan selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019 telah dilaksanakan:

# 79

#### Perundingan Batas Maritim

**dengan Negara:**

- a. India
- b. Malaysia
- c. Viet Nam
- d. Palau
- e. Filipina
- f. Singapura
- g. Thailand
- h. Timor-Leste
- i. Australia

# 87

#### Perundingan Penegasan Batas Darat dan Kerja Sama Lintas Batas

**dengan Negara:**

- a. Malaysia
- b. Timor-Leste
- c. Papua Nugini

Dalam melaksanakan perundingan perbatasan dimaksud, Pemerintah RI bersama dengan Pemerintah negara tetangga tidak hanya melakukan perundingan secara formal dalam bentuk Pertemuan Teknis, namun juga melakukan perundingan dalam berbagai kesempatan informal sebagai upaya untuk mengintensifkan proses negosiasi. Adapun upaya Pemerintah RI dalam mengintensifkan proses negosiasi tersebut memberikan beberapa kemajuan signifikan dalam perundingan penetapan batas maritim yang telah dicapai dengan Malaysia,

Viet Nam, dan Palau. Untuk batas darat, Indonesia telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Malaysia terkait beberapa segmen batas darat di Kalimantan serta perundingan penegasan batas darat dengan Timor-Leste yang telah memasuki tahap akhir.

Salah satu agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2015-2019 adalah “memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim”. Untuk mendukung agenda prioritas Pemerintah RI tersebut, Kementerian Luar Negeri telah berhasil menginisiasi terlaksananya berbagai program kerja sama maritim di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, khususnya melalui momentum strategis keanggotaan pada forum *Indian Ocean Rim Association (IORA)* dengan fokus untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.



Sumber: Instagram Kementerian Luar Negeri RI @kemlu\_ri

Salah satu capaian kinerja Kementerian Luar Negeri yang mendukung agenda nasional terkait poros maritim Indonesia adalah berbagai kerja sama intra kawasan yang antara lain diwujudkan melalui forum *Indian Ocean Rim Association (IORA)*. Peningkatan kerja sama terkait poros maritim Indonesia tersebut merupakan momen yang sangat strategis di tengah keketuaan Indonesia pada forum tersebut. Indonesia secara resmi menerima keketuaan IORA dari Australia pada *the 15<sup>th</sup> Indian Ocean Rim Association (IORA) Council of Ministers Meeting (COMM) and its related meetings* di Padang dan Jakarta, 20 – 23 Oktober 2015. Indonesia mengangkat tema keketuaan: “*Strengthening Maritime Cooperation For a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean*”.

Capaian kinerja Kementerian Luar Negeri melalui forum IORA sepanjang tahun 2017-2018 diantaranya menghasilkan berbagai perjanjian kerja sama strategis dan konsolidasi kelembagaan yang meliputi berbagai bidang, seperti: *countering terrorism and violent extremism, blue economy*, pengembangan perikanan berkelanjutan, pengembangan

pariwisata berkelanjutan, persamaan gender dan penguatan ekonomi kaum wanita, keamanan maritim, serta pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta diterimanya prakarsa Indonesia terkait isu Poros Maritim Dunia dan *Indo-Pacific Framework*. Usulan Indonesia telah dicatat dalam *Decision Report 8th IORA Bi-annual CSO*.

Adapun kerja sama strategis melalui forum IORA difokuskan pada enam bidang, yaitu (i) keselamatan dan keamanan maritim, (ii) fasilitasi perdagangan, (iii) manajemen perikanan, (iv) manajemen risiko bencana alam, (v) kerja sama akademis dan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (vi) pertukaran kebudayaan dan pariwisata. Di luar prioritas tersebut, IORA juga mengangkat dua buah *cross cutting issues*, yaitu *Blue Economy* dan *Women Empowerment*. Di samping itu, prakarsa Indonesia terkait peningkatan kerja sama kemaritiman dalam rangka mengatasi ancaman keamanan bersama, terutama dalam penanganan *IUU Fishing* dan *marine plastic debris* juga diterima pada pertemuan *30<sup>th</sup> Leaders Session with Forum Dialogue Partners (FDP)* tanggal 4 September 2018 dalam rangkaian *49<sup>th</sup> Pacific Islands Forum (PIF) and Related Meetings*, Nauru, 3 - 6 September 2018.

Sementara itu, sebagai pemrakarsa *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security (CTI CFF)*, dan tuan rumah *Regional Secretariat CTI CFF* serta memiliki area terluas di kawasan Segitiga Terumbu Karang, Indonesia terus mendorong CTI-CFF menjadi semakin relevan di tingkat regional dan global. Terutama dalam hal ini untuk pemajuan kerja sama untuk pengelolaan (i) bentang laut/*seascape*; (ii) sumber daya laut berbasis ekosistem; (iii) kawasan konservasi laut; (iv) adaptasi perubahan iklim; (v) spesies terancam punah, baik dalam konteks teknis, pembangunan maupun keilmuan.

Melalui CTI CFF, Indonesia juga berupaya memperkuat kerja sama dengan negara-negara anggota lain terutama Malaysia, Filipina, Timor Leste dan Papua Nugini dalam pengelolaan sumber daya di perbatasan dan bersifat lintas batas/*migratory*. Di sisi lain, peningkatan hubungan dan kerja sama konkret Indonesia dengan negara-negara anggota dari kawasan Pasifik yaitu PNG dan Solomon Islands juga terus didorong.

Melalui keanggotaan dan kerja sama pada CTI CFF, Indonesia telah menerima berbagai manfaat konkret. Berbagai kerja sama dalam pelaksanaan *joint-project* telah dilakukan dengan CTI CFF Partners seperti WWF, *Conservation International*, GIZ, dan *Wildlife Conservation Society*. Bantuan teknis dan pendanaan juga telah diterima Indonesia untuk program-program bidang kelautan yang diselaraskan dengan tujuan CTI-CFF yang nilainya mencapai USD 43 juta melalui kemitraan dengan UNDP, FAO, *World Bank*, GIZ, USAID dan ADB. Beragam investasi juga telah didatangkan untuk bidang-bidang prioritas CTI CFF seperti pengembangan wisata bahari, pengelolaan kawasan konservasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Selain itu, pada Mei 2020 Indonesia kembali mendapat kepercayaan dari negara-negara CTI CFF untuk melanjutkan mandat sebagai Ketua pada *Financial Resources Working Group* (FRWG) periode 2020-2022, setelah sukses menjalani periode pertama sejak tahun 2018.

Dihasilkan pula berbagai perjanjian kerja sama strategis dan konsolidasi kelembagaan yang meliputi berbagai bidang, antara lain: Pembangunan Koridor Ekonomi Komprehensif Regional, Pengembangan Sumber Daya Manusia Petugas dan Pejabat Pemerintah di bidang Maritim, Promosi Bersama dalam Kerangka Kerja Visi Poros Maritim Dunia dan Sabuk Ekonomi Jalur Sutra dan Prakarsa Jalur Sutra Maritim Abad ke-21, dan kerjasama maritim. Keseluruhan kinerja Kementerian Luar Negeri di bidang kemaritiman juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2017.

### Diplomasi Ekonomi

Pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ditujukan untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam memperkuat tata kelola ekonomi global dan regional guna mendukung kepentingan ekonomi nasional.

Di tataran global, Indonesia telah berperan aktif dalam upaya penanganan krisis ekonomi global termasuk mendorong tata kelola ekonomi yang adil, berkesinambungan, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (*quality growth*) sejalan dengan kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Peran tersebut telah ditunjukkan dalam berbagai forum internasional, termasuk G-20.

Di tingkat regional, upaya diplomasi ekonomi Indonesia juga ditandai dengan berbagai upaya proaktif mendorong kerja sama ekonomi regional. Indonesia telah menjadi *key driver* sekaligus *bridge builder* dalam menyikapi tantangan dalam perundingan tersebut, yakni ambisi membuka akses pasar seluas-luasnya di tengah adanya perbedaan *level of development* di antara negara-negara RCEP.

Secara bilateral, meski menghadapi berbagai tantangan global dan regional, diplomasi ekonomi Indonesia bukan tanpa hasil. Dalam periode 2015-2019, keberhasilan tersebut antara lain ditandai dengan penandatanganan lebih dari 200 perjanjian MOU (bilateral dan multilateral) kerja sama ekonomi serta penandatanganan perjanjian internasional FTA/CEPA dan *bilateral investment treaty* (BIT/P4M), seperti *ASEAN-Hong Kong FTA* dan *ASEAN-Hongkong Investment Agreement*, *Indonesia – Chile CEPA*, Protokol Amandemen dari *Indonesia-Pakistan PTA*, *Indonesia-European Free Trade Area (EFTA) CEPA*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *Indonesia – Australia CEPA*, *Indonesia-Singapore BIT* dan *Indonesia-Mozambique PTA*.

Terkait hal-hal tersebut, Indonesia juga tengah dan terus merundingkan perjanjian internasional bidang ekonomi dengan beberapa negara mitra, antara lain *Indonesia –*

*European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA), Indonesia – Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA), Indonesia-Fiji Preferential Trade Agreement (IF-PTA), Indonesia-Papua New Guinea Preferential Trade Agreement (IPNG-PTA), PTA Indonesia-Mauritius, PTA Indonesia-Djibouti, PTA Indonesia-Bangladesh, Tunisia, Maroko serta P4M RI-Swiss dan kelanjutan P4M RI-Kuwait.* Indonesia juga telah memulai peninjauan perundingan P4M dengan negara mitra khususnya untuk perlindungan investasi Indonesia di luar negeri. Salah satu negara potensial adalah Timor Leste, yang perundingannya diperkirakan akan dimulai pada tahun 2020. Selain itu, Indonesia juga berencana untuk membentuk kerja sama PTA dengan Serbia yang berpotensi sebagai “hub” perdagangan bagi produk dan komoditas RI di pasar yang lebih luas. Serbia memiliki berbagai pengaturan perdagangan dengan sejumlah blok ekonomi, diantaranya Uni Eropa, CEFTA, EFTA, Rusia, Turki, dan EAEU dengan total nilai ekonomi sebesar USD 23 triliun, yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memasarkan komoditas ekspor di kawasan ETT.

Berbagai perundingan perjanjian internasional di bidang ekonomi tersebut senantiasa dilakukan berdasarkan semangat kemitraan (*partnership*), kesamaan (*equality*), dan saling menguntungkan (*mutual benefit*) agar menghasilkan perjanjian internasional yang berkualitas, yang aman dari segi politis, yuridis, teknis, dan melindungi kepentingan nasional dalam jangka panjang. Hal tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin berkualitas, yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Di forum lainnya, Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan *Indonesia – Africa Forum (IAF)* di Bali, 10-11 April 2018 dengan capaian konkret berupa 10 *business deals* dengan total nilai USD 586,56 juta. *Business deals* tersebut mencakup sektor industri strategis, infrastruktur, pembiayaan, pertambangan, tekstil, perawatan pesawat dan komoditas ekspor-impor. Sebagai tindak lanjut dari IAF 2018, Pemerintah Indonesia kemudian menyelenggarakan *Indonesia – Africa Infrastructure Dialogue (IAID)* di Bali, 20-21 Agustus 2019. IAID menghasilkan 11 *business deals* di sektor konstruksi, fasilitas infrastruktur, pembiayaan, farmasi, dan perdagangan komoditas dengan nilai total USD 822 juta.

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan pula *Indonesia – South Pacific Forum (ISPF)* pada 21 Maret 2019 di Jakarta, yang diikuti 15 negara dan teritori di kawasan Pasifik Selatan. Tema yang diangkat adalah “*Our Future; Shared Ocean, Shared Prosperity*”. ISPF menandai dimulainya era baru kerja sama Indonesia dengan kawasan Pasifik Selatan. Rangkaian kegiatan ISPF terdiri dari Forum Pemerintah dengan fokus pada konektivitas dan ekonomi kelautan, *business engagement, economic partnership and showcase, enterprenural training programme* bagi pelaku wirausaha dari kawasan Pasifik Selatan, serta konsultasi bilateral mengenai *Preferential Trade Agreements (PTA)* Indonesia – Fiji dan Indonesia – Papua Nugini (PNG). Sejumlah *outcomes* konkret ISPF antara lain penandatanganan kesepakatan peluncuran perundingan PTA Indonesia – Fiji dan PTA Indonesia – PNG, MoU kerja sama

Indonesia Eximbank dengan *Audie Building Industry* untuk dukung proyek infrastruktur di Pasifik, kesepakatan pemberian pelatihan keprotokolan dan MICE oleh Indonesia kepada Tuvalu sebagai bagian dukungan Indonesia terhadap penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) *Pacific Islands' Forum* (PIF) di Tuvalu pada tahun 2019.

Selain ISPF, telah berlangsung pula *High-Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation* (HLD-IPC) yang diselenggarakan pada 20 Maret 2019 di Jakarta. Dalam HLD-IPC, telah berlangsung serangkaian pertemuan bilateral Menlu RI dengan sejumlah pimpinan delegasi negara-negara Asia Timur dan Pasifik.

Indonesia juga merupakan tuan rumah rangkaian pertemuan tahunan IMF-WB di Bali, Oktober 2018 dan meluncurkan 30 proyek investasi dan inisiatif untuk SDGs yang diperkirakan dapat memobilisasi investasi sebesar USD 10 milyar. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan proyek infrastruktur BUMN sebesar USD 13,6 milyar dan USD 30 juta proyek smelter PT Timah-WIKA-Eximbank di Nigeria. Dengan Singapura, telah diselenggarakan penandatanganan 7 kesepakatan pada sektor investasi, kerja sama budaya, kerja sama *fin-tech*, implementasi industri 4.0, teknologi keuangan dan pengembangan SDM di bidang maritim dan kapal pesiar.

Pemerintah Indonesia juga menunjukkan kepemimpinan dan memajukan berbagai kepentingan nasional dalam forum G-20 dengan mengusung isu strategis yaitu, ekonomi digital dan ekonomi kreatif, pengembangan energi terbarukan dan energi alternatif, reformasi WTO, *blended finance* dan anti-terorisme. Pada *Leaders' Declaration* pada KTT G20 2018, kepentingan Indonesia yang berhasil diperjuangkan, antara lain, referensi untuk mendorong dan bertukar pandangan terkait bisnis model ekonomi digital; referensi terkait pengembangan energi bersih - termasuk energi terbarukan - untuk promosi penggunaan dan eksplorasi kerja sama internasional terkait biofuel; referensi terkait dukungan terhadap negara berkembang melalui mekanisme K untuk pencapaian dan implementasi Agenda 2030; dan referensi terkait penguatan kerja sama dengan industri digital dalam melawan eksploitasi internet dan medsos untuk tujuan yang berkaitan dengan terorisme.

Sementara itu, kepentingan Indonesia yang berhasil diterima dalam *Osaka Leaders' Declaration* pada KTT G20 2019 adalah referensi terkait "*dispute settlement system*" di WTO sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk mendorong reformasi WTO; referensi terkait "*blended finance*" sebagai mekanisme dan pembiayaan alternatif untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan; referensi untuk pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata dan penciptaan lapangan kerja; dan referensi terkait "*cleaner energy*" dan "*different possible national paths*" dalam proses transisi energi.



Sumber: Website Kementerian Luar Negeri

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/408/view/indonesia-bawa-usulan-idea-hub-di-ktt-g20>

Selain dalam forum G20, Pemerintah Indonesia menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri ekonomi kreatif terbesar dunia dengan memprakarsai *World Conference on Creative Economy (WCCE)* pertama di Bali, 6-8 November 2018. WCCE sebagai konferensi tingkat dunia pertama yang mengangkat isu ekonomi kreatif. Pertemuan ini menghasilkan *Bali Agenda for Creative Economy* untuk mendorong kerja sama di bidang ekonomi kreatif dan mendukung pertumbuhan industri ekonomi kreatif di dalam negeri. Dalam pelaksanaan WCCE, Pemerintah Indonesia melibatkan seluruh pemangku kepentingan sektor ekonomi kreatif, termasuk asosiasi bisnis, *start-ups* nasional, dan pelaku ekonomi kreatif.

Pemerintah Indonesia juga telah berhasil memperjuangkan isu ekonomi kreatif sebagai perhatian utama dunia dengan disahkannya Resolusi PBB yang berjudul "*International Year of Creative Economy for Sustainable Development, 2021*" pada bulan Desember 2019. Proses perumusan atas rancangan resolusi PBB tersebut melibatkan kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, dan masyarakat umum yang dilakukan secara proporsional dan berkesinambungan. Keberhasilan diplomasi Indonesia atas disahkannya resolusi PBB mengenai ekonomi kreatif tersebut semakin memperlihatkan arti penting ekonomi kreatif terhadap kontribusi pencapaian agenda pembangunan yang berkelanjutan (SDGs), antara lain untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat, kesetaraan gender, penyediaan lapangan kerja, maupun produksi yang berkelanjutan.

Di bidang industri, Pemerintah Indonesia menunjukkan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional sebagai salah satu negara yang terdepan dalam pengembangan *industry 4.0* melalui penyelenggaraan *Regional Conference on Industrial Development (RCID)* di Bali, 8-9 November 2018 untuk kawasan Asia Pasifik. Konferensi ini memperkuat profil industri nasional di tingkat regional yang sejalan dengan peta jalan '*Making Indonesia 4.0*' yang disahkan oleh Presiden RI pada Mei 2018 dan menghasilkan *Bali Agenda for Industry 4.0*. Agenda tersebut adalah cerminan semangat untuk meningkatkan kerja sama dan *sharing best practices* di bidang *Industry 4.0*. antara pemangku kepentingan industri di kawasan dengan dukungan dari *United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)*.

Di bidang perdagangan internasional, Pemerintah Indonesia mendorong reformasi sistem perdagangan multilateral melalui *World Trade Organization (WTO) Reform* melalui perumusan sebuah *non-paper* yang berjudul "*Safeguarding the Multilateral Trading System and Defining the Strategic Way Forward: A Non-paper*". Di tengah perang dagang dan berbagai tindakan unilateralisme yang dilakukan banyak negara di bidang ekonomi dan perdagangan internasional, Indonesia memiliki kepentingan agar perdagangan internasional tetap dapat berjalan dengan lancar sehingga tetap berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Melalui *WTO Forum*, diplomasi Indonesia bersama-sama kementerian/lembaga, lembaga kajian dan *think-tank*, akademisi, serta masyarakat, terlibat secara aktif berperan dalam berbagai pembahasan serta pembentukan tatanan (*norm-setting*) global di bidang perdagangan internasional yang menjaga prinsip keterbukaan (*open*), berdasarkan aturan (*rules-based*), dan tidak diskriminatif (*non-discriminative*), termasuk dalam upaya untuk menjalankan, memperbaiki serta meningkatkan secara inklusif (*inclusive*) kinerja dari sistem perdagangan multilateral (*Multilateral Trading System/MTS*).

Upaya diplomasi multilateral Indonesia di bidang perdagangan internasional di WTO juga dilakukan untuk menjaga kepentingan pelaku usaha di dalam negeri baik untuk perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang dilakukan melalui *platform* elektronik (*e-commerce*). Proses negosiasi plurilateral *Joint Statement Initiative (JSI) on E-Commerce* di WTO yang berjalan sejak awal tahun 2019 menjadi sangat strategis untuk semakin membuka peluang dan kesempatan terhadap peran dan kontribusi perdagangan *e-commerce* Indonesia di tingkat global. Keterlibatan diplomasi Indonesia dalam proses negosiasi yang bertujuan untuk dibentuknya suatu tatanan global yang mengatur mengenai perdagangan elektronik di tingkat global dilakukan dengan melibatkan kementerian/lembaga teknis terkait, pelaku usaha, asosiasi, lembaga *think-tank*, serta masyarakat, guna memastikan bahwa proses negosiasi tersebut sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur mengenai perdagangan secara elektronik.

Selain itu, sebagai mandat dari pelaksanaan agenda pembangunan berkelanjutan khususnya terkait *Sustainable Development Goals (SDGs)* 14.6, diplomasi Indonesia di bidang perdagangan internasional berperan dan terlibat aktif dalam proses perundingan

(*Negotiation Group on Rules*) untuk pembentukan disiplin/aturan subsidi perikanan (*Fisheries Subsidies*) di WTO untuk memperjuangkan kepentingan pemberian subsidi atau bantuan pemerintah bagi nelayan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga sumber daya hayati kelautan secara berkelanjutan (*sustainable fisheries*) serta melindungi dan menjaga aliran pemberian subsidi bagi nelayan kecil dan skala kecil di Indonesia yang saat ini diperkirakan berjumlah sekitar 3 (tiga) juta orang, sehingga diplomasi Indonesia dalam proses negosiasi di WTO dilakukan melalui proses konsultasi yang melibatkan kementerian/lembaga dan instansi teknis yang terkait. Pembentukan disiplin/aturan di bidang subsidi perikanan secara global di WTO selain akan berdampak secara positif terhadap stabilitas harga pasar (non-distortif) di tingkat global terhadap komoditas perikanan, juga akan secara *offensif* memberikan dampak positif bagi Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menjaga sumber daya hayati kelautan di wilayah perairan Indonesia dari berbagai tindakan pencurian ikan (*Illegal Fishing*) yang dilakukan oleh kapal asing.

Di bidang komoditas pertanian, menghadapi meningkatnya hambatan perdagangan baik tarif maupun non-tarif terhadap kelapa sawit, maka Indonesia didukung oleh Kelompok Regional Asia dan beberapa negara anggota FAO lainnya, berhasil mendapatkan mandat dari FAO *Committee on Commodity Problems* untuk memulai penyusunan *Voluntary Guidelines on attaining SDGs through Sustainable Vegetable Oils*. *Voluntary Guidelines* (VG) tersebut merupakan alat penting bagi negara anggota sebagai rujukan dalam melihat kontribusi minyak nabati terhadap pencapaian SDGs baik dari dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. VG juga dapat menjadi rujukan untuk menghindari upaya-upaya diskriminasi menghambat akses pasar kelapa sawit dengan alasan deforestasi maupun kesehatan.

Pemerintah Indonesia juga memperjuangkan komoditas utama lainnya yakni karet, dalam kerangka *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) dalam pemberlakuan *Agreed Export Tonnage Scheme* (AETS). ITRC menyepakati penerapan Skema Pengurangan Ekspor Karet Alam atau *Agreed Export Tonnage Scheme/AETS ke-6* sebesar 240 ribu ton dengan jangka waktu selama 4 bulan (1 April – 31 Juli 2019 bagi Indonesia dan Malaysia serta 20 Mei – 19 September 2019 bagi Thailand).

Di bidang komoditas pertanian, diplomasi juga difokuskan pada upaya pengembangan komoditas pertanian, termasuk upaya peningkatan produksi dan mengatasi hambatan perdagangan serta mewujudkan ketahanan pangan. Kegiatan diplomasi tersebut dilakukan dengan melibatkan koordinasi dengan K/L teknis terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kemenkoperekonomian, Kementerian Pertanian dan juga asosiasi pengusaha komoditas terkait seperti GAPKI (kelapa sawit), GAEKI (kopi) dan GAPKINDO (karet).

Sebagai contoh, sejalan dengan Inpres No. 6 tahun 2019 mengenai Rencana Aksi Kelapa Sawit Berkelanjutan, Kemenlu dan Kemendag telah dimandatkan untuk dapat melakukan diplomasi, promosi dan advokasi untuk menuju keberterimaan sertifikasi *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) oleh pasar internasional.

Di bidang kerja sama ekonomi ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam perundingan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN dan 6 negara mitra besar. Sesuai mandat para pemimpin (*Leaders*) negara-negara RCEP dan hasil pertemuan *the Third RCEP Summit* 4 November 2019, RCEP diharapkan dapat ditandatangani pada bulan November 2020. Indonesia juga berperan aktif dalam upaya peningkatan dan penguatan kerja sama maritim terkait aspek ekonomi pada isu *Illegal, Unregulated, and Unreported* (IUU) *Fishing*, penyelesaian perundingan dan implementasi *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA) beserta penyelesaian *General Review*-nya, penyelesaian perundingan *ASEAN Hong Kong Free Trade Area* (AHFTA), penyelesaian *Mutual Recognition Agreements on Automotive Products*, mendorong Ratifikasi dan Implementasi *ASEAN Trade in Services Agreement* (ATISA), penyelesaian *ASEAN Mutual Recognition Agreements (MRAs) on Professional Services* untuk 8 profesi, implementasi *ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation* (APAEC) 2015-2025, implementasi *ASEAN Minerals Cooperation Action Plan* (AMCAP) 2016-2025, dan implementasi *ASEAN Comprehensive Investment Agreement* (ACIA), Penyelesaian dan Implementasi *ASEAN Digital Masterplan 2025*, Ratifikasi dan Implementasi *ASEAN Agreement on E-Commerce*, serta berperan aktif dalam implementasi *Strategic Plan of Actions on Food, Agriculture and Forestry in AMAF 2016 – 2025*.



**Sumber: Website Setnas ASEAN**

<http://setnas-asean.id/gallery-photos/read/pertemuan-the-preparatory-rcep-tnc-for-7th-rcep-ministerial-meeting-7th-rcep-mm>

Indonesia secara aktif juga berhasil menggali dukungan dari negara-negara ASEAN untuk pembahasan komoditas minyak sawit (*Palm Oil*) dengan negara-negara Uni Eropa pada pertemuan ASEAN – Uni Eropa di Brussels tanggal 20-21 Januari 2019. Sedangkan di bidang maritim dan perikanan, Indonesia berhasil mendorong diterimanya usulan

pembentukan *ASEAN Network for Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* (AN-IUUF) oleh negara-negara ASEAN lainnya (*Sidang The 2nd ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU, Bangkok 13-14 Desember 2019*). Indonesia melalui ASEAN juga berkomitmen mendorong proyek-proyek konektivitas berupa infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi dengan mensinergikan proyek *Palapa Ring Indonesia* dalam mendukung *BIMP-EAGA Submarine Terrestrial Cable (BEST Cable)* serta mendorong pengembangan berbagai *start-up* Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memanfaatkan ekonomi digital. Indonesia juga telah bergabung dalam *ASEAN Single Window (ASW) Live Operation* bersama-sama dengan negara ASEAN lainnya sejak akhir tahun 2019, yang diharapkan dapat mendorong efisiensi dan kemudahan ekspor komoditas Indonesia ke negara-negara ASEAN.

Dalam berbagai perundingan terkait perjanjian/kesepakatan ekonomi di kawasan ASEAN tersebut, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga maupun pihak lain di Indonesia yang menjadi *focal point* masing-masing bidang kerja sama. Misalnya Kementerian Perdagangan sebagai *focal point* perundingan terkait *Free Trade Agreement (FTA)*, ATIGA, AANZFTA, dan RCEP; Kementerian Perindustrian sebagai *focal point* perundingan *Mutual Recognitions Agreements on Automotive Products*; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai *focal point* implementasi AMCAP; dan sebagainya. Kontribusi Kementerian Luar Negeri dalam berbagai perundingan tersebut adalah sebagai fasilitator, membantu melakukan pendekatan terhadap *counterparts* di ASEAN dan memberikan pertimbangan serta saran lebih lanjut terkait butir-butir perundingan kepada Kementerian/Lembaga bersangkutan, sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Kementerian Luar Negeri.

Di kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri telah berperan aktif dalam menjalankan prioritas politik luar negeri Indonesia 2015-2019 terutama terkait dengan peningkatan diplomasi ekonomi dan peran Indonesia di tingkat internasional.

Kawasan Amerika dan Eropa memiliki 4 (empat) negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan jumlah negara yang cukup signifikan untuk dimanfaatkan secara efektif guna mendukung kepentingan Indonesia, selain adanya keunikan dan potensi masing-masing negara di kawasan yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Capaian hubungan bilateral pada periode 2015-2019 terefleksikan dari banyaknya jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan Pejabat Tinggi, yang menunjukkan posisi strategis dan arti penting Indonesia di mata negara-negara sahabat.

Selama periode 2015-2019 telah terjadi lebih dari sepuluh kali saling kunjung tingkat kepala negara antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Amerop. Beberapa kunjungan tingkat kepala negara yang menghasilkan kesepakatan strategis di antaranya adalah kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat (AS) pada 26-28 Oktober 2015 yang menghasilkan *joint statement* bagi peningkatan kerja sama menjadi bersifat Kemitraan

Strategis RI-AS. Kunjungan ini juga menghasilkan kesepakatan perdagangan dan investasi senilai USD 20 miliar.

Melalui Kemitraan Strategis ini Pemerintah AS telah memberikan komitmen untuk kerjasama pertahanan melalui bantuan peremajaan alutsista, reformasi TNI dan peningkatan profesionalisme personel, kerjasama dalam bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa dan kerjasama dalam bidang peningkatan investasi. Sementara itu, Presiden RI juga melakukan kunjungan ke Eropa yaitu ke Rusia pada 18-20 Mei 2016 yang menghasilkan komitmen investasi senilai USD 13 miliar. Presiden RI juga melakukan kunjungan ke Jerman, Inggris, Belanda dan Belgia pada 18 - 22 April 2016 yang menghasilkan berbagai kesepakatan bisnis diantaranya dengan Inggris (senilai USD 19,02 miliar), Belanda (senilai USD 632,2 juta) dan Belgia (sepakat mendorong fasilitasi alih teknologi pada kerja sama industri pertahanan dan kerja sama promosi nilai-nilai toleransi). Pada kunjungan Presiden RI ke Turki tanggal 5-6 Juni 2017, dihasilkan *Joint Ministerial Declaration Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement* yang menjadi dasar kesepakatan pengurangan hambatan tarif dalam rangka mewujudkan komitmen perdagangan senilai US\$ 10 milyar di tahun 2023.

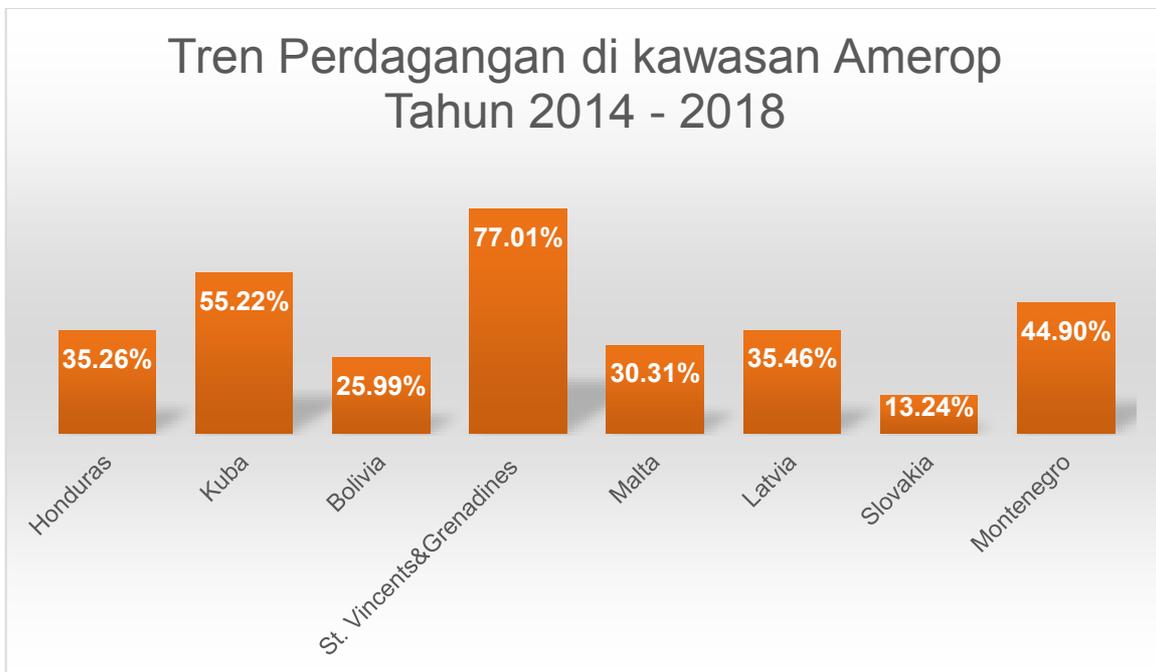
Dalam hal peningkatan kerja sama bilateral, Indonesia telah meningkatkan kerja sama menjadi bersifat Kemitraan Strategis dan Kemitraan Komprehensif dengan 6 (enam) negara di kawasan Amerika dan Eropa, yaitu Brasil, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Jerman dan Belanda serta *enhanced partnership* dengan Turki. Fokus implementasi dari kemitraan strategis diprioritaskan pada bidang perdagangan dan investasi, pengelolaan air, infrastruktur dan logistik, industri pertahanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, pertanian dan pangan, pendidikan, pariwisata, kesehatan dan transportasi. Adapun komitmen kerja sama pembangunan Jerman senilai € 158,5 juta di 3 bidang yaitu: energi, *Sustainable Economic Development/Technical and Vocational Education and Training* (TVET) dan lingkungan hidup.

Sementara itu, peningkatan hubungan bilateral di bidang Pendidikan, IT dan *creative industry* juga dilakukan dengan sejumlah negara di Kawasan Eropa Timur dan Tenggara, antara lain *engagement* dengan pusat penelitian dan pengembangan teknologi dan industri dari Rusia, Ukraina, Turki, Rumania dan Belarus di bidang industri, vokasi, *start-up/ICT* dan manufaktur guna mendukung SDM Indonesia. Indonesia dan Turki bahkan telah memasuki babak baru kerja sama di bidang keamanan dan industri pertahanan melalui *joint production medium weight tank* "Kaplan/Harimau", yang merupakan kerja sama antara PT. PINDAD Indonesia dengan salah satu perusahaan pertahanan utama FNSS Turki, dimana saat ini juga telah memulai pemasaran bersama ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Dalam memajukan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong peningkatan akses pasar bagi produk barang dan jasa, mendorong peluang investasi bagi pembangunan infrastruktur dan memperkuat kerja sama ekonomi

strategis Indonesia dengan negara-negara mitra di Kawasan Amerika dan Eropa. Salah satu hasil konkret dari diplomasi ekonomi adalah meningkatnya nilai ekspor dari Indonesia ke Kawasan Amerika dan Eropa pada rentang waktu 2015 - 2019. Peningkatan nilai ekspor tersebut mencetak surplus bagi neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra di Kawasan Amerika dan Eropa. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai total ekspor Indonesia ke negara-negara Amerop tahun 2015-2018 mencapai USD 149 miliar dengan surplus sekitar USD 45 miliar untuk Indonesia.

Diplomasi ekonomi yang dilakukan di kawasan Amerika dan Eropa telah berhasil meningkatkan ekspor secara signifikan, sebagaimana terlihat dari tren perdagangan tahun 2014 – 2018 yang meningkat, antara lain:



Untuk kawasan Amerika, telah ditandatangani *Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* pada 14 Desember 2017 di Santiago, Chile, dan berlaku sejak 10 Agustus 2019. Khusus untuk produk kayu, Indonesia telah berhasil memperluas pasar di Eropa dengan dapat menerbitkan lisensi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)* dalam kerangka *Voluntary Partnership Agreement (VPA)* RI-Uni Eropa sejak 15 November 2016. Komisi Eropa mewakili UE juga mencabut larangan terbang untuk seluruh maskapai penerbangan asal Indonesia pada 14 Juni 2018.

Capaian penting lainnya terlihat antara lain dalam hal terobosan-terobosan baru untuk membuka pasar produk Indonesia di negara-negara mitra non-tradisional di Amerika dan Eropa, yakni dengan negara-negara yang selama ini belum memiliki hubungan dagang yang mapan dengan Indonesia.

Pada tahun 2019, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan ProPN “*Indonesia – Visegrad Group Business Forum*” sebagai upaya menjawab keraguan dan tantangan untuk meningkatkan interaksi bisnis antara pengusaha Indonesia dengan negara-negara *Visegrad*. Selain itu, penyelenggaraan Proyek Prioritas Nasional (ProPN) “*Indonesia-Latin America and the Caribbean (Ina-LAC) Business Forum*” di Serpong, BSD, telah menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan dengan potensi dan kesepakatan *business deal* di bidang perdagangan senilai US\$33.417.440 serta komitmen investasi dari perusahaan multitambang yang berpusat di Brasil, Sociedade Anônima Vale (S.A Vale), sebesar US\$ 5 miliar untuk lima tahun ke depan. Untuk selanjutnya, Kementerian Luar Negeri akan secara berkesinambungan menyelenggarakan “*Indonesia-Latin America and the Caribbean (Ina-LAC) Business Forum*” setiap tahunnya. Berbagai hal lain yang dicapai melalui kegiatan ProPN ini adalah pengarusutamaan gender dan penguatan ekonomi pengusaha, termasuk pengusaha perempuan dengan memperluas jaringan antara organisasi perempuan yang terkait dengan perdagangan internasional.

Untuk memotivasi upaya para pengusaha Indonesia menembus negara-negara non-tradisional di Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri telah melakukan penggalangan pengusaha Indonesia antara lain melalui acara temu bisnis di beberapa kota di Indonesia, seperti di Aceh, Medan, Lampung, Yogyakarta, Jember, Makasar, dan Maluku. Salah satu terobosan dalam memperluas pasar ke kawasan non-tradisional adalah seperti kawasan Balkan bagi pelaku bisnis Indonesia guna meraih *business deal* seperti yang pernah dicapai perusahaan ban Indonesia (Multistrada) pada tahun 2017 dengan potensi kesepakatan sebesar USD 15 juta per tahun.

Kementerian Luar Negeri, termasuk Perwakilan RI Kawasan Amerika dan Eropa, telah memberi dukungan pada *Trade Expo Indonesia* (TEI) pada 24 – 28 Oktober 2018 yang menghasilkan kontrak dagang USD 8,45 miliar atau naik lima kali lipat dari perolehan tahun 2017 sebesar USD 1,4 miliar. Kerja sama yang dilakukan untuk menggalang *buyer* dan *investor* dari kawasan Amerika dan Eropa telah menghasilkan transaksi antara lain: Promosi Terpadu Bidang Perikanan sebesar USD 128,5 juta, *Indonesia – Eastern Europe Business Meeting* sebesar USD 3,2 juta; *Indonesia – Bulgaria Business Meeting* sebesar USD 18,7 juta; dan *the III Global Fishery and Seafood Expo* pada 10-12 Juli 2019 sebesar USD 9,2 juta. Keberhasilan penyelenggaraan promosi terpadu bidang perikanan, IEEBM, dan IBBM dan *Global Fishery and Seafood Expo*, merupakan sinergi Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dan Perwakilan RI dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) RI dan asosiasi bisnis dan pengusaha di negara mitra, antara lain *Bulgarian Chamber of Commerce and Industry*.

Selama periode 2015-2019, telah terlaksana 17 kegiatan saling kunjung tingkat Kepala Negara/Pemerintahan antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah. Dalam hal peningkatan kerja sama bilateral, Indonesia telah meningkatkan kerja

sama menjadi bersifat Kemitraan Strategis Komprehensif dengan 1 negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah, yaitu India.

Dalam memajukan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi dengan negara-negara mitra di Kawasan Asia Selatan dan Tengah. Beberapa hasil konkretnya adalah meningkatnya nilai perdagangan bilateral dan ekspor dari Indonesia ke Kawasan Asia Selatan dan Tengah (2015-2019), yang sekaligus menyumbang surplus perdagangan bagi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, nilai perdagangan bilateral RI dengan negara-negara Asia Selatan dan Tengah secara keseluruhan naik 6,3% dari USD 20,12 milyar (2015) menjadi USD 21,4 milyar (2019) dan ekspor RI ke kawasan naik 7% dari USD 15,7 milyar (2015) menjadi USD 16,4 milyar (2019). Dari kinerja perdagangan dengan hampir seluruh negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah, Indonesia mendapatkan surplus perdagangan sebesar USD 11,4 milyar (2019), atau naik 0,7% dari tahun 2015.

Untuk memfasilitasi terbukanya peluang kerja sama bagi para pengusaha Indonesia dan pebisnis di kawasan Asia Selatan dan Tengah, Kementerian Luar Negeri telah melakukan penggalangan ke kalangan dunia usaha, antara lain melalui acara temu bisnis di beberapa kota di Indonesia, seperti di Aceh, Jakarta, dan Tangerang Selatan. Berbagai pemangku kepentingan terkait turut dilibatkan dalam upaya dimaksud sebagai pemain utama dalam kerja sama bisnis yang terjalin antara Indonesia dan negara-negara di Kawasan Asia Selatan dan Tengah, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, Pemerintah Daerah, misal Pemprov Aceh (Pemerintah); asosiasi-asosiasi usaha sawit nasional, perusahaan-perusahaan farmasi nasional, perusahaan makanan (Garuda Food, Mayora, Nabati), PT INKA, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan lain sebagainya (BUMN/Swasta). Dalam upaya ini, Kementerian Luar Negeri berperan penting dalam mendorong terciptanya kesepakatan kerja sama, memastikan kesepakatan-kesepakatan kerja sama bisnis yang telah tercapai ditindaklanjuti dengan baik, dan memfasilitasi terselesaikannya berbagai isu yang menjadi kendala atau hambatan dalam penguatan diplomasi ekonomi Indonesia.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri terus berupaya untuk melindungi kepentingan strategis produk kelapa sawit Indonesia yang menjadi target kampanye negatif di beberapa negara. Untuk mengatasi tantangan ini, pada tahun 2019 telah dilaksanakan ProPN “Diplomasi Ekonomi Menuju Pengakuan *Indonesia Sustainable Palm Oil* (ISPO) di Uni Eropa.” ProPN ISPO dilakukan dengan kegiatan *outreach* dan sosialisasi ISPO kepada para pemangku kepentingan Indonesia dan Uni Eropa serta pertemuan pembahasan kerja sama riset RI dengan institusi di Uni Eropa terkait ISPO. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Universitas Jambi (UNJA) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melaksanakan *Executive Oil Palm Program* bagi para Duta Besar negara anggota Uni Eropa untuk Indonesia dan *Regular Oil Palm Course (ROPC)* bagi warga Eropa

di Bogor dan Jambi. Untuk menghadapi kampanye negatif sawit, Kemenlu bersama para peneliti sawit dari dalam dan luar negeri secara konsisten melakukan diseminasi di negara-negara Uni Eropa mengenai hasil penelitian kelapa sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

Di Kawasan Asia Selatan dan Tengah, di mana terdapat 3 dari 10 negara tujuan utama ekspor sawit Indonesia ke dunia, yakni India, Pakistan, dan Bangladesh, Indonesia juga berhadapan dengan isu hambatan tarif dan menguatnya persepsi negatif terhadap minyak kelapa sawit, khususnya dari aspek kesehatan. Dalam menghadapi isu ini, Kementerian Luar Negeri membantu menggalang para pemangku kepentingan sawit nasional untuk mempromosikan dan melakukan kampanye positif sawit Indonesia khususnya di India dan Pakistan melalui pertemuan antarpejabat pemerintah, penyelenggaraan temu/forum bisnis, partisipasi pada pameran/konferensi, dan pencapaian kesepakatan kerja sama, di antaranya: (1) pertemuan tingkat Kepala Negara/Pemerintah, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan; (2) kesepakatan antara asosiasi usaha sawit Indonesia-India dan organisasi masyarakat sipil Solidaridad (2018) untuk mempromosikan ISPO dan IPOS (*India National Palm Oil Sustainability Framework*) secara bersama-sama; (3) pembentukan *Indonesia-Pakistan Joint Palm Oil Committee* (IP-JOC) (2017) yang merupakan wadah para pemangku kepentingan untuk bertemu dan membahas hal-hal terkait peningkatan kerja sama minyak sawit antar kedua negara; dan (4) *familiarization trip* jurnalis India ke lokasi usaha dan pabrik pengelolaan produk sawit Indonesia di Sumatera Utara (2019).

### Diplomasi Sosial Budaya

Kementerian Luar Negeri secara terus menerus memperjuangkan perlindungan terhadap kekayaan budaya nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada forum UNESCO. Melalui diplomasi Indonesia pada forum UNESCO, sejumlah cagar budaya dan alam telah mendapatkan pengakuan internasional yaitu penetapan Cagar Biosfer Togean Tojo Una-Una di Sulawesi Tengah dan Cagar Biosfer Saleh-Moyo-Tambora (Samota) di Nusa Tenggara sebagai Cagar Biosfer dunia oleh UNESCO (*UNESCO World of Biosphere Reserves*) pada 2019. Ditambah lagi dengan penetapan *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* sebagai salah satu situs Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO.

Kementerian Luar Negeri juga berupaya untuk melindungi kekayaan budaya Indonesia khususnya benda budaya yang diselundupkan ke luar negeri. Keberhasilan upaya perlindungan benda budaya yang telah dilakukan antara lain adalah pengembalian artefak tengkorak suku asmat yang diselundupkan ke Australia, pengembalian keris Pangeran Diponegoro yang tersimpan di Belanda, dan 1500 (seribu lima ratus) benda budaya Indonesia yang terdapat di Belanda.

Di bidang sosial dan budaya ASEAN, Indonesia melalui badan sektoral ASEAN di bidang Ketenagakerjaan (SLOM dan ALMM) senantiasa memperjuangkan pemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran yang bersifat non-diskriminatif dan menyeluruh,

termasuk untuk pekerja migran non-prosedural sesuai amanat konsitusi RI. Indonesia juga terus mengusulkan dan melaksanakan proyek-proyek baru guna memperkuat perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya sebagai implementasi *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-31. Indonesia, yang menjadi Ketua ALMM periode 2020-2022 juga akan lebih memainkan peran penting dalam proses pemajuan dan perlindungan pekerja migran, terutama dalam implementasi *ASEAN Consensus* yang secara khusus menekankan pentingnya (i) *Education/Information*; (ii) *Protection*; (iii) *Enforcement*; (iv) *Recourse*; dan (v) *Reintegration*.

Indonesia juga terus berupaya untuk mendorong pembentukan *ASEAN Coordination Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC)* dengan menghasilkan *time frame* terkait pembahasan *draft Agreement on the Establishment of ACCTHPC* dan *zero draft Host Country Agreement between the ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control and the Government of the Republic of Indonesia on Privileges and Immunities*.

Inisiatif Indonesia sebagai ketua pada *ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)* tahun 2018-2020 telah menghasilkan *draft The Narrative of ASEAN Identity* sebagai cara untuk meningkatkan rasa kepemilikan ASEAN di masyarakat, yang rencananya akan diajukan untuk diadopsi oleh para pemimpin negara ASEAN pada tahun 2020. Indonesia juga turut melibatkan pemuda dalam membumikan ASEAN di masyarakat melalui berbagai upaya dalam rangka merangkul pemuda sebagai *future leaders*, antara lain, Pemilihan Duta Muda ASEAN – Indonesia dan menciptakan sebuah *network* antar pemuda di ASEAN.



**Sumber: Website Setnas ASEAN**

<http://setnas-asean.id/gallery-photos/read/malam-final-pemilihan-duta-muda-asean-indonesia-2019>

Semasa keketuaan Indonesia pada *ASEAN Senior Officials' Responsible for Culture and Arts/ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (SOMCA/AMCA)* periode 2018-2020, Kemenlu selalu aktif mendukung peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SOMCA

*Focal Point* Indonesia) sebagai Ketua SOMCA. Kemenlu turut membantu menyumbangkan ide tema keketuaan Indonesia, merumuskan Deklarasi yang menjadi *outcome document* keketuaan Indonesia, membantu pelaksanaan Pertemuan SOMCA/AMCA di Indonesia baik dari segi teknis maupun substansi, membantu memastikan proyek-proyek Indonesia di ASEAN terlaksana, membantu koordinasi dengan Sekretariat ASEAN dan negara ASEAN lainnya, dll. Khusus terkait draft *The Narrative of ASEAN Identity (NAI)*, Kemenlu mengadakan FGD dengan para narasumber (akademisi, budayawan, dll) yang direkomendasikan oleh Kemdikbud untuk merumuskan *zero draft* NAI, membantu mengkoordinasikan sirkulasi dokumen kepada Sekretariat ASEAN untuk mendapatkan masukan dari seluruh Badan Sektoral ASEAN, mengkonsolidasikan seluruh masukan terhadap NAI, mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan Simposium terkait *ASEAN Identity* bersama Sekretariat ASEAN dengan pendanaan ROK, serta memastikan agar dokumen tersebut dapat diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-38 bulan April 2021. Setelah diadopsi, dokumen tersebut akan dimanfaatkan sebagai rujukan dalam menyusun *outcome documents*, diskursus dan berbagai kegiatan terkait *ASEAN Identity*.

Terkait pelaksanaan Pemilihan Duta Muda ASEAN Indonesia (DMAI), acara ini merupakan acara dua tahunan yang sejak awal merupakan inisiatif dan komitmen Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan *awareness* terhadap ASEAN di kalangan pemuda, membumikan ASEAN di daerah asal masing-masing serta menjadi wakil pemuda Indonesia pada kegiatan-kegiatan ASEAN. Alumni DMAI juga dapat dimanfaatkan oleh seluruh K/L di bawah 3 Pilar ASEAN untuk mendiseminasikan informasi sesuai badan sektoral terkait di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan arahan Menlu RI saat *AMM Retreat* 2019, yaitu untuk menciptakan *Network of ASEAN Youth Ambassadors*, Indonesia saat ini menjadi *leading country* dengan memasukkan program pemilihan duta muda ke dalam *ASEAN Work Plan on Youth*. Diharapkan pada tahun 2023, *network* tersebut telah tercipta dan melibatkan seluruh duta muda ASEAN di berbagai negara anggota ASEAN. Adapun seluruh proses perencanaan, seleksi dan pelaksanaan DMAI dilaksanakan oleh Kemenlu.

Indonesia juga terlibat aktif dalam penyelesaian isu penanggulangan bencana, pendidikan, kebudayaan dan seni, informasi, kepemudaan, isu perempuan dan anak, olahraga, ketenagakerjaan, kesehatan, pembangunan perdesaan dan pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam hal ini Kemenlu mendorong peran aktif dan mendukung Kementerian/Lembaga yang menjadi *focal point* di badan sektoral ASEAN, Pemerintah Daerah maupun Pusat Studi ASEAN di seluruh Indonesia. Kemenlu juga merumuskan dan memperjuangkan inisiatif-inisiatif yang menjadi kepentingan nasional, serta mendorong dan melaksanakan tindak lanjut/implementasi kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

### Pelindungan WNI dan BHI

Melindungi WNI merupakan amanat konstitusi yang harus ditunaikan dengan baik. Secara garis besar, upaya peningkatan pelindungan dilaksanakan melalui: perubahan *corporate culture* para diplomat Indonesia untuk memberikan pelindungan secara optimal; pembangunan sistem pelindungan termasuk melalui inovasi teknologi dimana sesuai instruksi Presiden, Portal Peduli WNI telah diterapkan di seluruh Perwakilan RI mulai Januari 2019; penguatan instrumen pelindungan pada semua tingkatan; dan mendorong pembahasan isu pelindungan dan migrasi pada tataran kawasan dan internasional.

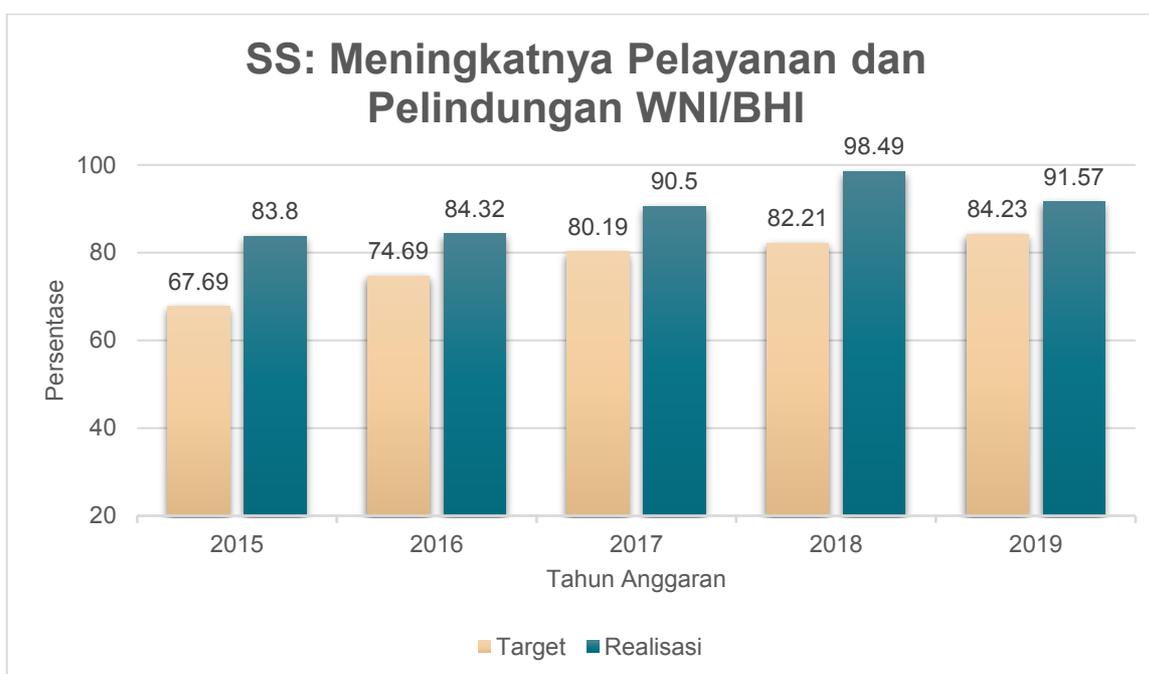
Sesuai Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri yaitu: Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri, dalam periode tahun 2017 – 2018 terdapat penambahan indikator kinerja yang semula: Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI menjadi Indeks Kepuasan Pelayanan Pelindungan WNI dan Indeks Pelayanan Pelindungan WNI/BHI, dengan matriks sebagai berikut :

Periode 2015 - 2016		Periode 2017 - 2019	
Sasaran Strategis	IKU	Sasaran Strategis	IKU/Sub IKU
Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI di Luar Negeri serta Pemberdayaan Diaspora	Indeks Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Terpenuhinya Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI</b>
	Indeks Penguatan Diplomasi Pelindungan	Meningkatnya Pelayanan dan pelindungan WNI dan BHI	<b>Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI dan BHI</b>
	Indeks Penyelesaian Kasus WNI/BHI di Luar Negeri		<i>Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri</i>
			<i>Indeks Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri</i>
		<i>Indeks Diplomasi Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri</i>	

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI bertujuan untuk mengukur tingkat kualitas kepuasan pelayanan pelindungan yang dirasakan manfaatnya oleh pemangku kepentingan dan WNI di luar negeri. Sedangkan Indeks Pelayanan dan Pelindungan

WNI/BHI dimaksudkan untuk mengukur seberapa tinggi aspek pelayanan dan perlindungan WNI/BHI yang telah diselenggarakan.

Berdasarkan indeksasi tersebut, tercermin peningkatan capaian selama periode 2015 – 2019 sebagai berikut:



Peningkatan capaian tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perkembangan sistem dan penguatan kelembagaan pelayanan dan perlindungan seperti pembangunan sistem dan teknologi informasi pelayanan dan perlindungan melalui Portal Peduli WNI dan *Safe Travel*. Kedua aplikasi tersebut mendukung sistem pendataan dan monitoring, yang pada gilirannya memudahkan Kementerian dan Perwakilan RI dalam melakukan penanganan kasus-kasus WNI di luar negeri.

Lebih jauh peningkatan realisasi juga didorong dengan adanya penguatan kelembagaan berupa penerbitan instrumen hukum, *standard operating procedure* serta kerja sama antar pemangku kepentingan. Penguatan kelembagaan tersebut secara langsung meningkatkan modal dalam penanganan isu-isu perlindungan WNI di luar negeri.

Di saat yang sama, sepanjang lima tahun terakhir terdapat peningkatan beban kerja di bidang pelayanan perlindungan, perkembangan isu-isu sosial, dan ragam kasus yang ditangani. Kondisi ini juga diwarnai dengan adanya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan dan perlindungan yang lebih responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, masyarakat merupakan pengguna layanan sekaligus penilai atas kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, dalam memberikan pelayanan dan perlindungan.

Secara umum, selama periode 2015 – 2019, terdapat beberapa capaian kinerja Kemenlu yang dapat menunjang pencapaian nawacita, antara lain:

### Indeks Penyelesaian Kasus WNI/BHI di Luar Negeri

Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri merupakan indeks yang mengukur tingkat capaian penanganan WNI dan BHI di luar negeri yang tepat, tuntas, transparan dan terukur. Dalam hal ini, perlu ditetapkan sistem dan mekanisme terkait penanganan kasus WNI/BHI yang cepat dan komprehensif sesuai asas transparansi, norma hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Capaian realisasi kinerja Indeks Penyelesaian Kasus WNI/BHI di luar negeri, sbb:

1. Penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri, terutama pembebasan WNI yang terancam hukuman mati. Selama lima tahun terakhir, Kemenlu dan Perwakilan RI telah menyelesaikan 73.503 kasus; dimana sebanyak 297 WNI telah diselamatkan dari hukuman mati.
2. Pemberian fasilitas bantuan hukum bagi WNI bermasalah di luar negeri.
3. Pemberian fasilitas pemulangan WNI diantaranya Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah, WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di luar negeri, dan anak-anak tidak berdokumen di luar negeri. Sebanyak 181.942 WNI/TKI bermasalah (termasuk *overstayers*) telah direpatriasi.
4. Evakuasi 16.432 WNI dari daerah perang, konflik politik dan bencana alam di seluruh dunia.
5. Pengembalian hak-hak finansial WNI berupa sisa gaji, uang diyat, dan asuransi senilai Rp. 574 milyar.
6. Pembebasan 43 orang WNI yang disandera di perairan Filipina Selatan.

### Indeks Kelembagaan Pelindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Indeks Sistem Kelembagaan Pelindungan WNI dan BHI merupakan indeks yang mengukur tingkat capaian kriteria dasar kelembagaan pelindungan WNI dan BHI di luar negeri. Dalam hal ini, parameter yang digunakan adalah Kapasitas SDM, Instrumen Hukum Pelindungan, Pemutakhiran Data WNI dan Penerapan Prosedur Hukum dan Panduan Teknis di bidang Pelindungan WNI dan BHI.

Capaian realisasi kinerja Indeks Kelembagaan Pelindungan WNI/BHI di Luar Negeri, sebagai berikut :

#### 1. Kapasitas SDM

Dalam rangka peningkatan *corporate culture*, telah diselenggarakan pelatihan bimbingan teknis kepada pegawai terkait pelatihan penanganan permasalahan WNI di luar negeri bagi staf Fungsi Konsuler Perwakilan RI, sedangkan bagi pejabat dan staf pelaksana di

Direktorat Pelindungan WNI dan BHI telah diselenggarakan kegiatan Pelatihan Pelayanan Publik dan Manajemen Stress. Modul pelatihan ditujukan guna meningkatkan kapasitas pelayan publik yang profesional, akuntabel serta mampu mengelola emosi dan pikiran dalam memberikan pelayanan. Mesin pelindungan juga akan bekerja lebih besar terutama untuk kelompok – kelompok rentan misalnya perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

### 2. Instrumen Hukum Pelindungan WNI

Penandatanganan Permenlu Nomor 05 tahun 2018 tentang Pelindungan WNI sebagai revisi atas Permenlu 04 tahun 2008. Dalam hal dilakukan revisi Permenlu dengan mempertimbangkan: (i) Kompleksitas dan peningkatan varian kasus yang ditangani (misalnya: penyanderaan, bencana alam dan konflik politik di luar negeri), (ii) Memperluas lingkup obyek pelindungan, bukan terbatas pada TKI namun seluruh WNI di luar negeri, (iii) Meningkatkan partisipasi aktif lembaga/badan terkait dan elemen masyarakat dalam upaya pelindungan WNI di luar negeri, (iv) Penguatan aspek hukum dan standarisasi bagi pelaksana tugas dan fungsi konsuler di seluruh perwakilan RI di luar negeri.

### 3. Pemutakhiran Data WNI

Pemutakhiran data WNI dilakukan melalui implementasi Sistem Pelayanan dan Pelindungan WNI di Perwakilan RI di luar negeri berbasis aplikasi Portal Peduli WNI. Portal Peduli WNI adalah *platform* tunggal pelayanan dan pelindungan WNI dalam rangka pembangunan database WNI di luar negeri yang lebih kredibel sehingga untuk pertama kalinya terdapat sistem pelayanan yang seragam di seluruh Perwakilan RI di luar negeri. Melalui sinergi dan integrasi sistem antar kementerian dan lembaga, Portal Peduli WNI menjadi etalase *Indonesia Incorporated* dalam pelindungan WNI di luar negeri.

Dalam hal ini, 92 Perwakilan RI telah menerapkan implementasi seluruh fitur Portal Peduli melalui kegiatan bimbingan teknis kepada pejabat dan staf perwakilan RI dan sebanyak 126 Perwakilan RI telah mengaplikasikan fitur Lapor Diri melalui Portal. Kegiatan pelatihan dan bimtek tersebut akan masih tetap berlanjut, khususnya bagi pejabat dan staf perwakilan yang belum mengikuti pelatihan dimaksud.

Pendataan juga dilakukan terhadap WNI yang bepergian ke luar negeri untuk jangka waktu maksimal enam bulan melalui aplikasi *Safe Travel*. *Safe Travel* adalah aplikasi berbasis *mobile* yang dapat digunakan oleh WNI untuk lapor diri, menghubungi Perwakilan RI dalam situasi krisis dan mendapatkan informasi mengenai kondisi keamanan, aturan keimigrasian, fasilitas kesehatan, serta informasi penting lainnya terkait negara tujuan. Pembangunan aplikasi *Safe Travel* merupakan salah satu strategi preventif Kementerian Luar Negeri dalam menekan jumlah permasalahan WNI selama berada di luar negeri.

Selain itu juga terdapat ‘*Welcoming SMS Blast*’ yang memberikan informasi nomor telepon Perwakilan RI di luar negeri dimana WNI berada.

#### 4. Panduan Teknis di Bidang Pelindungan WNI dan BHI

Untuk menstandarisasi kualitas layanan dan pelindungan, Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan 71 SOP teknis terkait pelindungan WNI/BHI. Pengakuan atas standar pelayanan masyarakat tersebut tercermin dari diperolehnya sertifikasi ISO 9001: 2015 di bidang Pelayanan dan Pelindungan WNI/BHI di luar negeri. Kemenlu juga membangun wilayah Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

#### Indeks Diplomasi Pelindungan WNI/BHI di Luar Negeri

Indeks Diplomasi Pelindungan WNI/BHI merupakan indeks yang mengukur tingkat capaian koordinasi dan negosiasi di bidang pelindungan WNI dan BHI di luar negeri baik pada konteks nasional maupun internasional.

Capaian realisasi kinerja Indeks Diplomasi Pelindungan WNI/BHI di luar negeri, sebagai berikut:

##### 1. Kerja Sama internasional

Di tengah tantangan dari beberapa negara, Indonesia justru menjadi salah satu sponsor dan wakil Presiden pertemuan *Intergovernmental Conference to Adopt The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* di Marrakesh, 10 -11 Desember 2018. Indonesia juga menjadi pihak pendorong utama disahkannya *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Right of Migrant Workers*.

Pada level yang lebih luas yaitu melalui *Bali Process*, upaya untuk menangani korban TPPO dikuatkan. Bersama dengan Australia, satu inisiatif baru adalah melibatkan kalangan swasta untuk pencegahan dan penanganan TPPO.

Di bidang kerjasama bilateral, salah satu capaian ialah penandatanganan *Memorandum of Understanding* antara RI - PEA di bidang penanganan dan pelindungan korban TPPO pada tahun 2016.

##### 2. Kerja Sama nasional

- a. Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dengan BPJS Ketenagakerjaan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018.
- b. Pengesahan UU no. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- c. Nota Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Nasional penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia tentang Pelayanan dan Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada tahun 2017.

- d. MoU 7 Kementerian/Lembaga di bidang pencegahan dan penanganan WNI yang terindikasi atau korban TPPO di luar negeri pada tahun 2016.

### 3. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan antara lain dengan penyelenggaraan Kampanye Penyadaran Publik melalui media cetak/elektronik di beberapa daerah di Indonesia sebagai bagian dari upaya preventif, deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat terutama di kantong TKI. Pemberdayaan tersebut bertujuan untuk menggalang dukungan masyarakat dalam upaya-upaya perlindungan WNI di luar negeri, termasuk mendorong terwujudnya proses migrasi aman.

### Pemajuan Demokrasi dan HAM

Dalam hal mempromosikan aset-aset diplomasi publik seperti demokrasi dan dialog antar agama, khususnya di kawasan Asia Pasifik masih diwarnai oleh isu hak minoritas, ketidakseimbangan regional, pemberontakan etnik, pengelolaan keragaman, ketegangan dan ketidakamanan di perbatasan oleh kaum radikal dan ekstremis, serta konflik di kalangan elit/kelompok politik. Di dalam negeri, tantangannya berupa terjadinya aksi-aksi terorisme dan makin menguatnya sentimen keagamaan serta makin maraknya berita bohong (*hoax*) yang beredar di masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia menjadi inisiator penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* (BDF) guna membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi di berbagai negara dan kawasan melalui praktik *sharing of experiences and best practices* dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian dan menghargai.

Selama kurun waktu 2015-2019, telah diselenggarakan BDF sebanyak 5 (lima) kali dan dihadiri oleh Kepala Negara, Menteri, Wakil Menteri, dan Duta Besar/Kepala Perwakilan negara-negara sahabat di wilayah Asia Pasifik. Tingginya tingkat kehadiran negara peserta Kawasan Asia Pasifik, negara peninjau (non-Kawasan Asia Pasifik) dan Organisasi Internasional dalam kurun waktu selama 5 tahun pelaksanaan BDF menunjukkan forum ini telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis di kawasan Asia Pasifik, termasuk berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi.

Sejak tahun 2017, BDF telah melibatkan unsur mahasiswa melalui penyelenggaraan *Bali Democracy Students Conference* (BDSC) mengingat generasi muda dan pendidikan merupakan dua variabel yang tidak terpisahkan dalam menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat, serta berkontribusi dalam mencapai demokrasi yang inklusif dan menyejahterakan rakyat. Sejak tahun 2018, BDF juga telah melibatkan unsur media dan masyarakat madani melalui penyelenggaraan *Bali Civil Society and Media Forum* (BCSMF) yang menekankan pentingnya mekanisme untuk saling belajar dan bertukar pengalaman guna mengatasi tantangan yang dihadapi oleh demokrasi. Pada tahun 2019, pilar pendukung

BDF semakin inklusif dengan mengikutsertakan pelaku bisnis dan komunitas pengusaha sebagai sektor privat terlibat dialog dalam Panel Ekonomi yang membahas pengembangan demokrasi dari sudut pandang kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

BDF telah mendukung pembangunan demokrasi baik di kawasan Asia Pasifik maupun kawasan lainnya melalui implementasi program kerja sama teknis oleh Pemerintah Indonesia, seperti program peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang dilaksanakan di berbagai negara di Kawasan Asia Pasifik, Afrika Utara, Timur Tengah dan Eropa. Keberhasilan BDF dalam mempromosikan nilai-nilai dan praktek demokrasi mendapatkan pengakuan internasional dengan diselenggarakannya pertemuan BDF *Chapter* Tunis pada tahun 2017 dan *Chapter* Berlin pada tahun 2018.



Sumber: Website Kementerian Luar Negeri

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/879/view/dorong-perwujudan-demokrasi-inklusif-indonesia-sukses-gelar-bdf-ke-12>

### Peningkatan Citra Indonesia

Peningkatan citra Indonesia di mata publik domestik dan internasional dilakukan melalui serangkaian komunikasi efektif atas perkembangan-perkembangan dan pelaksanaan politik luar negeri kepada publik di dalam negeri dan luar negeri, menyerap masukan dan aspirasi publik di dalam negeri dan luar negeri, mempromosikan citra Indonesia di luar negeri dan aktif menggalang koordinasi dengan kalangan pemangku kepentingan.

Beberapa sarana komunikasi tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan di antaranya *Indonesian Arts and Cultural Scholarship* (Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia-BSBI) dan *Indonesia Channel*; Promosi Generasi Muda Berprestasi melalui *Outstanding Students for The World*; Promosi dan *Community Outreach* Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA);

*Interfaith Dialogue*; Promosi Potensi Ekonomi Indonesia di Luar Negeri; Promosi Pembangunan Indonesia kepada Pemerhati Indonesia melalui *Friends of Indonesia (FOI)*; *Dialogue for Peace and Democracy*; *Public Diplomacy Campaign*; *Diplomatic Gathering*; *Bilateral Inter-Media Dialogue*; *Working Group on Democracy Civil Society*; Sosialisasi dan Diseminasi Informasi Diplomasi Publik; Sosialisasi Isu-Isu Aktual dan Strategis; Penerbitan Tabloid Diplomasi; *Public Lecture*; dan Promosi Potensi Daerah melalui *Update from the Region*.

Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) bertujuan meningkatkan hubungan dengan negara sahabat melalui *people-to-people contact* dan pemanfaatan keragaman seni budaya sebagai salah satu aset *soft power diplomacy* dalam upaya promosi dan pelestarian seni dan budaya Indonesia sekaligus promosi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, toleran dan harmonis.

Sampai dengan tahun 2019 jumlah peserta BSBI mencapai 920 peserta dari 77 negara. Para alumni BSBI telah berkiprah turut mempromosikan budaya Indonesia di negara asalnya masing-masing seperti mendirikan komunitas Pemuda Indonesia-Belanda (*Indonesia-Netherlands Youth Society*), padepokan Pencak Silat di Austria, pusat kebudayaan Indo-Benin Banyuwangi, aktif mengajar tari di berbagai universitas di Thailand, menulis novel tentang Indonesia, serta membuat film dokumenter mengenai Tari Pakarena dari Makassar dan sebagainya.

Indonesia telah lama turut mempromosikan toleransi dan perdamaian dunia melalui Dialog Lintas Agama (DLA) dengan memanfaatkan aset diplomasi publik Indonesia, yaitu masyarakat yang pluralis dan toleran, serta Islam yang moderat. DLA diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan internasional seperti masalah ekstrimisme, radikalisme dan terorisme yang berbasis agama dengan melibatkan pemangku kepentingan seperti tokoh agama, masyarakat madani dan media. Forum DLA diharapkan tidak semata-mata menjadi ajang dialog, tetapi hasil-hasilnya juga dapat diimplementasikan ke seluruh tingkatan di berbagai kalangan termasuk generasi muda.

Pada tataran bilateral, sejak 2004 Indonesia telah bermitra dengan 34 negara sahabat dan berkomitmen untuk terus mengembangkan kerja sama tersebut dengan banyak negara lainnya. Di tataran regional dan inter-regional, Indonesia aktif menjadi *co-sponsor* dalam berbagai kerja sama DLA seperti *Asia Pacific Regional Interfaith Dialogue (RID)*, *ASEM Interfaith Dialogue* dan *MIKTA Interfaith Dialogue*. Pada tingkat multilateral, Indonesia berpartisipasi aktif pada *the UNAOC Global Forum* dan *Interfaith Conference of Czech and OIC Countries*.

Selain aktif dalam penyelenggaraan DLA pada tingkat bilateral, Indonesia juga menginisiasi *Intrafaith Dialogue* yaitu *High Level Consultation of World Muslim Scholars on Islam Wassatiyah* dan *the Trilateral Ulema Conference of Indonesia, Afghanistan and Pakistan*.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan kedua kegiatan tersebut atas capaian Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim moderat.

Dalam hal peningkatan citra di bidang ekonomi, Kemenlu menyelenggarakan kegiatan *Updates from the Region* (UFTR) dan *Diplomatic Tour* (DT), untuk memperkenalkan potensi perdagangan, pariwisata dan investasi daerah kepada konstituen internasional. Kegiatan UFTR dan DT dilaksanakan dengan mengusung konsep “*seeing is believing*”, sehingga konstituen diplomasi publik tersebut diharapkan dapat melihat langsung potensi ekonomi yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Dalam rangka peningkatan dukungan konstituen domestik terhadap diplomasi kemanusiaan Indonesia, Kemenlu telah menyelenggarakan kegiatan *Indonesian Solidarity Week for Palestine* pada tahun 2018 melalui peresmian *Palestine Walk: Road to Freedom* oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri Palestina, dan Wali Kota Bandung. Selain itu, telah dilaksanakan pula Kuliah Umum oleh Menteri Luar Negeri Palestina, Riad al Malki untuk meningkatkan pemahaman serta solidaritas masyarakat akan isu Palestina di kalangan generasi muda.

Di bidang pelayanan publik, Kemenlu mendapatkan penghargaan **Top 99 dan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2018** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas inovasi yang dilakukan oleh Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) yang melibatkan komunitas dan relawan Sahabat Museum KAA. Salah satu upaya MKAA dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi pengunjung adalah memberlakukan sistem reservasi *online* sejak tahun 2017.

Program *Outstanding Youth for the World* (OYTW) bertujuan agar generasi muda Indonesia berprestasi berperan dalam mendukung kegiatan promosi dan peningkatan citra Indonesia di luar negeri. Selama tahun 2015-2019, OYTW telah dilaksanakan di Hong Kong, India, Australia, dan Amerika yang melibatkan pemuda berprestasi, para santri, dan pemuda-pemudi dari berbagai agama. Keterlibatan pemuda dalam upaya penanaman pendidikan multikultural merupakan aset diplomasi publik Indonesia yang perlu terus ditumbuhkembangkan.

Salah satu terobosan yang dilakukan guna mengikutsertakan dan mendorong partisipasi generasi milenial dalam pelaksanaan politik luar negeri adalah dengan menyelenggarakan *Diplomacy Festival* (#DiploFest). Kegiatan #DiploFest berupa diseminasi berbagai capaian diplomasi Indonesia periode 2014 – 2018 yang mencakup isu Kedaulatan NKRI, Diplomasi Ekonomi, Peran Indonesia di Fora Internasional serta Pelindungan WNI dan BHI. Dengan adanya kegiatan #DiploFest, generasi ini diharapkan tidak saja turut berperan aktif dalam mendukung diplomasi serta membangun citra positif Indonesia di mata dunia, namun juga berperan dalam meluruskan ujaran kebencian dan berita bohong (*hoax*). Pada tahun 2018-2019, kegiatan #DiploFest dilaksanakan di 6 (enam) kota yaitu Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Padang, Makassar, dan Semarang.



**Sumber: Website Kementerian Luar Negeri**

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/560/view/semarang-pecahkan-rekor-diplofest-kobarkan-semangat-diplomasi>

### **Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular**

Dalam lingkup kerja sama teknik, pada periode 2015-2019, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan dan mengoordinasikan berbagai program peningkatan kapasitas sesuai dengan prioritas dan kepentingan nasional. Selama periode tersebut telah diselenggarakan 275 program/kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh tidak kurang dari 4.450 orang peserta yang berasal dari 96 negara Afrika, Timur Tengah, Asia dan Pasifik, Amerika Selatan dan Karibia serta Eropa.

Pelaksanaan program/kegiatan tersebut dilakukan secara bilateral maupun trilateral dengan negara lain atau mitra pembangunan internasional. Antara tahun 2015-2018, Pemri telah melaksanakan 107 program/kegiatan triangular bersama JICA, GIZ, NAM CSSTC, USAID, UNFPA dan Norwegia/UNDP. Secara bilateral, pada tahun 2018 Indonesia telah menandatangani perjanjian kerja sama teknik dengan Brazil.

Pada tahun 2017, kepemimpinan Tim Kornas KSS Indonesia beralih dari Bappenas ke Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Kerja Sama Teknik. Hal ini menunjukkan kepercayaan nasional kepada Kemenlu untuk menjadi penjuror pelaksanaan KSS Indonesia. Kemenlu juga berperan aktif dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 57 tahun 2019 yang menjadi dasar hukum bagi pemberian hibah Pemri ke luar negeri. Sebagai mandat dari PP tersebut telah disusun dua Peraturan Menteri Luar Negeri yaitu Permenlu No.11 tahun 2019 yang mengatur kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah dan lembaga asing, serta Permenlu No.12 tahun 2019 yang mengatur tata cara penilaian usulan hibah kepada pemerintah dan lembaga asing.

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Pemri telah meluncurkan secara resmi Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI), atau juga disebut *Indonesian Agency for International Development* (Indonesian AID) sebagai momen penting perwujudan “diplomasi tangan di atas”. LDKPI adalah bukti komitmen Indonesia dalam penguatan kerja sama global dan regional. Melalui LDKPI, pelaksanaan pengelolaan dana bantuan hibah Indonesia kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing akan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum internasional untuk menyampaikan capaian dan target KSS Indonesia serta kemampuan Indonesia untuk memberi bantuan. Pada tahun 2018, *United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific* (UNESCAP) dan *United Nations Office for South-South Cooperation* (UNOSSC) memberi penghargaan kepada Indonesia atas kontribusi dan capaiannya untuk kerja sama pembangunan dengan sesama negara berkembang.

### Diplomasi Digital

Perkembangan yang cepat di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mengubah masyarakat Indonesia dalam mendapat dan berbagi informasi. Penetrasi jumlah pengguna internet dan pertumbuhan pengguna media sosial merupakan kesempatan besar untuk mendukung diplomasi Indonesia. Rencana diseminasi informasi yang dikurasi dengan baik dapat mendorong pemahaman dan dukungan yang lebih baik terhadap “diplomasi membumi” yang dicanangkan Indonesia.

Untuk menerapkan diplomasi digital, Kemenlu memiliki berbagai aset digital yang telah dikembangkan secara bertahap, antara lain:

Portal Kementerian Luar Negeri (Portal Kemenlu/[www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)) sebagai gerbang utama penyebaran informasi *online* Kementerian yang terintegrasi dengan 132 situs Perwakilan Indonesia di seluruh dunia. Kemenlu juga memiliki akun resmi di berbagai media sosial yang digunakan untuk diseminasi informasi baik kepada publik di Indonesia maupun di luar negeri dan juga pemangku kepentingan lain seperti pemerintah negara asing dan media. Media sosial Kementerian Luar Negeri saat ini adalah:



**@Kemlu\_RI**

(179k followers)



**kemlu\_ri**

(243k followers)



**Kementerian Luar Negeri RI**

(review 4,6 out of 5 dengan total likes sebanyak 80.160 dan total follows 83.845)



**MoFA Indonesia**

(15.8k subscribers)

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga memiliki aplikasi untuk sebagai instrumen digital yang mendukung kinerja Diplomasi Indonesia, aplikasi ini merupakan aplikasi bersifat pelayanan baik pelayanan dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri maupun pelayanan untuk masyarakat, aplikasi-aplikasi tersebut antara lain:

- Aplikasi *Safe Travel*, merupakan terobosan baru dari Kementerian yang bertujuan meningkatkan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
- Portal Intranet, merupakan sistem informasi dan komunikasi berbasis web yang dimaksudkan sebagai ada pendukung pelaksanaan kegiatan dan manajemen serta penyimpanan data internal Kementerian Luar Negeri.
- Kemenlupedia, *platform* internal yang berisikan database digital yang berisi informasi-informasi kebijakan politik luar negeri dari Direktorat-Direktorat pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang bersifat prioritas dan dapat diakses oleh SDM Kemenlu.
- dan terakhir, Kemenlu RI juga telah mendirikan *Digital Command Center (DCC)* sebagai pusat pemantauan media dan pemrosesan data besar, serta pusat manajemen krisis. DCC sebagai *early warning system* dalam mengambil langkah-langkah strategis kebijakan pimpinan.

Diplomasi digital yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri merupakan cara untuk menjangkau publik dalam negeri maupun internasional. Untuk publik dalam negeri, aset-aset digital yang dimiliki Kemenlu RI menjadi *listening tools* untuk mengetahui aspirasi dan opini masyarakat Indonesia terkait kebijakan yang dibuat. Sementara untuk publik internasional, aset-aset digital Kemenlu RI menjadi alat untuk menyebarkan citra positif Indonesia, utamanya melalui portal dan akun resmi media sosial.

Semua masukan yang didapat melalui diplomasi digital digunakan sebagai instrumen untuk menganalisa efektivitas kebijakan luar negeri Indonesia. Kebijakan dan aset yang telah Indonesia c.q. Kementerian Luar Negeri terapkan menunjukkan bahwa diplomasi digital telah menjadi kunci dalam menjangkau masyarakat.

Dalam ranah Diplomasi Digital, Indonesia telah memulai inisiasi pembahasan berkelanjutan mengenai diplomasi digital dengan negara-negara sahabat dalam berbagai kesempatan. Hal ini diawali dengan penyelenggaraan *International Seminar on Digital Diplomacy (ISDD)* yang digagas Kemenlu dan telah dilaksanakan pada 12 Juli 2018. Sebagai hasil dan tindaklanjut dari ISDD telah dilaksanakan *Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD)* pada 9 – 10 September 2019 yang dihadiri oleh 16 Negara di kawasan Asia Pasifik. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan *Digital Exhibition and Talkshow RCDD* yang diikuti oleh 12 *startups* dan dihadiri oleh lebih dari 700 peserta. Inisiatif Pemri melalui RCDD diharapkan menjadi rujukan bagi kerja sama diplomasi digital pada berbagai tingkat di masa yang akan datang. RCDD juga dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kerja sama diplomasi digital, termasuk melalui kemitraan publik-swasta.

Capaian diplomasi digital yang dilakukan Kementerian Luar Negeri, khususnya dalam peningkatan citra positif Indonesia, sangat didukung oleh peran serta media, baik media nasional maupun media internasional, meliputi berbagai platform media, mulai dari media cetak, *online*, TV dan radio. Hal ini antara lain tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang melibatkan jurnalis dan media dalam berbagai kegiatan yang dilakukan Kemenlu di tanah air, maupun Perwakilan RI di luar negeri. Di samping itu, untuk mendukung peningkatan peran *Digital Command Center* (DCC) sebagai *big data* dan analisa, Kemenlu RI juga telah melakukan kerja sama dengan Pusat Data, Informasi dan Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang) Bappenas dan *Pulse Lab Jakarta* (PLJ) dalam pengembangan *Diplomatic Cable Dashboard* (ALITA) tahap I sejak tahun 2019, yang saat ini berlanjut ke tahap II.

### Pemberdayaan Masyarakat di Luar Negeri

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memberikan perhatian dan dukungan bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang juga dikenal sebagai Diaspora Indonesia. Menurut perkiraan, MILN yang tersebar di berbagai negara saat ini berjumlah sekitar 6-8 juta orang dengan berbagai keahlian dan diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional Indonesia di berbagai bidang.

Sebagai wujud implementasi komitmen tersebut, Kemenlu pada tahun 2015 telah melantik pejabat setingkat Eselon I yaitu Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Kemenlu juga sejak Januari 2017 menetapkan jabatan setingkat Eselon 3 yaitu Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri di bawah Direktorat Diplomasi Publik.

Dalam upaya pemberdayaan MILN/Diaspora Indonesia, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN). Berdasarkan Perpres tersebut, kategori MILN mencakup 4, yaitu: a. WNI yang tinggal di luar negeri; b. warga asing eks WNI; c. warga asing anak eks WNI; d. warga asing yang orang tuanya WNI.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 Tahun 2017, Kemenlu telah menerbitkan Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 7 tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN). Penerbitan KMILN bertujuan untuk mendata dan memberikan fasilitas kepada MILN untuk dapat berperan dalam kegiatan perekonomian atau kegiatan lainnya yang bersifat membangun.

Sampai dengan bulan Desember 2019, Kemenlu telah menerbitkan KMILN kepada 995 MILN yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan, serta direkomendasikan oleh Admin Perwakilan RI. Untuk meningkatkan jumlah penerbitan KMILN, telah dilaksanakan beberapa bimbingan teknis dan sosialisasi aplikasi KMILN di berbagai negara seperti Amerika Serikat,

Argentina, Persatuan Emirat Arab, Jerman, Saudi Arabia, Viet Nam, Italia, Hong Kong, Ceko, dan Australia.

Selain itu, Kemenlu juga telah menginisiasi sejumlah pertemuan dengan K/L terkait pembahasan Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Sinkronisasi Data Nomor Identitas Tunggal/Nomor Induk Kependudukan (NIT/NIK) untuk Penerbitan KMILN, dan Penyusunan Kebijakan Nasional Pemberdayaan MILN.

Terkait penyusunan rekomendasi Kebijakan Diaspora Indonesia, Kemenlu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain melalui perjanjian kerja sama penelitian dengan *Parahyangan Center for International Studies (PACIS)*, Universitas Parahyangan Bandung dan *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)*, Jerman.

Kemenlu juga telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) melalui penyelenggaraan Simposium Cendekia Kelas Dunia (SCKD) dan Kementerian Keuangan melalui kajian untuk penerbitan *Diaspora Bonds*. Selain itu Kemenlu juga mendukung berbagai kegiatan positif yang dilakukan oleh kelompok diaspora seperti *Indonesia Diaspora Network Global (IDN)* dan *Indonesia Diaspora Network United*.

Selain diaspora Indonesia di luar negeri, Kemenlu juga memberdayakan peran para *Indonesianist*, khususnya Generasi Millennial baik peneliti maupun akademisi di dalam dan di luar negeri untuk lebih banyak meneliti mengenai Indonesia dalam perannya di dunia internasional serta mempromosikan Indonesia di dunia internasional melalui tulisan/naskah ataupun karya ilmiah.

### **Infrastruktur Diplomasi**

Infrastruktur diplomasi Indonesia disesuaikan dengan realitas arsitektur global yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu sehingga Kementerian Luar Negeri harus dapat memetakan potensi dan peluang yang tercipta dari perubahan arsitektur global tersebut. Sebagai upaya penguatan diplomasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, organisasi diharapkan menata kelembagaan Kementerian menuju pencapaian misi dan visi prioritas diplomasi Indonesia yang mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menyusun proyeksi postur organisasi seluruh Perwakilan RI melalui Evaluasi Indeksasi dan Analisis Beban Kerja pada tahun 2017. Berdasarkan hasil kajian tersebut, Kementerian Luar Negeri menyesuaikan postur organisasi Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan dengan bobot misi dan nilai kepentingan strategis di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, atau kekonsuleran.

Untuk semakin meningkatkan profil dan peran internasional, Kementerian Luar Negeri sepanjang 2015-2019 telah membuka hubungan diplomatik, diantaranya dengan Republik Afrika Tengah, Barbados, Chad, Niue, dan Cook Islands. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga telah menganalisis kebutuhan peningkatan kehadiran politis melalui rencana pembukaan KBRI di Yaounde, Republik Kamerun serta peningkatan status KUTAP menjadi Duta Besar bagi Kepala Perwakilan RI di Antananarivo, Madagaskar.

Dalam rangka mendukung kinerja infrastruktur diplomasi tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan penataan organisasi secara berkesinambungan. Beberapa peraturan yang ditetapkan berkaitan dengan penataan organisasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;
3. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya.
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Peta Jabatan Kementerian Luar Negeri.

Dengan semangat menata organisasi pula, Kementerian Luar Negeri bersama-sama Kementerian PAN RB melaksanakan Evaluasi Kelembagaan pada satker Pusat maupun Perwakilan RI. Bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri menganalisis dan merelokasi beberapa ITPC (ITPC Lyon – Istanbul, Milan - Karachi, Chennai – Mumbai) ke negara/kota yang mempunyai potensi dan peluang dalam segi hubungan perdagangan lebih besar.

Dari segi manajemen kinerja, Kemenlu telah melakukan lompatan besar pada tahun 2015, yang terbukti dengan diraihnya Predikat “BB” atas Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang semula tahun 2014 berpredikat “CC”. Kemenlu telah berhasil meningkatkan dan mempertahankan Predikat “BB” s.d tahun 2019, yang memiliki arti bahwa Kemenlu telah memiliki sistem manajemen kinerja yang sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Selain itu, Kementerian Luar Negeri senantiasa berkomitmen melaksanakan kemajuan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai *good governance*.



Kementerian Luar Negeri selalu berupaya memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui penetapan kebijakan tata kelola TIK sehingga pengembangan dan pemanfaatan TIK menjadi lebih optimal, berkualitas dan terintegrasi dalam rangka mendukung pelaksanaan diplomasi Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen Kemenlu dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan dan pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia merupakan landasan hukum dan pedoman terciptanya tata kelola yang menjamin keselarasan antara pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan sasaran strategis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

Kementerian Luar Negeri juga melakukan pengukuran nilai evaluasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI) oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang telah diselaraskan dengan SNI ISO/IEC 27001:2013 yang memberikan gambaran kondisi kesiapan dari sisi kelengkapan dan konsistensi keamanan informasi serta dan identifikasi tingkat kematangan penerapan pengamanan informasi. Hasil penilaian mengklasifikasikan bahwa Sistem Elektronik Kementerian Luar Negeri termasuk kategori STRATEGIS, yaitu jika mengalami kegagalan akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri memperoleh nilai indeks pada skala 3.5, yang menunjukkan Tingkat Kematangan Indeks KAMI Kementerian Luar Negeri berada pada posisi 'Kondisi Terdefinisi dan Konsisten'.

Selama kurun waktu 2015-2019 Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan upaya peningkatan kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka penerapan SPBE, diantaranya adalah pembangunan *Digital Command Center* (DCC), pengembangan *Data Center* (DC) tahun 2016, penataan kembali infrastruktur TIK melalui optimalisasi konfigurasi perangkat *Data Center* dan *Data Recovery Center* (DRC) pada tahun 2017, pembentukan Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pembangunan *Seoul*

*Data Center* untuk memberi kemudahan dan kelancaran akses sistem informasi dan aplikasi layanan publik, khususnya untuk pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. Untuk nilai evaluasi SPBE yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB di tahun 2019, Kemenlu mendapatkan hasil Indeks SPBE 3.51 dengan predikat 'Sangat Baik'.

Berbagai penghargaan yang diterima Kementerian Luar Negeri diantaranya adalah peringkat ke-3 Pemingkatan *e-Government* Indonesia pada instansi tingkat kementerian tahun 2015, Peringkat ke-2 Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dalam acara BKN Award 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara, *TOP ICT Leadership* 2016 kepada Menteri Luar Negeri, *Institution Best Practice 2016: TOP IT Implementation on Ministry 2016*, dan *IT Digital Transformation Readiness 2016: TOP Institution on Digital Transformation Readiness 2016*.

Sebagaimana amanat UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kementerian Luar Negeri berkomitmen dalam pengelolaan SDM berbasis sistem merit. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan rekrutmen, Kemenlu telah memiliki standar mutu manajemen ISO 9001:2015 untuk Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sejak tahun 2014 s.d. 2018 (kecuali 2015 & 2016), Biro SDM telah merekrut sebanyak 252 pegawai baru yang terdiri dari Jabatan Fungsional (JF) Diplomat, JF Auditor, JF Perencana, JF Analis Kepegawaian, JF Suncang, JF Pustakawan, dan JF Pranata Komputer. Pemetaan kebutuhan pegawai juga sudah didasarkan pada arah kebijakan Kemenlu, kebutuhan formasi dan peta jabatan, serta Analisis Beban Kerja.



Implementasi sistem merit juga tercermin dalam penanganan dan penyelesaian berbagai kasus disiplin pegawai yang merupakan salah satu bentuk pembinaan organisasi terhadap pegawai. Dalam konteks pengembangan SDM, Kemenlu berkomitmen dalam pengembangan sistem manajemen talenta. Langkah tersebut dilakukan, antara lain, dengan pelaksanaan asesmen kompetensi bagi seluruh Pejabat Struktural (sampai dengan eselon IV) dan dengan target jangka panjang untuk seluruh jabatan fungsional yang ada di Kementerian Luar Negeri serta memulai penyusunan standar dan asesmen kompetensi untuk pejabat di Perwakilan. Hingga tahun 2019 telah dilaksanakan asesmen dan pemetaan

kompetensi terhadap 804 pegawai Kemenlu yang meliputi peserta seleksi JPT, Pejabat Eselon III dan IV, Auditor dan CPNS.

Dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan manajemen SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja yang transparan dan akuntabel, Kementerian Luar Negeri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Diplomat telah menetapkan landasan pelaksanaan tugas instansi Pembina. Selanjutnya, Kementerian Luar Negeri telah membentuk Jabatan Fungsional Penata Kanselera (JFPK) dan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik (JFPID) dengan menetapkan landasan hukumnya. Untuk penilaian kinerja, Kementerian Luar Negeri saat ini telah memiliki 4 (empat) Tim Penilai Instansi Kementerian Luar Negeri untuk menilai Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), yaitu:

1. Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Arsiparis
2. Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Sandiman
3. Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Auditor
4. Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

Dari segi infrastruktur fisik, sebagai wujud komitmen dan kontribusi nyata Pemerintah RI dalam perkuatan organisasi ASEAN, Kementerian Luar Negeri melaksanakan pembangunan Gedung baru *ASEAN Secretariat* (ASEC) termasuk peralatan dan inventaris perkantoran dengan anggaran mencapai Rp560 Miliar. Selain itu untuk memperkuat posisi Indonesia di negara akreditasi, merepresentasikan keanggotaan RI sebagai anggota G-20 dan negara besar di kawasan, Kementerian Luar Negeri pada 2015-2019 telah melakukan pembelian gedung Perwakilan di negara akreditasi sebanyak 8 gedung dengan total nilai pengadaan mencapai Rp1,7 Triliun.

Kementerian Luar Negeri juga tengah berupaya untuk melakukan penatausahaan aset Barang Milik Negara (BMN), antara lain penatausahaan rumah negara sebanyak 768 unit, penataan aset BMN Kemenlu dan Perwakilan RI melalui asistensi pengelolaan dan pelaporan BMN pada satuan kerja Pusat dan Perwakilan RI serta inventarisasi dokumen keimigrasian seluruh perwakilan RI sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peningkatan fasilitas dan layanan umum Kementerian Luar Negeri antara lain fasilitas kantin pegawai dengan predikat 'Kantin Tersehat Seluruh K/L', peremajaan 15 unit armada bus jemputan pegawai, renovasi dan pengadaan fasilitas umum serta ruang kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Terlaksananya layanan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel melalui proses tender dengan total 159 paket dengan nilai Rp1,9 Triliun.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik, Kementerian Luar Negeri terus berupaya melaksanakan berbagai program yang telah disusun sebagai bentuk

dukungan terhadap layanan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Kementerian Luar Negeri.

Selama periode 2015-2019 Kementerian Luar Negeri mempunyai komitmen untuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun 2015, Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selanjutnya selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Kementerian Luar Negeri berhasil meningkatkan dan mempertahankan Opini BPK selama empat tahun berturut-turut menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Prestasi tersebut didukung oleh komitmen yang kuat dari semua pihak mulai dari pimpinan sampai dengan level staf untuk selalu menindaklanjuti temuan dan menjalankan berbagai rekomendasi positif BPK atas Pengelolaan Keuangan Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

### Opini BPK



Selain mempertahankan opini BPK, Kementerian Luar Negeri berhasil mendapatkan penghargaan dari Menteri Keuangan RI sebagai Kementerian/Lembaga dengan “Capaian Kinerja Anggaran Terbaik ke-3 dalam Kategori Pagu Sedang (Rp2,5 Trilyun s.d. 10 Trilyun)” dalam pengelolaan TA 2017. Raihan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sebagai monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, digunakan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Monev SMART Kemenkeu. Terdapat empat aspek utama untuk memperoleh nilai IKPA, yakni kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sedangkan capaian kinerja pada aplikasi SMART merupakan pembandingan performa kinerja Satker dengan anggaran yang telah terserap. Pada tahun 2018, Kementerian Luar Negeri berhasil meningkatkan prestasi dalam pengelolaan anggaran dari terbaik ke-3 menjadi Kementerian/Lembaga dengan “Capaian Kinerja Anggaran **Terbaik ke-1** dalam Kategori Pagu Sedang (Rp2,5 Trilyun s.d. 10 Trilyun)” yang tercermin dalam nilai IKPA tahun 2018 dan nilai Capaian Kinerja Anggaran pada aplikasi SMART Kemenkeu yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Atas prestasi tersebut, Kemenlu memperoleh penghargaan tambahan anggaran berupa Anggaran Insentif. Untuk tahun 2019 Kementerian Luar Negeri berhasil menjadi Kementerian/Lembaga dengan “Capaian Kinerja

Anggaran Terbaik ke-2 dalam Kategori Pagu Sedang (Rp2,5 Trilyun s.d. 10 Trilyun)” sehingga kembali mendapatkan penghargaan berupa insentif.

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien juga tercermin dari penyerapan anggaran yang ditunjukkan dari besarnya realisasi anggaran yang telah dicapai dari tahun 2015-2019. Besaran tersebut mencerminkan bahwa kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disusun untuk kemudian dianalisa agar periode berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri periode 2015-2019 adalah:

TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
89,65 %	85,88 %	91,67%	96,15 %	96,04%

Di bidang pengawasan intern, pada Oktober 2019 Kementerian Luar Negeri mencapai target Kapabilitas APIP tingkat 3. Capaian tersebut sesuai RPJMN 2015-2019 dimana Pemerintah menargetkan 85% dari 86 K/L sudah mencapai Kapabilitas APIP tingkat 3 pada tahun 2019.

Terkait komponen Penguatan Pengawasan dalam Reformasi Birokrasi, sebagai tindak lanjut penancangan Zona Integritas di Kementerian Luar Negeri pada Desember 2014, upaya pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) terus ditingkatkan. Selama periode 2017-2019, Kementerian Luar Negeri berhasil memperoleh predikat WBBM pada 3 Satuan Kerja (KBRI Seoul, KJRI Hongkong, dan KJRI Kota Kinabalu); serta predikat WBK pada 7 Satuan Kerja (KBRI Singapura, KJRI Osaka, KJRI Jeddah, KJRI Kuching, KJRI Sydney, Museum Konferensi Asia Afrika, dan Direktorat PWNI/BHI).

## I.2 Potensi dan Permasalahan

### Diplomasi Politik Luar Negeri

Lima tahun ke depan merupakan tahun yang sangat sibuk bagi diplomasi Indonesia. Mengawali periode rencana kerja jangka menengah nasional, di tahun 2020 situasi global mengalami ketidakpastian dengan adanya pandemi virus Corona (COVID-19) yang telah menyebar ke lebih dari 200 negara dan wilayah. Dengan tidak adanya preseden dan skalanya yang besar, dampak dari pandemi tersebut berimbas secara signifikan pada tatanan hubungan luar negeri, ekonomi, pemerintahan, teknologi dan interaksi kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak di tahun berjalan, pengaruh pandemi ini diprediksi masih tetap terbawa hingga tahun mendatang. Terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri mengemban amanat baru dalam rangka penanganan dampak pandemi melalui optimalisasi diplomasi ekonomi dan kesehatan.

Sampai akhir 2020, Indonesia masih akan duduk dalam Dewan Keamanan PBB. Isu kerjasama untuk *countering terrorism* akan menjadi fokus keketuaan Indonesia bulan Agustus 2020. Pada tahun 2021-2022, Indonesia akan menjadi anggota Dewan HAM PBB. Pada tahun 2020, Indonesia akan menjadi Ketua *Foreign Policy and Global Health/FPGH* dengan mengusung tema "*Affordable Health Care*". Pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN sekaligus Ketua G-20.

Persoalan-persoalan global di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perlindungan HAM dan sosial budaya tidak dapat dihadapi oleh dunia secara individu, melainkan harus melalui kerja sama yang konkret dalam forum-forum internasional dan multilateral.

Terkait dengan hal tersebut, Indonesia senantiasa menjalankan diplomasi multilateral secara aktif dengan mengedepankan peran kepemimpinan Indonesia yang menempatkan dirinya sebagai bagian dari solusi dan sebagai *brigde builder* dalam penyelesaian masalah-masalah internasional. Hal tersebut dijalankan melalui pendekatan *total diplomacy* yang melibatkan seluruh elemen dalam negeri, tidak terkecuali *non-state actor*.

Dalam pembahasan dan penyelesaian isu-isu multilateral, terdapat ekspektasi masyarakat internasional terhadap peningkatan peran Indonesia di forum multilateral. Secara umum, kinerja diplomasi multilateral Indonesia menunjukkan hasil yang sangat positif dan mendapatkan pengakuan serta apresiasi dunia internasional antara lain dalam pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, terpilihnya Indonesia sebagai anggota Tidak Tetap DK PBB, peran kunci Indonesia di GNB untuk berbagai isu penting seperti non proliferasi dan perlucutan senjata, secara konsisten mendorong perjuangan kemerdekaan Palestina antara lain di forum OKI, menjaga kedaulatan NKRI, peran aktif Indonesia di berbagai forum kerja sama ekonomi seperti FAO, WTO, UNCTAD, UNIDO, WIPO, memajukan isu HAM dan

kemanusiaan, lingkungan hidup dan menempatkan putra-putri terbaik bangsa di berbagai posisi pada Organisasi Internasional.

Selain penanganan isu-isu tradisional, Indonesia juga berpotensi menunjukkan kepemimpinannya dengan semakin banyaknya isu baru (*non-core issues*) yang menjadi perhatian PBB.

Saat ini, kerja sama multilateral mengalami tantangan yang berat dengan berkembangnya kebijakan isolasi atau *Me First Policy*. Selain itu, terdapat kecenderungan terjadinya pelemahan multilateralisme global akibat sejumlah negara yang semakin *inward looking*. Di samping itu, timbul kekhawatiran bahwa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan disrupsi rantai pasokan (*supply chain*) barang-barang kebutuhan esensial akan memicu tindakan unilateralisme dan proteksionisme di bidang ekonomi dan perdagangan sehingga mengakibatkan terjadinya pelemahan ekonomi global.

Dalam konteks regional, ASEAN akan tetap menjadi soko guru politik luar negeri Indonesia. ASEAN telah mengadopsi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* dan dalam 5 tahun ke depan, Indonesia ingin memastikan implementasi kerja sama Indo-Pasifik akan berjalan. Dalam kaitan inilah bekerja sama dengan *World Economic Forum*, Indonesia berencana untuk menjadi tuan rumah “*World Economic Forum on ASEAN: Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity*” pada tahun 2021.

*World Economic Forum on ASEAN* diharapkan dapat menjadi forum praktis antara pemerintah dan komunitas bisnis yang bertujuan untuk menyatukan pandangan para pemangku kepentingan dalam menjawab tantangan terkait pembangunan infrastruktur, konektivitas, perdagangan, pengembangan industri dan kondisi keamanan, sekaligus menjadi *showcasing* proyek infrastruktur dan konektivitas dalam bentuk *exhibition* dan *business deals*, yang juga dapat mendukung dan melengkapi *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) 2025.

Dalam konteks politik dan keamanan ASEAN, politik luar negeri yang bebas aktif tercermin dalam upaya meningkatkan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara guna kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, upaya memperkuat nilai-nilai bersama di ASEAN dalam hal demokrasi, *good governance*, hak asasi manusia, dan penegakan hukum juga menjadi kepentingan utama Indonesia dalam mencapai kemakmuran di ASEAN. Dalam rangka merespon berbagai tantangan baik di kawasan dan global, Indonesia juga mendorong agar ASEAN dapat meningkatkan kerja sama dalam menanggulangi berbagai ancaman non-tradisional termasuk terorisme dan ekstrimisme, perdagangan orang, peredaran obat terlarang, perompakan di laut, dan keamanan maritim.

Penguatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN juga akan terus diperjuangkan melalui kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara ke depannya, seperti

mendorong dukungan Mitra Wicara terhadap ASEAN *Outlook on the Indo-Pacific* beserta implementasinya mengingat beberapa negara Mitra Wicara sudah memiliki konsepnya masing-masing. Selain itu, Indonesia juga terus mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, lembaga *think tanks*, filantropi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk memperkaya konsep dan pengayaan bentuk implementasi kerja sama dalam kerangka Indo-Pasifik di lapangan.

Indonesia juga akan mendorong penanganan permasalahan sampah laut dalam kerangka kerja sama *East Asia Summit* (EAS), penyelesaian solusi bersama diskriminasi kelapa sawit Indonesia oleh Uni Eropa, penebalan kerja sama ASEAN *Plus Three* (APT) khususnya di bidang *people-to-people contact*, dan memastikan kepentingan Indonesia termuat dalam berbagai Rencana Aksi ASEAN dengan Mitra Wicara tahun 2021-2025. Namun demikian, upaya tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan di dalam negeri agar diplomasi Indonesia, khususnya terkait sampah plastik laut dan kelapa sawit dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Indonesia juga berkepentingan untuk memajukan penguatan industri/ekonomi kreatif ASEAN yang ke depannya merupakan salah satu sektor yang potensial. Hal ini juga selaras dengan program pembangunan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden RI Joko Widodo. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembentukan *ASEAN-External Partners Creative Economy Center*, dimana ASEAN bersama mitra-mitra eksternalnya akan fokus menangani pengembangan industri/ekonomi kreatif di ASEAN. Terkait dengan komitmen Indonesia untuk mendorong penguatan Sekretariat ASEAN melalui gedung Sekretariat ASEAN yang baru, Indonesia memiliki peluang untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan di dalam negeri dalam berbagai pertemuan/sidang teknis yang diselenggarakan di gedung Sekretariat ASEAN. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap capaian diplomasi Indonesia di ASEAN, mengingat mereka menjadi bagian dari proses pembuatan kebijakan tersebut.

Secara keseluruhan, keberhasilan kepemimpinan Indonesia di ASEAN akan bergantung pada upaya peningkatan kapasitas domestik, penguatan kelembagaan dan kemitraan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya serta mewujudkan komitmen Indonesia di ASEAN ke dalam dukungan domestik melalui regulasi, kelembagaan, program/kegiatan dan anggaran.

Diplomasi perdamaian dan kemanusiaan akan dilanjutkan dengan tujuan memberikan kontribusi konkrit penyelesaian masalah, Indonesia *always wants to be part of solution*, antara lain:

- Isu Rakhine State;
- Perdamaian di Afghanistan;
- Perdamaian di Palestina;
- Kerjasama dalam rangka pencapaian SDGs, termasuk dengan negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan.
- Penyelesaian perundingan *Code of Conduct (COC)* di Laut Cina Selatan.
- Penguatan Promosi dan Perlindungan HAM di ASEAN melalui AICHR.
- *Interfaith, Intermedia, Youth and Culture dialogue*

### Diplomasi Perbatasan

Terkait diplomasi perbatasan, diplomasi harus dapat bekerja untuk memagari wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Penyelesaian batas-batas negara akan diintensifkan melalui perundingan. Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan Pusat Studi Asia Tenggara menyelenggarakan secara rutin Lokakarya Internasional dalam rangka meredam potensi konflik di Laut China Selatan yang menghadirkan pihak yang berpartisipasi dari negara-negara di Asia Tenggara, China, dan Chinese Taipei. Lokakarya Laut China Selatan (LCS) bertujuan membangun kerja sama lebih erat untuk menjaga perdamaian, stabilitas keamanan dan meningkatkan kesejahteraan di kawasan Laut China Selatan melalui kerja sama teknik untuk kepentingan bersama, seperti *marine debris, blue carbon* dan *marine blue economy*.

Berbagai kemajuan signifikan terkait perundingan perbatasan dicapai melalui proses yang panjang dan memiliki beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Dalam perundingan penetapan batas maritim, Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri sering kali menemui kendala dalam proses negosiasi seperti adanya perbedaan interpretasi rezim hukum internasional yang mengatur tentang batas-batas maritim antar negara, serta permasalahan teknis lainnya.

Adanya kendala tersebut menyebabkan proses perundingan berlangsung cukup lama hingga akhirnya dapat dicapai suatu kesepakatan yang selanjutnya dituangkan dalam sebuah perjanjian batas negara. Salah satu contoh perundingan batas maritim yang memakan waktu cukup lama adalah perundingan batas landas kontinen antara Indonesia dan Viet Nam. Perundingan tersebut berlangsung selama kurang lebih 25 tahun sejak tahun 1978 hingga dicapainya kesepakatan batas landas kontinen pada tahun 2003 sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Batas Landas Kontinen Indonesia dan Viet Nam.

Selanjutnya, proses perundingan batas darat juga memiliki kendala tersendiri yang berbeda dengan kendala dalam perundingan batas maritim. Secara internal, koordinasi dan komunikasi antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah terkait perundingan batas darat belum terjalin dengan baik dan masih perlu ditingkatkan. Selain itu, terdapat kesulitan dalam hal ketersediaan arsip khususnya arsip *field plan* (semacam peta petunjuk) hasil pengukuran demarkasi di masa lalu, yang masih perlu ditata lebih baik. Kendala lain yaitu terkait dengan beberapa perundingan yang sifatnya sangat politis, dimana alur pengambilan keputusan sering kali belum jelas antara porsi yang harus diambil oleh Kementerian pengarah dengan Kementerian teknis.

Untuk mengatasi kendala yang muncul dalam proses perundingan perbatasan tersebut, Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya penanggulangan antara lain melakukan pendekatan kepada pemerintah negara tetangga untuk melakukan diskusi informal guna menyamakan pandangan atau interpretasi terhadap ketentuan hukum internasional yang mengatur mengenai batas maritim antara kedua negara. Selain itu, Pemerintah RI melakukan pertemuan informal dan pertemuan antar sesi kelompok kerja teknis sebagai forum diskusi lebih mendalam terkait teknis penarikan garis batas maritim.

Upaya Pemerintah RI lainnya adalah melaksanakan pertemuan informal dengan beberapa Kementerian/Lembaga teknis untuk mengkoordinasikan isu-isu strategis terkait perundingan batas darat, serta melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Koordinator dalam pengambilan keputusan-keputusan yang sifatnya politis.

Berdasarkan penjelasan diatas, Pemerintah RI jelas memiliki perhatian khusus terhadap perundingan perbatasan, mengingat batas antarnegara yang belum ditetapkan dapat menyebabkan kerancuan terkait penerapan hukum nasional negara mana yang akan diberlakukan di lapangan serta memicu kebingungan aparat negara dalam upaya penegakan hukum dan kedaulatan. Selain itu, belum jelasnya batas antarnegara juga dapat menimbulkan permasalahan terkait pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mencakup sumber daya mineral dan sumber daya hayati, serta meningkatkan potensi timbulnya pelanggaran wilayah oleh pihak asing, insiden yang melibatkan masyarakat Indonesia dan negara asing di kawasan perbatasan, dan penggunaan kawasan perbatasan sebagai pintu masuk dan berlandung bagi pelaku tindak pidana transnasional.

Indonesia juga saat ini telah berhasil menurunkan secara signifikan tingkat pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia seiring dengan makin eratnya kerja sama regional dalam hal pemberantasan IUU *Fishing*. Namun Indonesia tetap harus waspada dan tidak lengah dengan meningkatkan kerja sama, khususnya untuk mencegah ikan hasil IUU *Fishing* masuk ke dalam jalur distribusi pasar. Indonesia juga akan terus mengawal dan berkontribusi aktif dalam berbagai isu-isu sosial budaya yang menjadi perhatian di kawasan, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, dan penanggulangan *transboundary haze pollution*.

Tingginya kompleksitas dan potensi permasalahan di kawasan perbatasan tersebut menjadikan diplomasi perbatasan sebagai salah satu prioritas Pemerintah RI yang memiliki tantangan tinggi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, adanya kejelasan batas darat dan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga merupakan aspek penting dalam upaya memelihara kesatuan NKRI. Untuk itu, beberapa strategi yang patut dipertimbangkan untuk menjadi prioritas Pemerintah RI guna mendukung diplomasi perbatasan yaitu:

1. Optimalisasi Tim Teknis Penetapan Batas Maritim RI yang telah ada saat ini, yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri;
2. Perampingan format pertemuan perundingan penegasan batas darat yang difokuskan pada penegasan batas darat yang belum disepakati;
3. Penegakan keamanan di laut dan udara, serta penguatan pengamanan di kawasan perbatasan khususnya pos lintas batas, sesuai hukum nasional dan internasional, guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran wilayah dan tindak pidana transnasional;
4. Pengelolaan sumber daya kelautan yang efektif dan efisien serta mempertimbangkan keberkelanjutan sumber daya perikanan, pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated fishing*, dan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya energi dan mineral;
5. Perlindungan lingkungan hidup;
6. Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dalam bentuk peningkatan penyediaan infrastruktur dasar untuk menyokong kehidupan masyarakat sekitar; dan
7. Penguatan koordinasi dan kerja sama antar Kementerian/Lembaga.

### Diplomasi Ekonomi

Indonesia adalah pasar yang besar dengan lebih dari 260 juta jiwa. Hal ini dapat dijadikan *leverage* atau daya tawar untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional. Kemenlu akan melakukan kapitalisasi penguatan pasar domestik untuk menjaga pasar domestik dari produk-produk yang masuk secara ilegal maupun dengan *dumping* atau disubsidi pihak asing.

Perekonomian merupakan salah satu sektor yang paling terpuak dengan adanya pandemi Covid-19. IMF sendiri telah menegaskan bahwa perekonomian global sudah memasuki tahap resesi dimana hampir semua negara menghentikan sebagian aktivitas perekonomian. Beberapa negara yang menghadapi wabah ini lebih awal dan telah mengalami penurunan kasus mulai menetapkan strategi untuk membuka kembali ekonomi mereka, sementara mayoritas negara yang masih atau baru mulai mengalami puncak kasus umumnya memprioritaskan pembangunan sistem kesehatan. Covid-19 membawa akibat

yang luar biasa di segala bidang, khususnya kesehatan dan ekonomi. Tak terelakkan, sebagai bagian tak terpisahkan dari perekonomian dunia, Indonesia pasti tak lepas dari dampak tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan *global efforts* dalam penanganan Covid-19 termasuk pasca-pandemi guna pemulihan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Diplomasi pemulihan ekonomi nasional pasca-pandemi Covid-19 memerlukan dukungan dan kerja sama berbagai elemen di level nasional dan internasional. Diplomasi tersebut akan diarahkan pada upaya pencapaian kepentingan nasional bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, program yang diusulkan bersifat tidak rutin, sangat strategis, dan bagian dari prioritas nasional dalam mendukung reformasi sosial dan ekonomi, khususnya pemulihan ekonomi dan penguatan industri kesehatan.

Di luar kejadian luar biasa tersebut, pertumbuhan ekonomi global yang rendah menunjukkan peningkatan pelanggaran-pelanggaran yang harus makin diwaspadai. Sebagai contoh, Indonesia menghadapi beberapa masalah akses pasar ke UE seperti persyaratan teknis, *sanitary dan phytosanitary* (SPS), dan *non-tariff barriers* (NTB) terutama produk perikanan, pertanian, elektronik, mebel, dan kosmetik. Produk minyak sawit Indonesia juga menghadapi beberapa hambatan baik berupa kampanye negatif dari kalangan swasta dan LSM, maupun regulasi dan *standard setting* UE, terutama di sektor energi terbarukan.

Sedangkan dari aspek politik dan keamanan, terdapat peningkatan tren pergantian kepemimpinan di negara mitra yang dikuasai oleh partai-partai sayap kanan yang menganut paham *inward-looking*. Hal ini menyulitkan peningkatan hubungan bilateral dan kerja sama internasional dengan negara Mitra. Salah satu contohnya ialah kebijakan Polugri Presiden AS, Donald Trump, '*America First*' yang mengutamakan kepentingan Amerika Serikat dengan kebijakan yang bersifat transaksional dan tidak jarang konfrontatif.

Sehubungan persetujuan blok Barat dengan Rusia menyusul aneksasi Krimea dan konflik di Ukraina tahun 2014. Rusia sebagai *legal successor* Uni Soviet dan *prime-mover* kawasan Eurasia kian menggiatkan perhatiannya ke kawasan Asia (*Look East Policy*) yang membuka peluang bagi masuknya produk/komoditas termasuk dari Indonesia sebagai substitusi impor produk dari Eropa. Beberapa negara besar di kawasan ETT, khususnya Rusia dan Turki, juga telah menunjukkan minat besar berinvestasi di Indonesia dan melakukan *joint production medium weight tank* Kaplan / Harimau. Kawasan ETT juga potensial bagi *outbound investment* Indonesia, misalnya di Serbia.

Diplomasi ekonomi akan terus bekerja untuk memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis dan saling-menguntungkan dengan pasar utama Indonesia. Sementara itu, langkah terobosan juga akan dilakukan untuk menembus pasar potensial yang lebih banyak lagi.

Setelah menembus pasar Afrika melalui *Indonesia-Africa Forum* dan *Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue*, BUMN dan sektor swasta Indonesia akan terus melanjutkan *engagement* dengan Afrika di bidang perdagangan barang dan jasa, serta investasi termasuk

pembangunan infrastruktur dan konstruksi di kawasan tersebut. Indonesia juga akan menyelenggarakan sejumlah ProPN di bidang ekonomi yang diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak proyek dan kesepakatan bisnis dengan melibatkan semua *stakeholders* baik dari kalangan pemerintah dan swasta. Peningkatan *engagement* akan dilakukan pula dengan kawasan non tradisional lainnya, yaitu Latin Amerika; Asia Selatan dan Tengah; serta Timur Tengah dan Pasifik.

Untuk memperkuat akses pasar, dalam 5 tahun kedepan, penyelesaian berbagai perundingan CEPA/FTA/PTA dengan berbagai negara akan dipercepat dengan catatan akan bermanfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan saling menguntungkan. Produk Indonesia sulit bersaing dengan produk serupa negara-negara lain yang telah mempunyai perjanjian perdagangan dengan mitra dagang Indonesia.

Selain itu, para pelaku usaha dan bisnis di Indonesia masih belum memberikan perhatian besar untuk mengembangkan ataupun melakukan penetrasi pasar ke pasar potensial, antara lain pasar di kawasan Eurasia. pembentukan perjanjian perdagangan dengan organisasi-organisasi regional seperti MERCOSUR, Aliansi Pasifik, dan EAEU dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar kawasan-kawasan tersebut.

Namun begitu masih terdapat sejumlah kendala dalam kerja sama dengan negara kawasan ETT, antara lain persepsi ancaman komunisme di kalangan masyarakat Indonesia; dampak sanksi Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap Rusia; *artificial barrier*, *connectivity* dan biaya transportasi yang tinggi; kurang dikenalnya potensi Indonesia di kalangan pengusaha negara kawasan ETT; maupun dinamika politik domestik dan regional di kawasan ETT yang cukup mempengaruhi minat dunia usaha Indonesia berkiprah di kawasan ETT.

Dalam mengatasi persoalan ini dan upaya membuka pasar lebih luas di *untapped market* di kawasan Eurasia, dewasa ini Indonesia tengah menggodok perjanjian IT-CEPA dengan Turki dan rencana pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA) dengan *Eurasian Economic Union* (EAEU) yang beranggotakan Rusia, Belarus, Armenia, Kirgizstan dan Kazakhstan.

Di bidang ekonomi ASEAN, Indonesia akan terus memperjuangkan penyelesaian dan implementasi RCEP mengingat putaran perundingan RCEP diperkirakan baru akan selesai pada tahun 2020, sehingga masih banyak yang harus dilakukan untuk pelaksanaannya seperti ratifikasi perjanjian, serta implementasinya kepada *stakeholders* di Indonesia. Dalam hal peningkatan implementasi perdagangan barang dan jasa melalui ATIGA dan ATISA, diharapkan peran Indonesia dalam mengambil kesempatan yang sebesar-besarnya melalui sistem perdagangan yang telah terbuka di lingkup regional.

Selain itu Indonesia tetap akan terus mendorong penyelesaian berbagai kerja sama ekonomi di tingkat ASEAN dengan negara-negara maupun organisasi mitra wicara ASEAN seperti Australia (penyelesaian *the 2<sup>nd</sup> Protocol to Amend ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement*), Jepang (ratifikasi *protocol to amend ASEAN – Japan Comprehensive*

*Economic Partnership/AJCEP*), Kanada (*ASEAN – Canada FTA*), Selandia Baru (*ASEAN-New Zealand Air Transport Agreement/ANZ-ATA*), dan Uni Eropa (*ASEAN - EU Comprehensive Air Transport Agreement/AE-CATA*).

Upaya untuk mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi akan terus dilakukan agar promosi lebih terarah dan menghasilkan hal yang konkrit. Promosi ke luar negeri akan dilakukan secara sinergis tentunya promosi ini harus dilakukan sejalan dengan perbaikan iklim usaha dan investasi di dalam negeri baik di tingkat nasional maupun di daerah sehingga memberikan hasil konkrit. Dengan mulainya ekspansi BUMN dan sektor swasta Indonesia, sudah waktunya Indonesia juga mengembangkan kebijakan *outbound investment* ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional.

Sebagai negara mayoritas muslim terbesar di dunia, Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal. Diplomasi juga akan bekerja untuk mendorong produk unggulan yang berorientasi ekspor serta mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan industri strategis ke luar negeri.

Langkah-langkah ini penting dilakukan untuk memastikan produk unggulan yang berorientasi ekspor dapat terus didorong dan di saat yang sama, ekspansi peran perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri juga dapat difasilitasi.

Berbagai *Bilateral Investment Treaty* kedepan akan juga difokuskan untuk melindungi investasi Indonesia di luar negeri secara adil. Selain itu, Indonesia juga akan makin memfokuskan pada sektor dimana Indonesia memiliki nilai tambah dengan mengembangkan ekosistem dan kebijakan yang mendukung perkembangan industri-industri pengolahan sumber daya alam.

Diplomasi juga akan dioptimalkan untuk menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia. Kepentingan kelapa sawit Indonesia adalah hal fundamental karena menyangkut hajat kurang lebih 16 juta orang khususnya petani kecil dan keluarganya. Kemenlu akan terus menolak berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan terhadap kelapa sawit, karena bukan saja merugikan kepentingan nasional namun juga mengancam terpenuhinya kebutuhan mayoritas populasi dunia akan minyak nabati yang memenuhi kriteria SDGs.

Potensi ekonomi lainnya yang juga akan dikedepankan dalam diplomasi ekonomi Kemenlu adalah mendorong ekonomi 4.0 yang meliputi industri digital, ekonomi kreatif dan pengembangan SDM Indonesia. Kebijakan mendorong ekonomi 4.0 ini diperlukan baik untuk meningkatkan produktifitas berbagai industri di Indonesia, maupun untuk membuka akses yang makin besar bagi kelompok menengah bawah ke pasar internasional, *financial inclusion* dan ekonomi kreatif sehingga pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin tinggi dan merata.

### Diplomasi Sosial dan Budaya

Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk terus memajukan potensi sosial dan budaya nasional dalam kerangka bilateral, regional, maupun multilateral dengan tujuan:

1. Meningkatkan citra dan posisi tawar Indonesia di fora internasional;
2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia terhadap potensi sosial dan budaya Indonesia;
3. Membangun basis dukungan yang kuat bagi Indonesia di fora internasional untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional;
4. Memajukan kualitas sumber daya di bidang sosial dan budaya.

Di bidang sosial dan budaya ASEAN, Indonesia akan terus berupaya untuk memperjuangkan pemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran yang bersifat non-diskriminatif dan menyeluruh, termasuk untuk pekerja migran non-prosedural sesuai dengan amanat Konstitusi RI. Selain itu, Indonesia juga akan terus berupaya untuk mendorong pembentukan *ASEAN Coordination Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC)* melalui pembahasan *draft Agreement on the Establishment of ACCTHPC*. Indonesia juga akan berupaya mendorong diadopsinya *the Narrative of ASEAN Identity* oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dalam rangka mendorong rasa kepemilikan masyarakat terhadap ASEAN.

Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi benda budaya Indonesia, khususnya yang berada di luar Negeri, Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator pelaksanaan hubungan luar negeri, menginisiasi pembentukan SOP Standar Operasional Prosedur sebagai panduan bagi Kementerian/ Lembaga terkait dalam upaya menyelamatkan benda budaya Indonesia yang diselundupkan ke luar negeri dikarenakan adanya kekosongan aturan hukum yang mengatur isu ini.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 29 ayat (4) Undang-undang No. 10 tahun 2011 terkait benda budaya Indonesia yang berada di luar negeri sebagai upaya untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap kelestarian benda budaya Indonesia, Kementerian Luar Negeri juga akan mengoptimalkan peran Perwakilan RI di luar negeri dalam melakukan pendataan yang komprehensif atas benda budaya Indonesia di luar negeri.

### Pelindungan WNI dan BHI

Sesuai dengan amanat Konstitusi, Negara harus terus hadir untuk melindungi warganya di luar negeri. Diproyeksikan jumlah WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk tujuan migrasi maupun tujuan-tujuan lain yang berdurasi pendek, akan terus meningkat di masa yang akan datang. Kondisi ini tak lepas dari transportasi ke luar negeri yang kian mudah dan terjangkau, adanya fasilitas bebas visa yang diberlakukan oleh beberapa negara, dan semakin terbukanya informasi kondisi di luar negeri khususnya peluang kerja yang terbuka bagi warga asing.

Bagi Kemenlu dan Perwakilan RI, proyeksi peningkatan jumlah WNI yang bepergian ke luar negeri ini perlu diantisipasi secara baik guna meminimalisir potensi peningkatan jumlah kasus-kasus WNI di luar negeri. Berdasarkan data Kemenlu, rata-rata jumlah WNI yang pergi ke luar negeri mencapai angka 9,5 juta/tahun. Sementara jumlah data WNI di luar negeri saat ini baru mencapai 2,9 juta orang. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut perlu dibangun sebuah sistem perlindungan WNI di luar negeri yang baik.

Berdasarkan arahan Menteri Luar Negeri RI dalam Rapat Koordinasi Pelayanan Publik dan Pelindungan WNI di Luar Negeri di Jakarta pada 9 – 11 September 2019, terdapat 7 strategi yang akan digunakan dalam pembangunan sistem pelayanan perlindungan WNI untuk periode 2020 - 2024 yakni:

1. Standarisasi dan integrasi pelayanan publik dan pelindungan;
2. Transformasi digital untuk mewujudkan pelayanan tepat, mudah, murah dan akurat melalui Portal Peduli WNI dan *Safe Travel*;
3. Penguatan kapasitas SDM di Kementerian dan Perwakilan RI;
4. Penetapan limitasi tanggung jawab pelindungan Pemerintah;
5. Investasi pada upaya pencegahan;
6. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap sistem; dan
7. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Dari 7 strategi tersebut, prioritas pelindungan akan difokuskan sesuai arahan yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI pada Pidato Menteri Luar Negeri mengenai Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024, 29 Oktober 2019, yaitu:

1. Mengubah *mindset* kepedulian dan keberpihakan atau revolusi *mindset* pelindungan:  
Perubahan *mindset* harus dibakukan (lanjutan) agar dalam 5 tahun ke depan dapat menjadi *corporate culture* Kemenlu.
2. Pengintegrasian Portal Peduli WNI dengan sistem informasi pelayanan WNI dari K/L lain, contoh SIMKAH Kemenag dan SAKE Ditjen AHU, Kemenkumham:  
Jika pengintegrasian selesai dilakukan maka Indonesia akan memiliki “satu data” sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia. Satu Data WNI di luar negeri akan mempermudah dan memperkuat sistem pelindungan WNI di luar negeri.
3. Melalui kerja sama dengan K/L terkait Kemenlu mendorong perbaikan tata kelola menuju migrasi aman, regular dan teratur atau di forum PBB di sebut sebagai *safe, orderly and regular migration*.

Hal ini akan dicapai melalui keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional terkait imigrasi. Perbaikan tata kelola migrasi harus dilakukan secara paralel pada tingkat domestik, bilateral, kawasan (ASEAN), dan tingkat internasional baik pada tataran hulu dan tataran hilir.

#### 4. Penguatan upaya pencegahan-prevensi.

Salah satu upaya pencegahan-prevensi adalah penguatan edukasi publik, pemberdayaan dan pengapresiasian kontribusi masyarakat. Penguatan upaya preventif ini dapat mengurangi resiko korban perdagangan manusia.

Selain itu, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) Tahun 2020, Menteri Luar Negeri telah menyampaikan fokus diplomasi perlindungan yakni pembangunan strategi perlindungan secara holistik di tingkat domestik dan internasional melalui:

1. Penyusunan Rencana Aksi Nasional implementasi dan universalisasi *Global Compact for Migration*;
2. Pelaksanaan kampanye penyadaran publik mengenai migrasi aman;
3. Pengembangan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait untuk pembentukan ekosistem pengguna *Safe Travel*;
4. Pembangunan *database* WNI yang akurat dan terintegrasi melalui Portal Peduli WNI;
5. Pembentukan *guidelines* penanganan kasus ABK di luar negeri;
6. Penguatan implementasi *ASEAN Consensus on the Promotion and the Protection of the Rights of Migrant Workers*;
7. Penguatan kerja sama penanganan kejahatan perdagangan manusia; dan
8. Intensifikasi upaya penyelesaian MoU penempatan PMI di negara tujuan.

### **Pemajuan Demokrasi dan HAM**

Salah satu *landmark* Pemerintah Indonesia dalam pemajuan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di kawasan Asia Pasifik dan di dunia adalah dengan inisiatif *Bali Democracy Forum* (BDF) yang diselenggarakan sejak 2008, sebuah forum antar pemerintah yang bersifat tahunan, inklusif dan terbuka yang membahas mengenai perkembangan demokrasi, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Hingga saat ini, BDF telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis untuk Asia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan politik yang seimbang, menciptakan perdamaian dan stabilitas, serta dapat memajukan kualitas penerapan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di kawasan yang merupakan tiga pilar penyangga konsep perserikatan bangsa-bangsa.

Beberapa kearifan Nusantara turut mewarnai pertukaran tentang demokrasi, yaitu: (1) Bahwa demokrasi harus tumbuh dan berkembang atas inisiatif internal (*home-grown*); (2) Demokrasi menjunjung nilai-nilai pluralisme dan keberagaman; dan (3) Demokrasi bersifat inklusif.

Dari tahun 2008 hingga kini, tingkat kehadiran negara-negara sahabat pada BDF terus meningkat dan tingkat kehadiran tertinggi tercapai pada BDF ke-10 pada tahun 2017 yaitu 99 negara dan 7 organisasi internasional. Hal ini menunjukkan adanya ketertarikan, minat, dan penghargaan masyarakat internasional terhadap forum demokrasi yang diprakarsai oleh Indonesia.

BDF ke-12 telah diselenggarakan pada 5-6 Desember 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center dengan tema utama “*Democracy and Inclusivity*”. Tema ini dipilih dengan pertimbangan diantaranya bahwa inklusivitas merupakan isu global yang aktual serta relevan di tengah tantangan mengelola multikulturalisme dalam gelombang nasionalisme.

BDF ke-12 membahas berbagai sub-tema dalam beberapa *breakout sessions*, antara lain; *Moving towards inclusive state building* (forum pemerintah); *Rising exclusivity and declining democracy* (Bali Civil Society and Media Forum/BCSMF); *Youth and inclusive digital diplomacy* (Bali Democracy Students Conference/BDSC); dan *Inclusive economy* (forum bisnis). Sebagaimana tahun sebelumnya, BDF ke-12 juga melibatkan sektor ekonomi serta mendorong kehadiran *social entrepreneur*.

Untuk pengembangan dan penguatan peran BDF di masa mendatang, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah “*Grand Design* Diplomasi Publik” yang saat ini sedang disusun dan akan menjadi acuan berbagai program Diplomasi Publik seperti BDF. Format BDF juga akan disusun lebih menarik dengan menyesuaikan perkembangan tren forum-forum demokrasi dunia untuk mengoptimalkan diskusi yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Kegiatan-kegiatan pendukung BDF seperti BDSC, BCSMF serta BDF *Chapter* akan terus dikembangkan untuk memperkaya BDF.

Isu *women, peace and security*, akan tetap menjadi perhatian politik luar negeri Indonesia. Dalam kaitan ini, isu *women empowerment and democracy* akan menjadi topik bahasan dalam BDF. Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong dan mempromosikan peran perempuan dalam perdamaian melalui implementasi ASEAN *Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security*, UN Resolution 1325: *Women, Peace and Security*, dan komitmen ASEAN-IPR terhadap pengarusutamaan gender. Indonesia akan terus memperkuat ASEAN *Women for Peace Registry* (AWPR) yang telah diluncurkan pada tanggal 14 Desember 2018 sebagai wadah para praktisi dan pengamat proses perdamaian perempuan yang berasal dari seluruh negara-negara anggota ASEAN. Lebih lanjut Indonesia juga akan merealisasikan jejaring negosiator dan mediator perempuan Asia Tenggara dari 10 Negara Anggota ASEAN serta Papua Nugini dan Timor-Leste. Peluncuran *The Southeast Asia Network of Women Peace Negotiators and Mediators* (SEA Women Peace Network) yang diinisiasi Indonesia akan menjadi bagian dari *Global Alliance of Regional Women*

*Mediator Networks* yang telah diresmikan di New York pada tanggal 26 September 2019. Inisiatif Indonesia pada agenda WPS ini akan terus ditindaklanjuti dengan sejumlah program dan kegiatan penguatan *SEA Women Peace Network*, diantaranya pertemuan tahunan dan konferensi/pelatihan *mediation and negotiation skills*. Pada organisasi regional IORA dan APEC, Indonesia juga mengambil peran penting dalam memajukan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Di IORA, Indonesia merupakan salah satu negara pendorong (*leading countries*) pada area kerja sama prioritas Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan akan terus memperkuat kerja sama di bidang ini, termasuk melalui berbagai inisiatif pada *Working Group on Women's Economic Empowerment (WGBEE)* yang baru dibentuk. Sebagai anggota ekonomi APEC, Indonesia berpartisipasi aktif pada *Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE)*, yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi dan partisipasi perempuan dalam perekonomian dan mengkoordinasikan kegiatan gender di APEC. Indonesia akan terus tingkatkan peran dan partisipasi aktif di PPWE, termasuk dengan mendukung penyusunan *Implementation Plan* bagi *The La Serena Roadmap for Women* yang disahkan pada *APEC Women and the Economy Forum (WEF)* tahun 2019 dan memanfaatkan *APEC Women and the Economy Sub-fund* untuk peningkatan kapasitas perempuan.

Dalam konteks perlindungan WNI di luar negeri, upaya pemberdayaan gender akan terus diutamakan khususnya bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) perempuan dan anak-anak dari PMI yang masuk dalam kategori rentan. Diplomasi, kerja sama dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dasar bagi anak-anak PMI di luar negeri, penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan serta peningkatan keterampilan PMI di Perwakilan RI di luar negeri, penyusunan pedoman manajemen *shelter* (tempat singgah sementara/TSS) dan pelayanan publik yang sensitif gender dan pengawasan implementasinya, serta peningkatan kapasitas pejabat fungsional diplomat terkait isu-isu gender adalah beberapa upaya penting dalam memastikan perlindungan WNI di luar negeri yang inklusif.

Dalam kerangka yang sama, penyelenggaraan pelayanan publik berupa pencatatan dan penerbitan dokumen sipil bagi WNI di luar negeri, khususnya pencatatan dan penerbitan akta pernikahan dan kelahiran adalah upaya vital dalam rangka perlindungan hak sipil perempuan dan anak. Banyak negara sahabat yang tidak mengizinkan atau melayani pencatatan pernikahan dan kelahiran bagi PMI di luar negeri, yang mengakibatkan kerentanan bagi perempuan sebagai istri dan anak-anak hasil pernikahan tersebut. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah membangun aplikasi Portal Peduli WNI yang memfasilitasi layanan penerbitan akta kelahiran dan Nomor Induk Terpadu (NIT) pengganti Nomor Induk Kependudukan bagi anak-anak PMI di luar negeri. Hingga 18 Juni 2020, Portal Peduli WNI telah menerbitkan sebanyak 25 akta kelahiran dan 1 NIT. Kedepannya, melalui kerja sama dengan Kementerian Agama, Portal Peduli WNI juga akan memfasilitasi layanan pencatatan pernikahan bagi WNI muslim di luar negeri.

### Diplomasi Publik

Kemenlu merupakan koordinator perumusan dan pelaksana politik luar negeri Indonesia. Termasuk di dalam politik luar negeri tersebut adalah isu-isu diplomasi publik. Diplomasi publik sebagai salah satu alat diplomasi dapat mendukung pencapaian kebijakan politik luar negeri, khususnya dengan cara peningkatan citra dan opini positif Indonesia serta membangun jejaring Sahabat Indonesia di berbagai negara di seluruh dunia. Terkait hal tersebut, Indonesia terkenal di dunia internasional sebagai salah satu negara yang memiliki aset diplomasi publik yang sangat beragam, diantaranya adalah keanekaragaman budaya, masyarakat majemuk dan toleran, ekonomi yang dinamis, multi agama, dan demokrasi. Adapun aset diplomasi publik di atas terwujud melalui kegiatan-kegiatan diplomasi publik yang diadakan oleh Indonesia seperti yang telah dijelaskan di atas yaitu BSBI, Promosi dan *Community Outreach* Museum KAA, DLA, Promosi Potensi Ekonomi Indonesia di Luar Negeri, FOI, *Dialogue of Peace and Democracy*, *Public Diplomacy Campaign*, *Bilateral Intermedia Dialogue*, *Working Group on Democratic Civil Society*, UFTR, DT, PL, DG, dan program OYTW. Seluruh kegiatan tersebut telah menarik perhatian masyarakat internasional, yang dibuktikan dengan tingginya partisipasi masyarakat dari seluruh belahan dunia dalam mengikuti kegiatan dimaksud.

Perlu diperhatikan juga bahwa selain tingkat partisipasi masyarakat dunia dalam kegiatan diplomasi publik Indonesia, salah satu aset diplomasi publik Indonesia adalah sistem demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah diakui sebagai salah satu yang terbesar dan terkompleks di dunia, dan implementasinya berjalan dengan relatif lancar dalam beberapa tahun terakhir. Tentunya nilai demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia mampu menjadi modal/aset diplomasi publik yang dapat meningkatkan peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, terutama sebagai pusat pendukung penguatan kapasitas pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia. Konflik yang akhir-akhir ini berakar dari isu-isu agama dan terjadi di seluruh dunia mendorong negara-negara di dunia untuk bekerja sama di Indonesia. Kepercayaan negara-negara asing tersebut didorong dengan fakta bahwa kemajemukan Indonesia merupakan alasan untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra dialog utama, terutama dalam mengelola Dialog Lintas Agama dan Budaya.

### Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil, serta peningkatan status Indonesia menjadi *upper middle-income country*. Sesuai amanah pembukaan UUD 1945, konsekuensi dari pencapaian ini adalah adanya tanggung jawab yang lebih besar bagi Indonesia untuk pembangunan dan kesejahteraan global melalui pemberian bantuan hibah uang tunai

maupun berbagai bantuan teknik termasuk program peningkatan kapasitas kepada negara sahabat dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menerima lebih banyak tawaran kerja sama triangular dari negara dan lembaga mitra pembangunan internasional. Di sisi lain, juga telah terjadi peningkatan permintaan bantuan pembangunan, bantuan kemanusiaan dan bantuan teknik dari sesama negara berkembang. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan koordinasi dan sinergi yang lebih kuat di antara K/L dan instansi terkait lainnya agar pemberian hibah dan bantuan teknik menjadi lebih tepat sasaran dan prosesnya menjadi lebih efisien.

Guna menjawab kebutuhan tersebut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 yang kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 yang mengatur mekanisme pemberian hibah kepada pemerintah dan lembaga asing, dari mulai kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Wapres Jusuf Kalla telah meluncurkan secara resmi Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang juga disebut *Indonesian Agency for International Development* (Indonesian AID) sebagai perwujudan “diplomasi tangan di atas”. LDKPI adalah bukti komitmen Indonesia dalam penguatan kerja sama regional dan global. Melalui LDKPI, pelaksanaan pengelolaan dana bantuan hibah Indonesia kepada pemerintah dan lembaga asing akan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan KSST yang efektif dapat membantu pencapaian kepentingan nasional, khususnya yang terkait dengan dukungan terhadap integritas wilayah NKRI, penguatan peran dan pengaruh Indonesia pada tatanan regional dan global, serta pelaksanaan diplomasi ekonomi.

Pelaksanaan KSST masih mengalami beberapa kendala seperti:

- a. Kesulitan dalam koordinasi dan sinergi antar K/L dan instansi terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan KSST;
- b. Belum terintegrasinya data jumlah peserta dan nilai bantuan teknik yang telah diberikan kepada negara/lembaga asing;
- c. Belum terlaksananya mekanisme pemantauan dan evaluasi (monev) yang dapat menjaga keberlanjutan hubungan dengan negara/lembaga penerima bantuan teknik; dan
- d. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dit. KST saat ini belum mencerminkan proses bisnis pasca pembentukan LDKPI.

Kendala-kendala tersebut dapat diatasi melalui peningkatan peran Kemenlu dalam koordinasi pelaksanaan KSST, penguatan mekanisme koordinasi dan sinergi dengan K/L terkait serta penyesuaian SOTK Dit. KST, mengingat bahwa setelah pembentukan LDKPI,

Menlu berkedudukan sebagai Ketua Bersama Komisi Pengarah LDKPI dan Dirjen menjalankan peran sebagai Ketua Kelompok Kerja Penilaian Usulan Hibah. Dalam hal ini, Dit. KST akan mengalami perubahan struktur organisasi dan nomenklatur menjadi Direktorat Kerja Sama Pembangunan Internasional.

KSST juga perlu dilaksanakan secara terukur dan hati-hati agar tidak menimbulkan reaksi negatif dari publik akibat kurangnya pemahaman tentang investasi politik dan peluang ekonomi dari pemberian bantuan teknik kepada negara/lembaga asing. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan munculnya kompetisi produk/jasa dari negara/lembaga penerima bantuan peningkatan teknik serta adanya kepentingan terselubung (*hidden agenda*) baik dari negara/lembaga penerima bantuan maupun dari negara/lembaga mitra pembangunan.

### Diplomasi Digital

Diplomasi Digital merupakan hal baru yang diproyeksikan akan mengubah wajah diplomasi di masa yang akan datang. Penggunaan teknologi dalam keseharian yang berkembang dengan sangat pesat mau tidak mau menjadikan teknologi Informasi sebagai salah satu *tools of diplomacy*.

Apabila diterapkan secara maksimal, diplomasi digital berpotensi memberikan manfaat yang sangat besar, baik kepada para praktisi diplomasi yaitu kalangan diplomat maupun kepada masyarakat luas. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membawa perubahan dalam *ways of doing business*, antara lain dalam hal:

#### 1. Diseminasi informasi kepada publik di dalam dan di luar negeri

Perkembangan Teknologi Informasi dapat menunjang diplomasi digital terutama dalam melaksanakan diseminasi informasi. Pelaksanaan diplomasi digital dapat memangkas penggunaan waktu untuk mengantarkan informasi mengenai kebijakan luar negeri yang cepat, tepat dan akurat.

Penggunaan TI dalam diplomasi juga memungkinkan terjadinya inovasi yang berguna dalam hal pemberdayaan dan perlindungan masyarakat. Khusus dalam perlindungan masyarakat, diplomasi digital lebih memperkuat kehadiran negara di tengah WNI di manapun berada karena memudahkan akses WNI dengan seluruh Kantor Perwakilan Indonesia di luar negeri.

#### 2. Sebagai alat pelaksanaan diplomasi publik

Kegiatan diplomasi digital sering diasosiasikan dengan kegiatan diplomasi publik oleh negara melalui pemanfaatan media sosial yang gencar. Namun lebih jauh lagi, diplomasi digital dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam memerangi dan meminimalisir ancaman ekstrimisme, separatisme dan paham radikalisme melalui diseminasi informasi

dan pesan-pesan perdamaian maupun *counter* berbagai pemberitaan negatif yang berkembang di tengah publik.

### 3. Mendukung peningkatan diplomasi ekonomi

Diplomasi digital juga mendukung jalannya diplomasi ekonomi, antara lain melalui ketersediaan *platform* bagi Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendapatkan informasi maupun mencari berbagai peluang kerja sama, termasuk bisnis di seluruh dunia. Diplomasi digital diharapkan akan merangsang pertumbuhan *e-digital economy* dan dapat mendorong pembangunan ekonomi kawasan karena memberikan kemudahan dan *possibility* kerja sama yang lebih cepat, efektif dan efisien antar pelaku usaha di kawasan.

### 4. Mendukung kebijakan politik luar negeri

Dalam lingkungan diplomasi digital yang ideal, pemerintah dapat memperjelas pesan mereka, termasuk agenda kebijakan luar negeri, tidak terkecuali dengan agenda-agenda politik luar negeri Indonesia di dunia internasional. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat dengan cepat menyampaikan keputusannya atas suatu isu di dunia internasional yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional. Contohnya pada menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral. Diplomasi digital yang ideal juga dapat menjadi cara tepat dan lebih cepat bagi publik untuk terhubung dengan pemerintah mereka terhadap suatu isu, hingga respon publik akan suatu isu dapat disampaikan secara langsung.

Dalam pelaksanaan diplomasi digital, masih terdapat permasalahan yang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Hambatan internal adalah di lingkup Kementerian Luar Negeri, sementara hambatan eksternal adalah hambatan di tingkat nasional yang melibatkan K/L teknis lain. Hambatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Di lingkup Kementerian Luar Negeri, masih terdapat *gap* yang cukup besar dalam pemanfaatan teknologi informasi antar generasi yang berbeda, sehingga penggunaan IT belum bisa dilakukan secara seragam untuk seluruh SDM Kemenlu. Masih diperlukan upaya-upaya peningkatan keahlian dan kualitas SDM secara bertahap dan berkesinambungan untuk memastikan tersedianya SDM dengan standar kompetensi yang merata dalam hal penguasaan teknologi informasi.
2. Sementara itu secara nasional, masih minimnya kebijakan bersama para pemangku kepentingan lintas K/L terkait dengan pelaksanaan diplomasi digital secara terpadu, menyebabkan masih terkotak-kotaknya kebijakan dan program yang dilakukan masing-masing K/L sehingga tidak ada satu pedoman yang jelas dan efektif untuk dapat mencapai manfaat diplomasi digital yang optimal.
3. Indonesia belum memiliki agenda yang jelas atau cetak biru dalam menggunakan diplomasi digital yang sangat diperlukan untuk menentukan arah dan tujuan selanjutnya dalam penggunaan instrumen-instrumen diplomasi digital yang sudah tersedia.

4. Penggunaan IT dalam diplomasi tidak langsung meningkatkan kualitas dan keahlian SDM di Kementerian Luar Negeri dalam penguasaan teknologi informasi yang terus berkembang.

### Pemberdayaan Masyarakat di Luar Negeri

Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) yang juga dikenal dengan Diaspora Indonesia bagi pembangunan nasional di masa depan akan semakin penting. Hal ini ditegaskan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada pidato sebagai Presiden RI terpilih untuk periode 2019-2024 di Sentul, Bogor, 14 Juli 2019 dan pada pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019, yang menyampaikan Lima Prioritas Kerja Jokowi-Ma'ruf yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia dimana Presiden RI mengundang talenta-talenta global/kontribusi Diaspora Indonesia yang bertalenta tinggi bagi percepatan pembangunan Indonesia.

Menurut perkiraan, MILN yang tersebar di berbagai negara saat ini berjumlah sekitar 6-8 juta orang dan terdiri dari berbagai kelompok serta memiliki berbagai bidang keahlian. Dengan keahlian dan jejaring yang mereka miliki, MILN diharapkan dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional Indonesia di berbagai bidang. Dalam kurun waktu 2020 – 2024, pemberdayaan MILN akan difokuskan pada harmonisasi aturan dan produk hukum terkait fasilitasi Kartu MILN, penguatan kelembangaan Diaspora, dan Pembentukan Manajemen Talenta MILN. Pembentukan Manajemen Talenta MILN merupakan bentuk dukungan dan fasilitasi pemerintah terhadap kinerja dan karya MILN di berbagai sektor untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia.

### Infrastruktur Diplomasi

Keberadaan infrastruktur diplomasi penting untuk mendukung prioritas-prioritas Indonesia di luar negeri. Infrastruktur diplomasi meliputi reformasi birokrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur fisik diplomasi, penguatan pemanfaatan teknologi dan informatika, serta transformasi digital.

Kementerian Luar Negeri memerlukan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dalam melakukan tupoksinya masing-masing agar berhasil mengeksekusi strategi diplomasi RI di luar negeri. Hal ini perlu dilakukan dengan manajemen SDM berbasis merit yang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri akan memastikan berjalannya identifikasi potensi, pengembangan kompetensi melalui *coaching*, *mentoring*, dan diklat, penetapan pola karier, pemetaan talenta, dan memastikan pemberian *reward and punishment* yang tepat dan objektif berdasarkan kinerja.

Dalam rangka mewujudkan tertib lingkungan di Kementerian Luar Negeri dipandang perlu untuk menciptakan sistem pengelolaan BMN yang berbasis teknologi informasi sebagai upaya rencana kerja BMN yang lebih modern dan akuntabel. Diperlukan inovasi pemanfaatan berbagai sumber daya yang dimiliki Kementerian Luar Negeri untuk seluruh pegawai serta Warga Negara Indonesia (WNI) baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Pengelolaan lingkungan umum Kementerian Luar Negeri diselenggarakan secara terpusat sehingga terwujud standar kondisi lingkungan umum yang representatif di seluruh kantor Kementerian Luar Negeri.

Dalam pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri terutama terkait peningkatan sarana dan prasarana, permasalahan yang dihadapi antara lain adalah terbatasnya alokasi anggaran untuk proses peningkatan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memenuhi sertifikasi untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa.

Dalam hal penguatan infrastruktur hukum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi lima tahunan, Kementerian Luar Negeri telah berhasil melakukan capaian sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kemenlu  
Pemetaan peraturan perundang-undangan secara komprehensif melalui pendataan dan pengidentifikasian peraturan perundang-undangan yang disharmoni/tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik vertikal maupun horizontal.
2. Pelaksanaan Sistem Pengendalian dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  
Sistem pengendalian dimaksud dilakukan dengan mempersyaratkan adanya rapat koordinasi antar satuan kerja di Kemenlu, adanya naskah urgensi atau naskah akademis, pembahasan dalam tataran interkementerian terutama jika ada keterkaitan materi muatan dengan kementerian/lembaga lain, proses harmonisasi dan paraf koordinasi oleh pimpinan Kemenlu.
3. Pembentukan Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagai Sarana Pelayanan Hukum  
Kementerian Luar Negeri telah memanfaatkan jaringan teknologi informasi untuk memberikan akses informasi dan dokumentasi hukum seluas-luasnya kepada masyarakat melalui portal [www.idih.kemenlu.go.id](http://www.idih.kemenlu.go.id).

## Analisis SWOT



Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang merupakan unsur SWOT dari organisasi dan sangat berpengaruh pada organisasi. Melalui identifikasi tersebut langkah selanjutnya adalah menetapkan bobot dari masing-masing unsur SWOT untuk mengetahui mana yang paling dominan berpengaruh dari unsur SWOT tersebut.

**Kesimpulan Analisa Faktor Internal (KAFI)**

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Score (3x4)	Kesimpulan (Prioritas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Kekuatan (Strength)</b>				
1	Kementerian Luar Negeri memiliki SDM yang kompeten di bidang-nya	30	4	120	I
2	Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen reformasi birokrasi yang kuat	10	3	30	III
3	Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator hubungan luar negeri	10	4	120	II
	<b>Kelemahan (Weakness)</b>				
1	<i>Grand design</i> terkait SDM Kemenlu (rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karir dan regulasi) belum terimplementasi secara penuh	10	3	30	IV
2	Implementasi dan sinkronisasasi sistem manajemen kinerja organisasi dan individu yang belum efektif	5	2	10	VI
3	Kementerian Luar Negeri belum memiliki sistem penyimpanan dan pengelolaan data dan dokumen yang memadai	5	2	10	VII
4	Regulasi Internal pelaksanaan hubungan luar negeri belum memadai	10	3	30	V

**Kesimpulan Analisa Faktor Eksternal (KAPE)**

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Score (3x4)	Kesimpulan (Prioritas)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Peluang (Opportunity)</b>				
1	Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang semakin meningkat dalam berbagai organisasi/forum internasional dan regional	20	4	80	I
2	Citra Indonesia yang semakin baik di mata internasional	20	4	80	II
3	Hubungan kerjasama dengan negara mitra yang semakin baik	10	3	30	V
	<b>Tantangan (Threat)</b>				
1	Kondisi geo-politik dan geo-ekonomi global yang berdampak negatif terhadap	5	2	10	VIII

	pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.				
2	Masih kuatnya ego sektoral Kementerian/Lembaga dalam mendukung upaya diplomasi.	10	4	40	III
3	Kompetisi yang tinggi terkait pembukaan akses pasar internasional yang prospektif.	10	3	30	VI
4	Peraturan perundang-undangan menghambat kemudahan investasi asing dan ekspor.	10	4	40	IV
5	Adanya perbedaan sistem di tiap negara akreditasi	5	2	10	IX
6	Ketidaksiapan publik domestik/ <i>stakeholders</i> dalam mengimplementasikan kerja sama/ komitmen internasional	10	3	30	VII

### Keterangan :

**Bobot** didasarkan pada dampak yang ditimbulkan pada keberhasilan kini dan kedepan dengan nilai total 100.

**Rating** adalah setiap faktor yang menggunakan pendekatan skala 1 sampai dengan 4 dengan keterangan 1 (paling tidak menonjol), 2 (tidak menonjol), 3 (menonjol), 4 (sangat menonjol).

## Analisis TOWS

<p style="text-align: right;"><b>KAFI</b></p> <p style="text-align: left;"><b>KAFE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b></p> <p>Susunan berdasarkan ranking</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Luar Negeri memiliki SDM yang kompeten di bidang-nya.</li> <li>2. Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator hubungan luar negeri.</li> <li>3. Kementerian Luar Negeri memiliki komitmen reformasi birokrasi yang kuat</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b></p> <p>Susunan berdasarkan ranking</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Grand design</i> terkait SDM Kemenlu (rekrutmen, pendidikan, penempatan, pengembangan karir dan regulasi) belum terimplementasi secara penuh.</li> <li>2. Regulasi Internal pelaksanaan hubungan luar negeri belum memadai.</li> <li>3. Implementasi sistem manajemen kinerja belum terintegrasi.</li> <li>4. Kementerian Luar Negeri belum memiliki sistem penyimpanan dan pengelolaan data dan dokumen yang memadai</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b></p> <p>Susunan berdasarkan ranking</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang semakin meningkat dalam berbagai organisasi/forum internasional dan regional.</li> <li>2. Citra Indonesia yang semakin baik di mata internasional.</li> <li>3. Hubungan kerjasama dengan negara mitra yang semakin baik.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Asumsi Strategi</b> <b><i>Strength VS Opportunity</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggunaan SDM yang kompeten dapat meningkatkan peran Indonesia yang semakin meningkat dalam berbagai organisasi/forum internasional dan regional.</li> <li>2. Fungsi Kemenlu sebagai koordinator hubungan luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara mitra yang semakin baik.</li> <li>3. Komitmen reformasi birokrasi yang kuat dapat menciptakan citra Indonesia yang semakin baik di mata internasional.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Asumsi Strategi</b> <b><i>Weakness VS Opportunity</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan <i>Grand design</i> terkait SDM Kemenlu akan lebih meningkatkan kepemimpinan dan peran Indonesia di berbagai organisasi/forum internasional dan regional.</li> <li>2. Memperbaiki regulasi Internal pelaksanaan hubungan luar negeri guna meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara mitra yang semakin baik.</li> <li>3. Penataan regulasi Internal pelaksanaan hubungan luar negeri yang baik juga dapat meningkatkan citra Indonesia yang baik.</li> </ol>

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

		<p>4. Integrasi implementasi sistem manajemen kinerja, serta sistem penyimpanan dan pengelolaan data dan dokumen yang memadai dapat meningkatkan citra Indonesia yang baik.</p>
<p><b>Tantangan (<i>Threats</i>)</b>                  Susunan berdasarkan ranking</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih kuatnya ego sektoral Kementerian/Lembaga dalam mendukung upaya diplomasi.</li> <li>2. Peraturan perundang-undangan menghambat kemudahan investasi asing dan ekspor.</li> <li>3. Kompetisi yang tinggi terkait pembukaan akses pasar internasional yang prospektif.</li> <li>4. Ketidaksiapan publik domestik/<i>stakeholders</i> dalam mengimplementasikan kerja sama/ komitmen internasional.</li> <li>5. Kondisi geo-politik dan geo-ekonomi global yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.</li> </ol>	<p><b>Asumsi Strategi</b>  <b><i>Strength VS Threats</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi Kemenlu sebagai koordinator hubungan luar negeri dapat menanggulangi ego sektoral Kementerian/Lembaga dalam mendukung upaya diplomasi.</li> <li>2. Komitmen reformasi birokrasi yang kuat dapat meminimalisir peraturan perundang-undangan yang menghambat kemudahan investasi asing dan ekspor, serta ketidaksiapan publik domestik/<i>stakeholders</i> dalam mengimplementasikan kerja sama/ komitmen internasional.</li> <li>3. Penggunaan SDM yang kompeten dapat mengantisipasi kompetisi yang tinggi terkait pembukaan akses pasar internasional yang prospektif, dan kondisi geo-politik dan geo-ekonomi global yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.</li> </ol>	<p><b>Asumsi Strategi</b>  <b><i>Weakness VS Threats</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan <i>Grand design</i> terkait SDM Kemenlu akan mengantisipasi kompetisi yang tinggi terkait pembukaan akses pasar internasional yang prospektif, dan kondisi geo-politik dan geo-ekonomi global yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia.</li> <li>2. Memperbaiki regulasi Internal pelaksanaan hubungan luar negeri serta adanya implementasi sistem manajemen kinerja dapat mengatasi peraturan perundang-undangan yang menghambat kemudahan investasi asing dan ekspor, serta ketidaksiapan publik domestik/<i>stakeholders</i> dalam mengimplementasikan kerja sama/ komitmen internasional.</li> <li>3. Pengelolaan sistem penyimpanan serta pengelolaan data dan dokumen akan mengurangi ego sektoral Kementerian/Lembaga dalam mendukung upaya diplomasi.</li> </ol>

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

### FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

ASUMSI STRATEGI		KETERKAITAN DENGAN															URUTAN PILIHAN STRATEGI (2+3+4)	
		VISI	MISI									Nilai-nilai						
1		2	3									4					5	
<b>Strength VS Opportunity</b>																		
1	Penggunaan SDM yang kompeten dapat meningkatkan peran Indonesia yang semakin meningkat dalam berbagai organisasi/forum internasional dan regional	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	44
2	Fungsi Kemenlu sebagai koordinator hubungan luar negeri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara mitra yang semakin baik	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
3	Komitmen reformasi birokrasi yang kuat dapat menciptakan citra Indonesia yang semakin baik di mata internasional	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
<b>Strength VS Threats</b>																		
1	Fungsi Kemenlu sebagai koordinator hubungan luar negeri dapat menanggulangi ego sektoral Kementerian/Lembaga dalam mendukung upaya diplomasi	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	
2	Komitmen reformasi birokrasi yang kuat dapat meminimalisir peraturan perundang-undangan yang menghambat kemudahan investasi asing dan ekspor, serta ketidaksiapan publik domestik/ <i>stakeholders</i> dalam mengimplementasikan kerja sama/ komitmen internasional	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

3	Penggunaan SDM yang kompeten dapat mengantisipasi kompetisi yang tinggi terkait pembukaan akses pasar internasional yang prospektif, dan kondisi geo-politik dan geo-ekonomi global yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	
<b>Weakness VS Opportunity</b>																		
1	Mengimplementasikan <i>Grand design</i> terkait SDM Kemenlu akan lebih meningkatkan kepemimpinan dan peran Indonesia di berbagai organisasi/forum internasional dan regional	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	
2	Memperbaiki regulasi Internal pelaksanaan hubungan luar negeri guna meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara mitra yang semakin baik	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	
3	Penataan regulasi Internal pelaksanaan hubungan luar negeri yang baik juga dapat meningkatkan citra Indonesia yang baik	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	
4	Implementasi dan sinkronisasasi sistem manajemen kinerja organisasi dan individu, serta sistem penyimpanan dan pengelolaan data dan dokumen yang memadai dapat meningkatkan citra Indonesia yang baik	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	
<b>Weakness VS Threats</b>																		
1	Mengimplementasikan <i>Grand design</i> terkait SDM Kemenlu akan mengantisipasi kompetisi yang tinggi terkait pembukaan akses pasar internasional yang prospektif, dan kondisi geo-politik dan geo-ekonomi global yang berdampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	
2	Memperbaiki regulasi Internal pelaksanaan hubungan luar negeri serta adanya implementasi dan sinkronisasasi	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

	sistem manajemen kinerja organisasi dan individu dapat mengatasi peraturan perundang-undangan yang menghambat kemudahan investasi asing dan ekspor, serta ketidaksiapan publik domestik/ <i>stakeholders</i> dalam mengimplementasikan kerja sama/ komitmen internasional																	
3	Pengelolaan sistem penyimpanan serta pengelolaan data dan dokumen akan mengurangi ego sektoral Kementerian/Lembaga dalam mendukung upaya diplomasi	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	

## 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

---

### 2.1. Visi

Sesuai amanat Presiden RI dan yang ditindaklanjuti Menteri Luar Negeri, penyelarasan visi dan misi Kementerian Luar Negeri adalah

**“Memimpin diplomasi yang aktif dan efektif untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

### 2.2. Misi

Kementerian Luar Negeri melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal melalui hubungan luar negeri untuk mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing
- b. Memberikan perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang prima sebagai upaya perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- c. Menjaga integritas NKRI yang bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat serta Daerah dan meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional
- d. Memajukan kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di dunia internasional
- e. Meningkatkan infrastruktur diplomasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia

### 2.3. Tujuan/Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri

#### 1. Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal

Nilai manfaat diplomasi ekonomi, keuangan, dan pembangunan adalah jumlah nominal manfaat yang dihasilkan oleh berbagai kerja sama dan promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata.

**Optimal** adalah paling baik; tertinggi; dan paling menguntungkan.

**Hubungan Luar Negeri** adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek bilateral, regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi-organisasi, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

### 2. **Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global**

**Kepemimpinan** adalah nilai kewibawaan yang menjadi pertimbangan dan kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga memiliki nilai pengaruh terhadap kebijakan di forum internasional. Kepemimpinan dapat diperlihatkan di antaranya melalui peran sebagai inisiator, mediator dan fasilitator.

**Peran** adalah partisipasi dan keikutsertaan secara aktif.

**Berpengaruh di tingkat regional dan global** adalah mempunyai pengaruh terhadap pengambil kebijakan isu-isu bilateral, regional, dan global.

### 3. **Integritas Kedaulatan NKRI dan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional yang meningkat**

**Integritas Kedaulatan** adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan.

**NKRI** adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

**Citra positif Indonesia** adalah persepsi positif yang dipercayai/diyakini aktor lain terhadap Indonesia yang didasarkan kepada pola perilaku yang ditunjukkan Indonesia dalam pergaulan internasional.

**Dunia Internasional** adalah seluruh aktor-aktor dalam hubungan luar negeri.

**Meningkat** adalah kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

### 4. **Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima**

**Pelindungan WNI di Luar Negeri** adalah segala upaya yang dilakukan untuk melayani dan melindungi kepentingan WNI dan BHI di luar negeri termasuk penyediaan bantuan informasi/hukum/dan/atau sosial dengan memperhatikan prinsip mengedepankan keterlibatan pihak yang bertanggung jawab dan/atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau

perdata WNI; dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hukum negara setempat serta hukum dan kebiasaan internasional.

**Pelayanan Publik** adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.

**Prima** adalah sangat baik; utama.

### 5. Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi

**Dukungan** adalah sokongan/bantuan.

**Komitmen** adalah (upaya) perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.

**Tinggi** adalah (mendukung) secara penuh.

**Kebijakan Luar Negeri** adalah sikap dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.

**Kesepakatan internasional** adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan subyek hukum internasional, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.

**Tinggi** adalah mendukung secara penuh dalam konteks dukungan.

### 6. Infrastruktur Diplomasi yang kuat

**Infrastruktur Diplomasi** adalah seluruh sumber daya, sarana dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan diplomasi dan hubungan luar negeri.

**Kuat** adalah mempunyai keunggulan/tidak mudah goyah.

### 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, disusun sebagai penjabaran dari Visi Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

##### 3.1.1. Visi dan Misi Pembangunan Nasional

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Periode pemerintahan ini didasarkan pada visi:

**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Agenda Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Dari ketujuh agenda tersebut, Kemenlu berperan dalam melaksanakan Agenda Pembangunan ke-7 yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”

Kemenlu juga akan mendukung agenda pembangunan ke-1 dan ke-4 yakni “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa”.

### 3.1.2. Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) Meningkatkan Hak-Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi,
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.



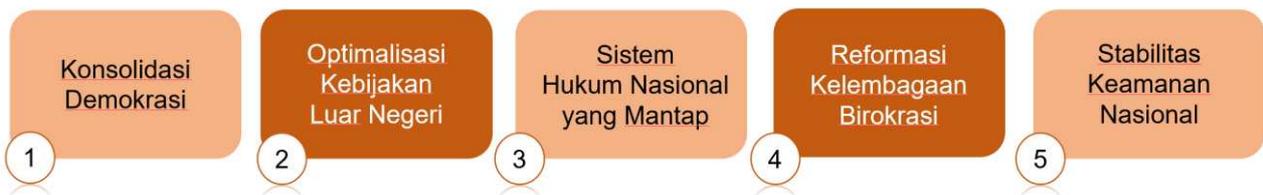
**Sumber: Kementerian Luar Negeri**

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1295/berita/adakan-pelayanan-di-hari-minggu-kbri-seoul-layani-setidaknya-133-wni-di-korea-selatan>

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

Khusus bidang Polhukhankam, agenda pembangunan 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Pembangunan Polhukhankam perlu memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah pergeseran gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke isu maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, instabilitas di kawasan Timur Tengah.

Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu :



Dari kelima arah kebijakan tersebut, Kemenlu memberikan kontribusi kepada PP 2: Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri. Isu-isu strategis dalam rangka optimalisasi kebijakan luar negeri mencakup 4 aspek yakni:

<b>1</b>	<b>Aspek Keamanan</b>  Meliputi: Pelindungan WNI/BHI, perbatasan, penjagaan perdamaian, kejahatan lintas batas, dan pencurian ikan	<b>2</b>	<b>Aspek Kerja Sama Pembangunan Internasional</b>  Meliputi: Penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)
<b>3</b>	<b>Aspek Sosial-Budaya</b>  Meliputi: Penguatan citra positif Indonesia di dunia internasional	<b>4</b>	<b>Aspek Tata Kelola</b>  Meliputi: Pemanfaatan keanggotaan Indonesia pada organisasi/forum internasional, dan penataan peran, serta fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri

### 3.1.3. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.



**Sumber: Kementerian Luar Negeri**

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1051/berita/kemlu-dorong-kolaborasi-dan-sinergi-pemerintah-dan-pelaku-usaha-dalam-peningkatan-ekspor>

Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman dan perikanan, industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan

2. Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor dan daya saing perekonomian

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup :

(1) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

(2) Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

Peningkatan nilai tambah di sektor riil antara lain dilakukan melalui:

- Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dilakukan dengan meningkatkan kemitraan, meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan, meningkatkan kemampuan inovasi, dan meningkatkan penciptaan peluang usaha.
- Mendorong inovasi dan pembentukan ekosistem inovasi Indonesia melalui pengelolaan aset kekayaan intelektual, alih teknologi, dan kerja sama riset dan pengembangan.

(3) Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

(4) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri antara lain dilakukan melalui :

- Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital, memperbaiki iklim usaha, mengembangkan industri halal.
- Peningkatan ekspor kiranya juga didukung oleh revitalisasi industri pengolahan yang mendorong diversifikasi produk ekspor non-komoditas, terutama ekspor produk manufaktur berteknologi tinggi.
- Diversifikasi ekspor tidak hanya dilakukan dari sisi produk, namun juga dalam hal negara tujuan ekspor.
- Memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada berbagai organisasi komoditas multilateral untuk menjajaki peluang peningkatan ekspor komoditas strategis Indonesia dan mengatasi hambatan perdagangan. Indonesia juga fokus terhadap kegiatan peningkatan kapasitas petani dan nelayan serta berbagi pengalaman (*lesson learnt*) dengan negara anggota lainnya.

Pada Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, Kemenlu mendukung pencapaian PP 2: Peningkatan Nilai Tambah dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi.

Diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri dilaksanakan secara aktif dalam konteks kerja sama internasional untuk mencapai kepentingan nasional. Untuk mengatasi dampak Covid-19, Pemerintah Indonesia telah menyusun Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang ditujukan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, khususnya UMKM, BUMN dan korporasi nasional selama pandemi. Dalam kaitan ini, diperlukan upaya untuk memperkuat diplomasi ekonomi yang dikoordinasi oleh Kementerian Luar Negeri dengan dukungan dan kerja sama berbagai elemen di level nasional dan internasional.

Dalam rangka mendorong penguatan kerja sama dengan negara mitra dalam membantu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, juga terdapat peluang bagi Indonesia untuk dapat menjadi negara tujuan alternatif dalam *outbound investment*, serta sistem *global supply chain* bagi negara-negara di Kawasan Eropa Timur dan Tenggara (ETT), seperti Rusia, Turki, Ukraina, dan Belarus.

Selain itu, total nilai investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) negara mitra di kawasan ETT ke Indonesia pada tahun 2019 mencapai US\$ 43,07 juta, naik signifikan sebesar 394% dari nilai FDI tahun 2018 sebesar US\$ 8,72 juta.

Rusia merupakan negara di Kawasan Eropa Timur dan Tenggara yang memiliki potensi kerja sama di bidang investasi. Pada tahun 2019, nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai US\$18,4 juta pada 92 proyek, meningkat 776% dari tahun sebelumnya sebesar US\$ 2,1 juta pada 46 proyek.

Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga komitmen investasi Rusia di Indonesia, khususnya proyek investasi berskala besar yang telah berjalan yaitu: a) Proyek *New Grass Root Refinery (NGRR)* Pertamina-Rosneft di Tuban dengan nilai investasi US\$ 15,7 miliar dan direncanakan *on-stream* pada 2025; dan b) Proyek Jalur Kereta Api Borneo di Kalimantan Timur dengan nilai investasi US\$ 5,51 milyar.

Selain Rusia, negara mitra di ETT yang menunjukkan peningkatan signifikan realisasi di Indonesia adalah Turki. Pada tahun 2019, investasi Turki di Indonesia mencapai US\$ 24,82 juta, naik 564% dari tahun sebelumnya senilai US\$ 3,74 juta.

Negara mitra potensial lainnya adalah Belarus, khususnya produsen *dump truck* (BelAZ). Indonesia dapat memanfaatkan kemampuan sektor manufaktur otomotif dalam negeri untuk menyuplai suku cadang produksi BelAZ di kawasan Asia Pasifik.

Ke depan, Indonesia akan semakin memperkuat upaya diplomasi ekonominya, terutama melalui penyusunan perjanjian internasional di bidang ekonomi antara Indonesia dengan berbagai negara mitra, seperti FTA/CEPA, *preferential trade agreement* (PTA), *bilateral investment treaty* (BIT) dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), lingkungan

hidup, dan pembangunan yang berkesinambungan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk rintisan kemajuan ekonomi Indonesia, terutama guna memperluas akses pasar produk Indonesia (terutama akses pasar non-tradisional), meningkatkan nilai ekspor Indonesia, serta mendongkrak nilai investasi baik investasi asing dalam negeri maupun investasi yang dilakukan investor Indonesia di negara mitra (*outbound investment*).

### 3.1.4 Kebudayaan dan Karakter Bangsa

Kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan negarabangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya saing sehingga mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Kebudayaan adalah penanda yang menegaskan identitas dan jati diri suatu bangsa, yang tercermin pada karakter dan mental individu dan masyarakat. Pengalaman bangsa-bangsa di dunia menunjukkan bahwa karakter dan sikap mental dapat menjadi faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi. Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental, yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat.

Dalam rangka mendukung penguatan budaya dan karakter bangsa, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait terus mendorong peningkatan kerja sama bidang pendidikan baik pada tingkat dasar, menengah dan tinggi termasuk pendidikan vokasi di berbagai sektor dalam rangka menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang handal yang mampu bersaing di dunia global.

Dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024, upaya pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa terus dilanjutkan yang tidak hanya bertumpu pada satuan pendidikan semata. Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa dilaksanakan secara lebih holistik dan integratif melalui pemajuan kebudayaan, pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan agama dan etika, pendidikan kewarganegaraan dan bela negara, peningkatan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama, peningkatan peran keluarga dan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan budaya literasi dengan melibatkan segenap komponen bangsa.

Namun, kekayaan budaya belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Kontribusi ekspor ekonomi budaya terhadap total ekspor nasional masih rendah yaitu sebesar 13,77 persen (2016), dan kontribusi ekonomi budaya terhadap PDB juga masih rendah yaitu sebesar 7,44 persen atau Rp 922,59 triliun (2016). Belum optimalnya pendayagunaan kekayaan budaya menjadikan Indonesia sebagai konsumen budaya global. Sebagai negara adidaya di bidang kebudayaan, Indonesia semestinya dapat mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Pemanfaatan kekayaan kebudayaan guna mendukung peningkatan perekonomian juga dapat dilaksanakan di sektor pariwisata. Indonesia secara aktif telah turut serta dalam

proses pembentukan instrumen internasional *Framework Convention on Tourism Ethic* dalam forum *UN World Tourism Organization* (UNWTO) yang memberikan panduan 9 (sembilan) prinsip pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, termasuk pariwisata sebagai pengguna kebudayaan yang berkontribusi terhadap kemajuannya.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya arah kebijakan meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, melalui:

- (1) Pengembangan revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal,
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat,
- (3) Pelindungan hak kebudayaan dan kebebasan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif,
- (4) Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim,
- (5) Pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia.



**Sumber: KBRI Buenos Aires**

(<https://kemlu.go.id/portal/id/read/1137/berita/festival-gastronomi-indonesia-diselenggarakan-di-dua-kota-di-argentina>)

Secara spesifik, Kemenlu turut serta berkontribusi pada pencapaian PP 2: Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat.

## 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/ Lembaga

### 3.2.1. Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri

1. Peningkatan optimalisasi nilai manfaat diplomasi ekonomi melalui hubungan luar negeri
2. Peningkatan pengaruh kepemimpinan dan peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional
3. Penguatan integritas NKRI dan diplomasi politik keamanan
4. Peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional
5. Peningkatan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dan pelayanan publik
6. Peningkatan dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional
7. Penguatan diplomasi sosial budaya
8. Penguatan Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang sistematis
9. Penguatan kerja sama pembangunan internasional
10. Peningkatan Infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi

### 3.2.2. Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri

1. Arah kebijakan peningkatan optimalisasi nilai manfaat diplomasi ekonomi melalui hubungan luar negeri memiliki strategi:
  - i. Memanfaatkan pasar domestik sebagai daya tawar untuk menjalin kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di tingkat bilateral maupun regional.
  - ii. Memperkokoh kerja sama ekonomi yang strategis dan saling menguntungkan dengan pasar utama dan langkah terobosan untuk menembus pasar potensial, antara lain melalui penyelesaian berbagai perundingan CEPA/FTA/PTA yang akan memberikan manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia dan implementasi program tindak lanjut dari berbagai ProPN yang telah dilaksanakan, yaitu: *Indonesia-Africa*

*Forum* (IAF), *Indonesia-Africa Maritime Dialogue* (IAMD) dan *Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue* (IAID). Fokus utama kegiatan ini adalah ke negara-negara di Kawasan Afrika yang memiliki *business deals* dengan Indonesia, khususnya terkait sektor kerja sama infrastruktur, farmasi, transportasi, serta minyak dan gas.

- iii. Mengintegrasikan promosi perdagangan dan investasi yang lebih terarah dan memberikan hasil yang konkret.
- iv. Meningkatkan keterlibatan pelaku usaha daerah, salah satunya dengan memfasilitasi para pemangku kepentingan dengan melakukan *link and match* antara permintaan pasar (*business inquiries*) dengan potensi yang bisa dipenuhi oleh pelaku usaha daerah, termasuk melakukan diseminasi informasi dan memberdayakan potensi daerah dengan memanfaatkan kegiatan promosi di luar negeri.
- v. Mendorong, memetakan potensi dan memfasilitasi investasi dari luar negeri (*inbound investment*) pada sektor-sektor prioritas bagi Indonesia dan *outbond investment* ke luar negeri yang sinergis dengan kepentingan ekonomi nasional.
- vi. Memfasilitasi perundingan dan mendukung percepatan penyelesaian penyusunan Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) bilateral untuk melindungi investasi Indonesia di luar negeri.
- vii. Mempromosikan pengembangan industri halal Indonesia ke luar negeri.
- viii. Mendorong kerjasama dengan negara-negara mitra untuk produksi dan pengadaan alat kesehatan serta obat-obatan di Indonesia.
- ix. Mendorong produk unggulan yang berorientasi ekspor serta mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan industri strategis ke luar negeri.
- x. Menolak berbagai tindakan diskriminatif yang ditujukan kepada komoditas unggulan Indonesia.
- xi. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong industri digital, ekonomi kreatif, dan pengembangan SDM Indonesia untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 4.0.
- xii. Mendorong perumusan rekomendasi dan prakarsa terkait pengelolaan perundingan berbagai kerja sama ekonomi seperti *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) termasuk *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sesuai dengan kepentingan nasional.

- xiii. Mendorong tercapainya kerja sama ekonomi *Preferential Trade Agreement* (PTA) Indonesia dengan negara-negara pasar non-tradisional di berbagai kawasan dunia, termasuk Pasifik Selatan melalui finalisasi dan implementasi PTA Indonesia – Fiji dan PTA Indonesia – Papua Nugini (PNG).
- xiv. Mendorong pemanfaatan peluang ekonomi, perdagangan dan investasi dari persaingan dagang Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS).
- xv. Memanfaatkan kekuatan Indonesia sebagai basis produksi industri manufaktur, antara lain baterai lithium, petrokimia, otomotif dan suku cadang, besi baja, dan tekstil, dalam memperluas pasar ke kawasan negara-negara yang terbatas atau tidak memiliki basis produksi industri manufaktur tersebut.
- xvi. Memanfaatkan instrumen kebijakan dari negara-negara/wilayah akreditasi untuk kepentingan ekonomi RI, a.l *Belt and Road Initiative* (RRT), *New Southbound Policy* (Taiwan), *New Southern Policy* (RoK), *Specified Skilled Workers* (Jepang), *Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific / AIFFP* (Australia).
- xvii. Memanfaatkan persaingan kepentingan ekonomi Jepang, RRT, RoK, Australia, dan Taiwan di Indonesia untuk mendukung pembangunan proyek-proyek strategis nasional dengan tawaran kerja sama yang lebih kompetitif.
- xviii. Mengembangkan kerja sama triangular antara Indonesia dengan mitra tradisional ke kawasan Pasifik, baik dalam skema G-to-G maupun B-to-B.
- xix. Mendorong pencapaian cetak biru MEA 2025 melalui peningkatan kerja sama ekonomi kawasan yang meliputi sektor Perdagangan, Industri, Hak Kekayaan Intelektual, Keuangan, Transportasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Telekomunikasi, Pertanian, Kehutanan, Sumber Daya Energi dan Mineral, Konektivitas, Investasi, Pariwisata, UMKM, dan Kerja Sama Sub-Kawasan ASEAN serta memberikan saran kebijakan terkait implementasinya kepada pemangku kepentingan di Indonesia.
- xx. Meningkatkan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional.

- xxi. Memperkuat peran Indonesia dalam perundingan untuk pembentukan dan peninjauan kembali kerangka hukum internasional (*international legal framework*) di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral.
- xxii. Memanfaatkan forum kerja sama global, regional dan sub-regional, misalnya IORA, APEC dan CTI-CFF untuk mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan laut melalui pembahasan isu *blue economy* serta mendorong implementasi prakarsa Indonesia di bawah forum kerja sama global, kerja sama IORA pada area-area prioritas *Fisheries Management* dan *Blue Economy*, *APEC Initiative on Mainstreaming Ocean-related Issues* (MOI), serta pembentukan mekanisme pendanaan berkelanjutan dan *Regional Plan of Action (RPoA) 2.0 CTI CFF*.
- xxiii. Mendorong implementasi kerja sama konkret dan *immediate* pada organisasi regional seperti APEC, IORA, CTI-CFF, IMT-GT, dan BIMP-EAGA, guna membantu percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
- xxiv. Memperkuat peran Indonesia dalam koordinasi kebijakan ekonomi global melalui forum G-20.
- xxv. Memastikan pengakuan dan keberterimaan ISPO sebagai sertifikasi yang diakui di Uni Eropa.
- xxvi. Mendorong penguatan dan optimalisasi implementasi hasil perundingan kerja sama perdagangan dan investasi di antara negara anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan Negara-Negara Mitra, khususnya dalam mendukung kebijakan pemulihan ekonomi seluruh negara ASEAN dan Mitra Wicara pasca pandemi COVID-19 melalui komitmen dan kerja sama untuk mendorong stimulasi resiliensi ekonomi, melalui: terus membuka perdagangan dan investasi, pembangunan infrastruktur, relaksasi kredit di sektor keuangan dan perbankan, memulihkan kepercayaan pasar, dan perlindungan terhadap pekerja.
- xxvii. Mendorong penguatan dan peningkatan kerja sama Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Kawasan ASEAN.
- xxviii. Mendorong penyelesaian dan implementasi *ASEAN Trade in Services Agreement* (ATISA) sebagai pedoman kerja sama perdagangan jasa ekonomi di ASEAN.
- xxix. Mendorong percepatan penyelesaian proyek-proyek di bawah kerja sama bidang konektivitas dalam lingkup *Master Plan of ASEAN Connectivity* (MPAC) 2025.

- xxx. Optimalisasi diplomasi sawit akan dilakukan melalui empat pendekatan, yaitu: Advokasi, Negosiasi, Litigasi, dan Penelitian.
  - xxxi. Pemanfaatan kontribusi Indonesia pada MPP PBB untuk mendorong pengembangan industri strategis nasional di bidang pertahanan.
2. Arah Kebijakan peningkatan pengaruh kepemimpinan dan peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional, memiliki strategi sebagai berikut:
- i. Memperkuat kerja sama multilateral dalam isu keamanan dan perdamaian internasional di berbagai badan utama dan subsider PBB serta forum internasional terkait lainnya.
  - ii. Mendorong pemajuan dan perlindungan HAM baik di tingkat kawasan maupun global. Kepentingan nasional dan negara berkembang akan menjadi rujukan kerjasama.
  - iii. Meningkatkan kapasitas negara-negara dalam penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM.
  - iv. Memperkuat kemitraan yang sinergis dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM periode 2020-2024.
  - v. Mendorong Dewan HAM PBB agar lebih efisien dan efektif, lebih objektif, transparan, adil, non-politis dan imparisial, serta membuka dialog dengan seluruh pihak dan berorientasi pada hasil.
  - vi. Memperkuat kerja sama multilateral pada Dewan HAM PBB dengan memastikan kedaulatan dan integritas NKRI terjaga pada pembahasan isu hak menentukan nasib sendiri (*right to self determination*), *indigenous people* dan pelanggaran HAM.
  - vii. Memperkuat kepemimpinan Indonesia dalam bidang pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam kerangka kerja sama bilateral, regional dan multilateral, terutama melalui implementasi Instrumen HAM internasional seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women/CEDAW*), serta komitmen berbagai kesepakatan internasional seperti BPfA dan SDGs.
  - viii. Mempromosikan perlindungan pekerja migran, khususnya perempuan, termasuk memfasilitasi berbagai resolusi PBB di Dewan HAM PBB maupun Komite III MU PBB untuk menghilangkan kekerasan terhadap pekerja migran.

- ix. Mendorong keterwakilan WNI pada posisi strategis di badan-badan internasional baik secara profesional maupun melalui keterlibatan aktif dalam kelompok kerja dan penyusunan norma-norma di tingkat internasional.
- x. Memanfaatkan kehadiran Indonesia pada forum multilateral yang bersifat lepas untuk meningkatkan kerja sama untuk mengatasi berbagai permasalahan global.
- xi. Memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada forum internasional dan regional untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang.
- xii. Mendorong finalisasi penyusunan *East Asia Summit (EAS) Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris* sebagai upaya tindak lanjut dari *EAS Leaders's Statement on Combating Marine Plastic Debris* yang diadopsi para Pemimpin Negara EAS pada KTT East Asia Summit ke-13 di Singapura 2018.
- xiii. Memaksimalkan posisi Indonesia sebagai *country coordinator* kerja sama kemitraan ASEAN-Rusia periode 2018-2021, *country coordinator* kerja sama kemitraan ASEAN-Amerika Serikat periode 2021-2023, dan *country coordinator* kerja sama kemitraan ASEAN-Pacific Alliance 2020, untuk mendorong penguatan dan pengembangan kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara dimaksud, yang sejalan dengan kepentingan Indonesia.
- xiv. Mendorong Mitra Wicara ASEAN untuk mendukung implementasi 4 prioritas kerja sama yang tertuang dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* yaitu kerja sama Maritim, *Sustainable Development Goals (SDGs)*, Konektivitas dan Ekonomi.
- xv. Menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) di tiga pilar ASEAN untuk mengimplementasikan Visi Masyarakat ASEAN 2025, serta mengawal pelaksanaan RAN sejalan dengan kepentingan nasional.
- xvi. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan melalui mekanisme ASEAN, terutama mendorong implementasi secara efektif dan menyeluruh *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC)*, termasuk penyelesaian *Code of Conduct in the South China Sea (COC)* yang efektif, substantif dan *actionable*.

- xvii. Terus memajukan prakarsa Indonesia dalam memperkuat arsitektur keamanan di kawasan dan memastikan dukungan terhadap implementasi *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.
- xviii. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong stabilitas kawasan dan sentralitas ASEAN dalam penanganan isu-isu keamanan tradisional and non-tradisional melalui *ASEAN Regional Forum (ARF)*, termasuk mendorong ARF untuk berperan dalam pewujudan kerja sama yang telah diidentifikasi dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*.
- xix. Mendorong penguatan mandat AICHR dalam pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan.
- xx. Memanfaatkan keketuaan Indonesia di ASEAN dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan nasional.
- xxi. Memanfaatkan keketuaan Indonesia pada *Foreign Policy and Global Health (FPGH)* dengan mengusung tema "*Affordable Health Care*".
- xxii. Mendorong pelaksanaan Indonesia – South Pacific Forum (ISPF) secara reguler, dapat diselenggarakan tiap tahun atau dua tahun sekali, dengan tujuan mendekatkan Indonesia dengan negara-negara Pasifik Selatan karena Indonesia pada hakekatnya juga bagian dari kawasan itu, serta untuk tujuan penggalangan dukungan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dalam mengeliminir masalah separatisme Papua, dan upaya penetrasi pasar kawasan itu bagi produk-produk dan investasi Indonesia.
- xxiii. Memanfaatkan keketuaan Indonesia pada *8<sup>th</sup> Bali Process Ministerial Conference (BPMC VIII)* yang bertujuan untuk memperkuat dukungan penyelesaian masalah migrasi ireguler.
- xxiv. Memperkuat diplomasi dalam mendorong upaya penyelesaian konflik di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, antara lain konflik di Rakhine State, Myanmar, konflik Palestina-Israel serta *peacebuilding* di Afghanistan melalui forum bilateral, regional, dan multilateral.
- xxv. Mendorong penguatan mandat AICHR, sebagai *overarching body* dalam pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan termasuk dalam pengarusutamaan HAM di seluruh kegiatan *ASEAN Sectoral Bodies (ASB)* sesuai dengan *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)* dalam rangka mewujudkan komunitas ASEAN.
- xxvi. Meningkatkan peran Indonesia baik melalui mekanisme bilateral maupun ASEAN dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar guna tercapainya repatriasi yang aman, sukarela, dan

- bermartabat bagi para pengungsi serta mendorong terciptanya stabilitas keamanan di Rakhine State.
- xxvii. Meningkatkan kerja sama dan *trust-building* di kawasan Indo-Pasifik yang terfokus pada pengembangan kerja sama kemaritiman, konektivitas dan infrastruktur, serta pembangunan.
  - xxviii. Mempererat hubungan dan kerja sama dengan kawasan Pasifik termasuk melalui forum-forum regional seperti PIF, MSG, CTI CFF, PIDF, dan SwPD yang berfokus antara lain pada bidang pembangunan, ekonomi, kemaritiman, konektivitas, SDGs, perubahan iklim, lingkungan sosial budaya, politik dan keamanan.
  - xxix. Menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda *Women, Peace and Security* di tingkat regional yang disinkronisasikan dengan agenda global melalui pembentukan dan penguatan *The Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators*.
3. Arah Kebijakan penguatan integritas NKRI dan diplomasi politik keamanan, memiliki strategi antara lain:
- i. Meningkatkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
  - ii. Memperkuat kerja sama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, antara lain: penyakit menular, penghapusan senjata pemusnah massal dan pengaturan senjata konvensional, degradasi lingkungan, perubahan iklim, kelangkaan air, krisis pangan dan energi.
  - iii. Meningkatkan kerjasama penanggulangan terorisme melalui pendekatan *soft-power/deradikalisasi* dengan cara peningkatan kapasitas pencegahan dan deradikalisasi, serta kerjasama hukum dengan negara mitra.
  - iv. Memperkuat kebijakan luar negeri Indonesia melalui pembangunan narasi dan pendapat hukum dalam mendukung integritas wilayah NKRI.
  - v. Memperkuat dan mempertahankan posisi Indonesia dalam Jajaran Sepuluh Besar Negara Kontributor Misi Pemeliharaan Perdamaian (*peacekeeping*) PBB melalui penguatan profesionalisme dan kapasitas personel, penambahan jumlah personel perempuan dan peningkatan kerja sama bilateral, regional dan internasional.

- vi. Mendukung kerja sama pertahanan di lingkup bilateral, regional dan internasional pada aspek hukum dalam rangka penguatan integritas NKRI dan peningkatan kemampuan industri pertahanan Indonesia.
- vii. Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional termasuk kerja sama penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan transnasional, seperti: korupsi, terorisme, penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, perompakan perdagangan senjata ilegal, *illegal fishing*.
- viii. Meningkatkan diplomasi Indonesia di bidang keamanan siber dalam kerangka PBB dan ASEAN, serta mendorong pembahasan dan implementasi norma-norma sukarela dan tidak mengikat di ruang siber.
- ix. Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM serta toleransi agama di forum Internasional.
- x. Meningkatkan kerja sama konektivitas kawasan melalui IORA, APEC, ASEAN, ASEM, FEALAC.
- xi. Memperkuat kerja sama sub-kawasan (BIMP-EAGA, IMT-GT, dsb) untuk meningkatkan konektivitas Indonesia.
- xii. Mendorong peningkatan kerja sama dalam bidang keamanan dan keselamatan laut, serta *search and rescue*, penanganan bencana di laut, serta perlindungan lingkungan laut.
- xiii. Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim melalui mekanisme regional seperti *ASEAN Maritime Forum*, *Expanded ASEAN Maritime Forum* dan/atau mekanisme lainnya.
- xiv. Meningkatkan upaya penyelesaian penetapan batas Indonesia dengan negara tetangga, termasuk penegasan batas darat dengan 3 negara dan penetapan batas maritim dengan 10 negara tetangga, serta pembuatan perjanjian penetapan batas, pemberlakuan dan pendaftarannya ke PBB.
- xv. Memantapkan implementasi Traktat *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ) dan *Plan of Action 2018-2022* serta mendorong ratifikasi Protokol Traktat SEANWFZ oleh *Nuclear-Weapon States*.
- xvi. Mendorong universalisasi TAC (*Treaty of Amity and Cooperation*) dan implementasi *Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for Mutually Beneficial Relations* (*Bali Principles*) ke kawasan yang lebih luas.

- xvii. Meningkatkan upaya menciptakan situasi yang kondusif di Laut China Selatan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982, termasuk melalui peningkatan *Practical Maritime Cooperation* antara ASEAN dan RRT.
- xviii. Mengedepankan kerja sama dan dialog serta meminimalisasi konfrontasi dan politisasi; pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang diimbangi dengan pendekatan kultural dan keagamaan di forum kerja sama ASEAN.
- xix. Mendorong kontribusi dan pemanfaatan negara-negara anggota ASEAN dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ASEAN-IPR dalam membangun perdamaian dan resolusi konflik di kawasan.
- xx. Mendorong penguatan dan peningkatan kerja sama pertahanan di ASEAN melalui *mekanisme ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM)* dan ADMM-Plus.
- xxi. Mendorong penguatan dan peningkatan kerja sama penanganan kejahatan lintas batas di kawasan melalui berbagai mekanisme seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* dan *ASEAN Ministerial Meeting on Drug Matters (AMMD)*.
- xxii. Mendorong implementasi *ASEAN Plan of Action (PoA) to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism 2018-2025* beserta *Work Plan to Implement ASEAN Plan of Action (PoA) Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism 2018-2025* atau '*Bali Work Plan*'.
- xxiii. Mendorong Kemitraan antara Parlemen dan Pemerintah dan antar-Parlemen Negara Anggota ASEAN (AIPA) dalam memastikan keselarasan berbagai kesepakatan di ASEAN.
- xxiv. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan upaya-upaya *peace-making* di berbagai tataran melalui pengembangan kemitraan dengan jaringan dan organisasi mediasi di tingkat regional dan global lainnya.
- xxv. Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama ASEAN dengan mitra wicara ASEAN serta *ASEAN-led mechanisms* secara lebih produktif dan konstruktif bagi penciptaan arsitektur kawasan yang sejalan dengan kepentingan nasional.

4. Arah kebijakan peningkatan citra positif Indonesia di dunia internasional, memiliki strategi yaitu:
  - i. Melakukan penyusunan *Grand Design Soft Power Diplomacy* Indonesia.
  - ii. Meningkatkan peran serta aktor *non* pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.
  - iii. Memperkuat peran Kemenlu dan Perwakilan RI dalam meningkatkan promosi pada 6 (enam) dimensi citra yaitu *governance, investment and immigration, export, tourism, culture* dan *people*.
  - iv. Memanfaatkan *soft power diplomacy* dalam memperkuat peran dan postur Indonesia di tataran regional dan global guna mendukung diplomasi ekonomi dan pencapaian kepentingan strategis Indonesia.
  - v. Memanfaatkan kerja sama pembangunan internasional dalam memperkuat citra Indonesia sebagai *southern provider*.
  - vi. Memanfaatkan jaringan media konvensional dan digital dalam mempromosikan citra Indonesia di luar negeri.
  
5. Arah kebijakan peningkatan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dan pelayanan publik, memiliki strategi, antara lain:
  - i. Memastikan kehadiran negara melalui pembentukan sistem perlindungan WNI di luar negeri dalam rangka pelayanan publik dan perlindungan WNI di luar negeri yang berbasis semangat kepedulian dan keberpihakan dengan fokus peningkatan pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat guna mewujudkan pelayanan yang tepat, mudah, murah dan akurat, serta sesuai peraturan perundang-undangan.
  - ii. Investasi pada aspek pencegahan melalui pembangunan inovasi dan integrasi sistem informasi pelayanan publik dan perlindungan WNI.
  - iii. Memperkuat sistem kelembagaan perlindungan WNI dan pelayanan publik di luar negeri dengan fokus pada pembangunan standarisasi, norma, kebijakan, kapasitas dan profesionalitas SDM, serta sistem monitoring dan evaluasi.
  - iv. Mengoptimalkan diplomasi perlindungan WNI di luar negeri melalui pembentukan dan implementasi instrumen hukum serta kerja sama di tataran nasional dan internasional, guna meningkatkan perlindungan WNI di luar negeri, termasuk melalui pembangunan tata kelola migrasi aman, reguler dan teratur.

- v. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya di segala lapisan, baik di dalam dan luar negeri.
  - vi. Memperkuat sarana dan prasarana penunjang perlindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik.
6. Arah kebijakan peningkatan dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional, memiliki strategi yaitu:
- i. Mendorong penyempurnaan norma hukum nasional yang mengatur mengenai diplomasi, hubungan luar negeri dan pembentukan perjanjian internasional, khususnya melalui revisi UU tentang Hubungan Luar Negeri dan UU tentang Perjanjian Internasional.
  - ii. Menggagas serta mengawal pembentukan norma-norma hukum nasional yang bersentuhan serta berimplikasi dengan hubungan luar negeri.
  - iii. Memantapkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai penjuror dalam perumusan kebijakan luar negeri dan sebagai fungsi koordinator dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.
  - iv. Menguatkan peran Kementerian Luar Negeri sebagai juru runding dan penasehat hukum (*legal adviser*) dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri, pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dengan negara asing dan/atau organisasi internasional.
  - v. Memperkuat fungsi koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang Masyarakat ASEAN, memantapkan posisi nasional dalam pertemuan ASEAN, serta implementasi kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.
  - vi. Meningkatkan peran dan kontribusi Pusat Studi ASEAN dan lembaga *think tank* lainnya dalam perumusan kebijakan nasional terkait kerja sama ASEAN.
7. Arah Kebijakan penguatan Diplomasi Sosial Budaya, memiliki strategi yakni:
- i. Memperkuat strategi diplomasi publik Indonesia melalui kerja sama sosial kebudayaan, promosi kuliner, promosi nilai-nilai Indonesia (terutama kearifan Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan *Indonesia Homegrown Democracy*), pemberian beasiswa, dialog lintas agama, *people to people contact*, jejaring *diaspora* Indonesia dan *Indonesianist*.

- ii. Mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk memperkuat diplomasi publik.
- iii. Melakukan kerja sama dengan K/L terkait dalam memperkuat rumah budaya Indonesia di Luar Negeri melalui pemberdayaan *Friends of Indonesia*, jaringan diaspora Indonesia dan *Indonesianist*.
- iv. Melibatkan diaspora maupun WNI di luar negeri dalam mendukung diplomasi budaya RI.
- v. Melakukan kerja sama dengan K/L lainnya dalam penyusunan *grand design* terpadu dan *bussiness plan gastrodiploamacy* Indonesia.
- vi. Mendorong tumbuhnya *enterpreneur* gastronomi pemula.
- vii. Melakukan kerja sama dengan K/L lain untuk mendorong fasilitasi bantuan pemerintah dalam mendukung bisnis kuliner di luar negeri.
- viii. Meningkatkan kerja sama penanganan asap lintas batas melalui mekanisme ASEAN dengan mendorong pembentukan *ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC)*.
- ix. Mendorong implementasi *Action Plan* dari *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (ASEAN Consensus)*.
- x. Memperjuangkan diadopsi dokumen *the Narrative of ASEAN Identity* di tingkat Pemimpin ASEAN.
- xi. Meningkatkan kerja sama penanggulangan bencana di kawasan ASEAN dengan mendorong tercapainya *ASEAN Vision 2025 on Disaster Management*.
- xii. Mendorong implementasi *ASEAN Communication Master Plan II (2018-2025)* di Indonesia dalam rangka upaya peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia tentang ASEAN.
- xiii. Mendorong finalisasi dan implementasi strategi nasional multi-sektoral terkait penanganan penyakit tidak menular (*non-communicable diseases/NCD*) di negara-negara anggota ASEAN.

8. Arah kebijakan Penguatan Diplomasi Digital dan Pengelolaan Informasi Hubungan Luar Negeri yang sistematis, memiliki strategi antara lain:
  - i. Menginisiasi pembentukan *Regional Network on Digital Diplomacy* sebagai *platform* bersama untuk mempermudah negara-negara di kawasan berbagi *best practices* mengenai diplomasi digital.
  - ii. Membentuk Jakarta *Message on Regional Cooperation in Digital Diplomacy* yang memuat komitmen bersama untuk memanfaatkan diplomasi digital guna membangun dunia yang inklusif, berkelanjutan, aman, makmur, dan inovatif.
  - iii. Melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dan *non*-pemerintah untuk membangun aplikasi monitoring berita dan informasi dari Perwakilan RI di seluruh dunia.
  - iv. Melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan inisiasi program pembangunan kapasitas untuk menciptakan diplomat-diplomat yang *digital-savy*.
  - v. Melakukan kerja sama dengan Australia atau negara lainnya di bidang diplomasi digital sebagai tindak lanjut RCDD (*Regional Conference on Digital Diplomacy*).
  
9. Arah Kebijakan penguatan Kerja sama pembangunan internasional, memiliki strategi, antara lain:
  - i. Menyesuaikan struktur organisasi unit kerja di Kemenlu yang menangani Kerja Sama Pembangunan Internasional agar dapat memiliki peran yang lebih strategis dan bekerja secara lebih efektif.
  - ii. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional dengan mengoptimalkan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular untuk mendukung diplomasi ekonomi (peningkatan perdagangan dan investasi) serta kepentingan strategis Indonesia.
  - iii. Mendorong pelibatan pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk BUMN dan pelaku usaha swasta nasional Indonesia dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional guna mendukung perdagangan dan investasi serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
  - iv. Mengembangkan pendekatan multipihak (KMP) dalam memajukan kepentingan Indonesia dalam kerja sama pembangunan internasional dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

- v. Meningkatkan penggunaan mekanisme dan sumber-sumber pendanaan baru, termasuk lembaga penyedia pembiayaan ekspor, dalam pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional yang mendukung kepentingan strategis Indonesia.
  - vi. Memperkuat kedudukan dan peran Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia (Indonesian AID) sebagai alat diplomasi Indonesia.
  - vii. Memperkuat kemitraan Indonesia dengan mitra pembangunan Internasional melalui promosi program-program kerja sama pembangunan dan bantuan teknik Indonesia.
  - viii. Mempromosikan berbagai *centers of excellence* di Indonesia sebagai *southern provider* dari pelaksanaan KPI/KSS Indonesia untuk membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih besar dengan sesama negara berkembang.
  - ix. Memberikan bantuan hibah kepada negara berkembang.
  - x. Turut serta aktif dalam promosi dan penyusunan norma-norma global mengenai kerja sama pembangunan internasional.
10. Arah kebijakan peningkatan infrastruktur diplomasi berbasis teknologi informasi, memiliki strategi antara lain:
- i. Melakukan penataan organisasi yang adaptif sesuai dinamika tuntutan polugri, peningkatan kualitas perencanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja, dan tata kelola Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.
  - ii. Meningkatkan implementasi dan integrasi sistem manajemen kinerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI berbasis teknologi informasi.
  - iii. Mewujudkan manajemen SDM Kementerian Luar Negeri yang berbasis merit, akuntabel, kredibel, dan transparan.
  - iv. Memperluas kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Kementerian Luar Negeri serta meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Luar Negeri melalui pengembangan keahlian khusus yang mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri.
  - v. Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi berdasarkan Ristik Kementerian Luar Negeri.
  - vi. Meningkatkan anggaran Kementerian Luar Negeri dan memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja.

- vii. Memperkuat pengarusutamaan gender dalam organisasi, khususnya penganggaran yang mengadopsi pengarusutamaan gender, dalam rangka membangun sistem manajerial dan infrastruktur yang responsif terhadap isu pengarusutamaan tersebut.
- viii. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, aset dan barang guna meningkatkan kinerja Kementerian Luar Negeri.
- ix. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
- x. Meningkatkan tata kelola pengawasan intern berbasis risiko.

### 3.2.3. Strategi Kebijakan Kementerian Luar Negeri terkait Penanggulangan Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang mulai awal tahun 2020 telah berdampak besar terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia.

Dampak pandemi COVID-19 juga berdampak besar terhadap perekonomian nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2020 menyusut hingga 2,97% dan diperkirakan akan masih tertekan hingga selesainya pandemi. Pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia guna mengatasi penyebaran COVID-19 telah mengakibatkan kegiatan/aktivitas perekonomian menurun drastis, dan mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap lalu-lintas barang dan jasa.

Indonesia perlu mengantisipasi dampak ekonomi paska COVID-19 dan oleh karena itu dibutuhkan penguatan kerja sama internasional, solidaritas global, dan kolaborasi, termasuk langkah-langkah konkrit penanganan COVID-19, dalam rangka pemulihan ekonomi yang sangat vital.

Terkait hal tersebut, industri kesehatan memegang peran penting sebagai salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun industri kesehatan mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar, namun industri ini pengembangannya dirasa belum optimal, dimana lebih dari 90% bahan baku baik untuk obat maupun alat kesehatan masih diimpor. Untuk mendukung pengembangan industri kesehatan menuju kemandirian, diplomasi ekonomi Indonesia akan ditujukan untuk mengatasi tantangan pengembangan industri kesehatan mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan pencapaian *health security* yang difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Upaya tersebut dilakukan melalui diplomasi ekonomi di tingkat bilateral, regional maupun multilateral dengan pemetaan mitra potensial baik negara, organisasi internasional, maupun sektor swasta, dan pengawalan perjanjian internasional serta penguatan outbound investment RI dan mendorong daya saing industri kesehatan menuju kemandirian nasional

dan tercapainya health security, termasuk melalui upaya registrasi obat Indonesia di negara mitra.

Salah satu kerja sama yang saat ini sedang dirintis adalah tindak lanjut tawaran dari pihak Ukraina untuk mengembangkan kerja sama skema *business to business* penyediaan alat kesehatan/alkes (termasuk alat pelindung diri/APD) dari Indonesia guna menanggulangi kebutuhan Ukraina.

Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) dan mendapatkan tanggapan positif untuk bekerja sama dengan Ukraina.

Gakeslab menyatakan kesiapannya untuk melakukan produksi, ekspor-impor, distribusi, dan keagenan alat kesehatan dan laboratorium bekerja sama dengan perusahaan alkeslab Ukraina dan mencarikan mitra bagi perusahaan Ukraina yang akan berinvestasi membuka pabrik produksi alkes di Indonesia.

Selain itu, sebagai tindak lanjut hasil pembicaraan telepon Presiden RI dengan Presiden Rusia tanggal 13 April 2020, Pemerintah Rusia melalui surat Duta Besar Rusia di Jakarta yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI telah menyampaikan sejumlah usulan kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan industri, yaitu: Pertukaran informasi dan praktik terbaik pencegahan dan pemberantasan COVID-19; Penyelenggaraan konferensi video antara para ahli kedua negara; Kerja sama pembuatan vaksi antivirus dan obat-obatan untuk merawat pasien; dan Produksi peralatan medis, bahan medis dan obat-obatan.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI, menyambut baik tawaran kerja sama tersebut dan berpandangan usulan kerja sama tersebut agar dijajaki bersama sebagai bagian dari pembahasan draft MoU Kesehatan yang sedang berjalan antara Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan Rusia.

Kementerian Kesehatan RI selanjutnya menyatakan kesiapan untuk saling tukar informasi dan berbagi praktik terbaik serta membahas kerja sama potensial terkait respon terhadap COVID-19, dan rancangan naskah MoU Kesehatan Indonesia – Rusia melalui *video conference* antara pejabat dan para ahli kedua negara dalam waktu dekat.

Selain itu, terdapat peluang kerja sama produksi bersama farmasi dan alat kesehatan antara perusahaan Belpharmprom Belarus dengan calon mitranya di GP Farmasi Indonesia.

Dalam upaya pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi, di lingkup ASEAN telah menyelenggarakan *Special ASEAN Summit & Special ASEAN Plus Three Summit* pada 14 April 2020 yang salah satu hasilnya adalah mendorong negara-negara ASEAN untuk menyusun rencana pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Saat ini Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN tengah menyusun *Hanoi Plan of Action on Strengthening ASEAN Economic Cooperation and Supply Chain Connectivity in Response of COVID-19 Pandemic*.

Selain itu Kementerian Luar Negeri bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian terkait lainnya, serta sektor swasta *ASEAN-Business Advisory Council* dan *Joint Business Council* berencana untuk mengusulkan pembentukan *ASEAN High Level Special Commission (HLSC) on COVID-19 Response and Economic Recovery*.

Dalam perlindungan WNI, khususnya pekerja migran di ASEAN, Kemenlu bekerja sama dan mendukung Kementerian Tenaga Kerja RI untuk memastikan agar perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dalam kerangka ASEAN dapat terus dilakukan pasca pandemi COVID-19, termasuk upaya untuk menyusun *roadmap* kebijakan pemulihan stabilitas dan aksesibilitas pasar tenaga kerja pada tingkat nasional dan regional pasca pandemi COVID-19, usulan untuk membuat *guideline* yang baru untuk *Occupational Safety Health Network (OSHNET)* terhadap COVID-19 sesuai dengan protokol WHO, mendorong ASEAN untuk menjalin kerja sama dengan organisasi internasional dan mitra wicara ASEAN dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk ketahanan *supply chain* ASEAN, serta mendorong *Senior Labour Officials Meeting (SLOM)* untuk fokus pada upaya pemulihan aspek sosial-ekonomi pada sektor terdampak, khususnya pariwisata, manufaktur, transportasi, garmen, dan sektor informal.

Upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dilaksanakan pula melalui peningkatan dan pemanfaatan hubungan dan kerja sama dalam kerangka multilateral untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, antara lain melalui:

- a. Dalam berbagai forum multilateral, terus menyuarakan solidaritas dan kemitraan global dalam penanganan dan *recovery* dampak krisis pandemi COVID-19.
- b. Memastikan kelancaran perdagangan barang dan jasa tidak terhambat dengan aturan yang menyalahi ketentuan WTO.
- c. Mendorong keterbukaan iklim investasi bagi investor dalam negeri maupun FDI harus tetap terjaga.
- d. Menekankan pentingnya upaya kerja sama perdagangan, penelitian, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual, utamanya terkait diagnostik, obat-obatan dan vaksin atas COVID-19 yang dapat diakses oleh seluruh negara dan dengan harga yang terjangkau.
- e. Menekankan pentingnya perhatian khusus diberikan kepada UMKM karena mereka rentan terhadap dampak negatif COVID-19. UMKM harus dapat beradaptasi, mentransformasi bisnisnya, dan masuk ke dalam rantai pasok global.
- f. Kerja Sama Internasional untuk peningkatan kapasitas, utamanya UMKM dan ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki peran yang penting dalam menjamin berjalannya roda ekonomi pada saat krisis, terutama melalui platform *e-commerce*.
- g. Secara aktif menyuarakan kepentingan Indonesia dalam pembentukan *Post-Pandemic Recovery Plan* di tingkat kawasan maupun global.

Selain itu, dilakukan pula diseminasi informasi mengenai kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dalam penanganan COVID-19 termasuk juga upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 melalui saluran-saluran informasi Kemenlu, sosial media, dan juga Perwakilan RI.

## 3.3. Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

### 3.3.1 Kerangka Regulasi

Kementerian Luar Negeri untuk periode 2020-2024 memiliki arah kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, sebagai berikut: (a) Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; (b) Rancangan UU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; (c) RPerpres Perwakilan Rawan dan Berbahaya; (d) RPerpres tunjangan bagi PTRI ASEAN; (e) RPerpres tentang Kementerian Luar Negeri; (f) RPerpres tentang Organisasi Perwakilan RI; (g) Perpres tentang Setnas ASEAN; (h) RPerpres Tentang ADTLN; (i) RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat, Jabatan Penata Kanselera dan Pranata Informasi Diplomatik; (j) Permenlu tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri; (k) Permenlu tentang jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan; (l) Permenlu tentang organisasi dan tata kerja Perwakilan RI; (m) Permenlu tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya; (n) Permenlu Tentang Peraturan Pelaksana Perpres KKOI mengenai Pengelolaan Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI; (o) Keppres Pengukuhan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional; (p) Permenlu tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Kementerian Luar Negeri; (q) Permenlu tentang Tunjangan Kinerja Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri; (r) Permenlu tentang Penugasan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI ke Perwakilan RI; (s) Permenlu tentang Pegawai Perwakilan; (t) Permenlu tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing; (u) Permenlu tentang Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah/Lembaga Asing; (v) Permenlu tentang Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah Kepada Pemerintah/Lembaga Asing. Matriks Kerangka Regulasi sebagai terlampir pada dokumen Renstra ini.

### 3.3.2. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Kementerian Luar Negeri periode 2020-2024 diarahkan untuk terus memperkuat **organisasi berbasis fungsional** dan **birokrasi berbasis kinerja** (*performance-based bureaucracy*). Penguatan tersebut dilakukan sesuai dengan arahan Presiden dan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan, serta mempersiapkan Kementerian Luar Negeri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*) pada tahun 2025 sesuai target di tingkat nasional.

Pada periode Renstra sebelumnya (2015-2019), transformasi kelembagaan Kementerian Luar Negeri bertujuan untuk memperkuat birokrasi berbasis aturan (*rule-based bureaucracy*). Sebagai kelanjutan proses-proses sebelumnya, pemantapan kerangka kelembagaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia tetap dilakukan melalui penyelesaian/perubahan/penyusunan peraturan perundang-undangan secara integratif dan komprehensif, baik menyangkut organisasi dan tata kerja, proses bisnis, manajemen kinerja, maupun SDM aparatur dan jabatan fungsional.

Pencapaian kerangka kelembagaan dimaksud mencakup 3 (tiga) perspektif inti, yaitu:

#### i. Peningkatan kapasitas diplomasi

Dalam RPJMN 2020-2024, Indonesia memproyeksikan diri menjadi negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Kaidah Pembangunan Nasional 2020-2024 dalam membangun kemandirian diantaranya menyebutkan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang selalu aktif, dan terbuka dalam bekerja sama dalam memberikan pengaruh terhadap kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Perspektif tersebut semakin menegaskan komitmen Indonesia bahwa pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri harus memberikan manfaat yang nyata (*tangible*) bagi kemandirian negara dan kesejahteraan rakyat Indonesia, sebagaimana jargon “Diplomasi Untuk Rakyat” yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

Sejalan dengan proyeksi Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi, pelaksanaan politik dan hubungan luar negeri perlu mengoptimalkan peran Indonesia sebagai mediator/fasilitator konflik (instrumen politik), dan pemberi bantuan/hibah (instrumen ekonomi), yang akan memperkuat jati diri dan pengakuan (*recognition*) Indonesia sebagai negara berkekuatan menengah.

Ekspektasi pemangku kepentingan di dalam negeri terhadap kinerja diplomasi, ditambah dengan profil dan peran internasional Indonesia yang semakin kuat menuntut Kementerian Luar Negeri untuk semakin meningkatkan kapasitas diplomasi baik di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya, kekonsuleran. Untuk itu, diperlukan penguatan SDM dan anggaran secara signifikan, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

### **Penguatan SDM**

Keberhasilan strategi diplomasi Indonesia sangat bergantung pada SDM yang melaksanakan tugas-tugas pokok diplomasi, yaitu pejabat fungsional Diplomat, dan SDM pendukung kegiatan diplomasi, yaitu pejabat fungsional Penata Kanselera dan Pranata Informasi Diplomatik, serta jabatan fungsional lainnya di Kementerian Luar Negeri. Dalam rangka memperkuat SDM Kementerian Luar Negeri berdiplomasi sesuai dengan prioritas nasional dan amanat undang-undang, maka perlu terus diupayakan terpenuhinya kuantitas dan kualifikasi Diplomat, Penata Kanselera, dan Pranata Informasi Diplomatik yang profesional dan memenuhi standar kompetensi pada unit-unit organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan berdasarkan manajemen SDM berbasis merit yang akuntabel, kredibel, dan transparan.

Pemenuhan kebutuhan SDM dilakukan melalui rekrutmen berdasarkan analisis beban kerja di masing-masing unit kerja, termasuk di Perwakilan, *turnover* pegawai, dan kekosongan formasi untuk menentukan jumlah kebutuhan SDM Kementerian Luar Negeri. SDM yang dimiliki Kementerian Luar Negeri masing-masing harus dipertimbangkan sebagai aset yang bernilai dan harus diidentifikasi potensinya dan dikembangkan kompetensinya. Berdasarkan hasil identifikasi, pengembangan kompetensi, dan kinerja SDM, Kementerian Luar Negeri dapat memetakan dan menggerakkan asetnya agar kebutuhan organisasi terpenuhi dan tujuannya tercapai. Proses pengadaan dan pengembangan SDM tersebut merupakan bagian dari manajemen SDM berbasis merit yang juga menjadi dasar pengelolaan SDM, seperti pemberian diklat, mutasi, rotasi, dan promosi, termasuk pemberian *reward and punishment* yang tepat dan objektif.

Untuk menerapkan manajemen SDM berbasis merit tersebut Kementerian Luar Negeri akan terus mengupayakan kelengkapan teknisnya, seperti standar kompetensi jabatan bagi masing-masing jabatan fungsional dan struktural, serta menerapkan manajemen talenta untuk menetapkan rencana suksesi organisasi. Kementerian Luar Negeri juga akan memperbaiki struktur tunjangan sebagai kompensasi peningkatan mutu, prestasi, profesionalisme, pengabdian, dedikasi dan produktivitas kerja pegawai. Strategi tersebut tentunya akan dilakukan dengan melalui sistem informasi SDM yang kuat dan terintegrasi.

### **Penguatan alokasi anggaran**

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas diplomasi, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI menyusun perencanaan program-program kegiatan baik yang dilaksanakan di Indonesia maupun luar negeri dengan berbasis kepada anggaran yang telah dialokasikan secara optimal dan tepat guna. Seiring dengan meningkatnya kerja sama bilateral dan diplomasi strategis, Kementerian perlu

mengembangkan kuantitas dan kualitas program dan kegiatan sehingga berdampak pula kepada kebutuhan anggaran yang besar.

Dengan memperhatikan prinsip penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan transparan, Kementerian Luar Negeri berupaya memperbaiki struktur alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri, termasuk dalam hal terdapat kebutuhan penambahan anggaran belanja barang operasional dan non-operasional yang bersifat produktif, serta belanja modal untuk penguatan infrastruktur fisik. Hal tersebut juga didorong dengan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dimana dituntut adanya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dengan memastikan penerapan prinsip “*value for money*”.

Sesuai dengan tuntutan akan peningkatan kapasitas dan kapabilitas akan pelaksanaan mandat besar tugas-tugas diplomasi yang diemban, Kementerian Luar Negeri sudah selayaknya dapat masuk dalam kategori Kementerian dengan pagu besar yaitu di atas 10 triliun rupiah.

### **Sistem teknologi informasi dan komunikasi**

Di era digital saat ini, dukungan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan kebutuhan dasar dalam menunjang pelaksanaan diplomasi. Sudah menjadi suatu kelaziman dalam praktek diplomasi bahwa Kementerian Luar Negeri dan Menteri Luar Negeri suatu negara berkomunikasi dengan mitra asing melalui pemanfaatan teknologi aplikasi digital seperti surat elektronik dan media sosial.

Pada saat yang bersamaan, Kementerian Luar Negeri juga perlu mengembangkan berbagai aplikasi berbasis jaringan untuk mendukung pelayanan publik dan pelaksanaan tugas lainnya. Dengan pengembangan keamanan digital dalam setiap penggunaan sistem TIK tersebut, Kementerian Luar Negeri juga harus melindungi informasi/data yang bersifat rahasia, serta membangun sistem TIK yang mampu menahan serangan siber.

### **ii. Penataan organisasi dan tata kerja**

Organisasi pada prinsipnya harus senantiasa disempurnakan mengikuti sasaran strategis dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Sesuai dengan konsep *dynamic governance*, organisasi Kementerian Luar Negeri di masa mendatang harus menjadi semakin *agile* terhadap perubahan lingkungan eksternal dan dinamika internal. Penataan organisasi dan tata kerja dalam hal ini akan mencakup aspek struktur, proses bisnis, dan manajemen kinerja.

### **Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran**

Sebagai tindak lanjut hasil Rapat Terbatas Presiden dengan para menteri tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 pada tanggal 9 Maret 2020, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama nomor: S-

122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Tujuan Pemerintah dalam menetapkan desain ulang (redesain) Program untuk seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) yang akan berlaku efektif pada TA 2021 adalah untuk memperkuat implementasi *Money Follow Program*, meningkatkan keselarasan Program dan Kegiatan, keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta mewujudkan keselarasan rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, dan Keluaran (*Output*) yang mencerminkan “*real work*” K/L (konkret).

Bagi Kemenlu, penerapan RSPP berdampak pada adanya penyederhanaan program, dari 12 Program menjadi 5 Program pada TA 2021, menjadi:

- Program Diplomasi dan Kerjasama Internasional
- Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral
- Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik
- Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional
- Program Dukungan Manajemen

Tidak hanya untuk satker Pusat, RSPP juga diberlakukan untuk satker Perwakilan RI. Dengan adanya RSPP tersebut, diharapkan meningkatnya sinkronisasi dan sinergi seluruh Satker Kementerian Luar Negeri melalui penyelenggaraan Program/Kegiatan lintas eselon I dan eselon II serta penyelarasan Program/Kegiatan satker Pusat dan Perwakilan.

### **Struktur organisasi dan tata kerja**

Struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri periode 2020-2024 akan diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri, dan disesuaikan dengan sasaran strategis, terutama prioritas politik luar negeri (4+1) yang meliputi: i) penguatan diplomasi ekonomi, ii) diplomasi perlindungan, iii) diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, dan iv) peningkatan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta infrastruktur diplomasi.

Sejalan dengan prioritas Presiden Joko Widodo di bidang luar negeri untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan dan akan lebih memperkuat lagi diplomasi ekonomi. Untuk periode pemerintahan 2020-2024, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Luar Negeri untuk mengoptimalkan posisi Indonesia di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi global, perang dagang AS-RRT, menjaga dan mengamankan komoditas unggulan Indonesia, dan mengkapitalisasi pasar dalam negeri sebagai instrumen politik luar negeri.

Penambahan mandat tersebut perlu direspon dengan penguatan organisasi, namun tetap mempertahankan struktur organisasi saat ini. Penguatan organisasi terutama dilakukan dengan penguatan rumusan tugas dan fungsi, yakni dengan menambahkan unsur

pengoordinasian dan pengarahan kebijakan berdasarkan mandat UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, serta lebih menekankan tugas diplomasi (5+1 *-ing*: *representing, reporting, promoting, negotiating, protecting, managing*) pada unit organisasi operasional.

Dalam periode Renstra sebelumnya, Kementerian Luar Negeri telah berhasil menerapkan organisasi yang berbasis fungsional khususnya di Inspektorat Wilayah, dan menghapus unit organisasi eselon IV (Pengawas) di unit-unit organisasi operasional pelaksana *core business*.

Guna memperkuat desain organisasi berbasis fungsional, dan sesuai arahan Presiden untuk menyederhanakan birokrasi, Kementerian Luar Negeri akan melakukan pengalihan unit organisasi eselon III dan IV menjadi berbasis fungsional secara bertahap. Untuk tahap pertama, organisasi berbasis fungsional akan diterapkan pada unit organisasi operasional dan Pusat-pusat di bawah BPPK.

Selanjutnya, akan didorong penguatan organisasi berbasis fungsional pada unit organisasi kesekretariatan dan pelayanan, yang meliputi Biro, Sekretariat Ditjen/Itjen/BPPK, Pusat, serta Direktorat-direktorat di bawah Ditjen Protokol dan Konsuler. Untuk itu, diperlukan pengayaan jenis jabatan fungsional dalam organisasi Kementerian Luar Negeri, dan diupayakan pengisian jabatan-jabatan tersebut dalam periode Renstra ini.

Struktur organisasi dan tata kerja Perwakilan RI akan diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Luar Negeri tersendiri. Menindaklanjuti evaluasi dan penataan kelembagaan Perwakilan RI dalam periode sebelumnya, Kementerian Luar Negeri akan melakukan penyesuaian postur/ukuran organisasi Perwakilan berdasarkan bobot misi, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan negara mitra atau organisasi internasional.

Organisasi Perwakilan RI sudah sejak tahun 2003 berbasis fungsional. Karakter tersebut akan lebih diperkuat dalam pelaksanaan tugas, yakni agar pembagian fungsi tidak dipahami sebagai struktur melainkan *cluster* fungsi yang dilaksanakan oleh Perwakilan untuk mencapai sasaran kinerja.

Kelembagaan Perwakilan RI diarahkan agar lebih terintegrasi dan mampu mensinergikan seluruh fungsi dan isu hubungan luar negeri pemerintah Indonesia, termasuk di dalamnya Atase Pertahanan/Atase Teknis/Staf Teknis dan pejabat perbantuan lainnya, serta mengakomodasi entitas kelembagaan yang berdimensi luar negeri seperti *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC), *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC), dan Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).

### **Proses bisnis**

Kementerian Luar Negeri telah menerapkan peta proses bisnis, serta standar operasional prosedur makro dan mikro. Dengan penguatan mandat Kementerian Luar Negeri untuk diplomasi ekonomi yang juga menyentuh dimensi dalam negeri, maka perlu dilakukan penyempurnaan proses bisnis baik yang bersifat lintas unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, maupun lintas Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, perlu dirumuskan suatu proses bisnis yang jelas agar tidak terjadi duplikasi ataupun kekosongan (*vacuum*).

Sejalan dengan arah penataan organisasi Perwakilan RI, akan dilakukan penguatan dan formalisasi peta proses bisnis pelaksanaan tugas dan fungsi antara pejabat fungsional Diplomat dan Atase Pertahanan/Atase Teknis/Staf Teknis serta entitas lain yang terkait.

### **Manajemen kinerja**

Dengan telah diimplementasikannya Sistem Manajemen Kinerja berbasis *balance scorecard* di seluruh unit organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, maka dalam periode 2020-2024 perlu didorong internalisasi lebih lanjut serta integrasi sistem.

### **iii. Penguatan Tata Kelola dan Budaya Organisasi**

Langkah-langkah penataan dalam kerangka kelembagaan idealnya bermuara pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, serta budaya organisasi yang kondusif bagi seluruh pegawai, sesuai tujuan reformasi birokrasi untuk mewujudkan budaya kerja ASN yang profesional dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, perubahan-perubahan prosedural selama ini dalam kerangka kelembagaan ditargetkan sudah mengkrystal menjadi transformasi budaya organisasi yang fundamental pada periode Renstra ini.

### **Pengawasan dan integritas**

Pengawasan intern pemerintah, sebagai salah satu fungsi manajemen pada penyelenggaraan pemerintahan, memegang peran penting untuk mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi serta mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kementerian Luar Negeri akan terus mengupayakan penguatan fungsi pengawasan intern berbasis risiko yang berkualitas untuk perwujudan peran APIP yang efektif. Diantaranya melalui penguatan pelaksanaan audit kinerja dan pendampingan serta mendorong penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Sejalan dengan amanah Kapabilitas APIP tingkat 3 dan rekomendasi Kementerian PANRB terkait komponen "Penguatan Pengawasan" dalam penilaian Reformasi Birokrasi, Kementerian Luar Negeri akan terus mendorong penguatan

pengendalian intern di setiap jenjang manajemen (penerapan tiga lini pertahanan). Hal tersebut juga merupakan bagian dari upaya penguatan integritas aparatur. Di bidang komponen Penguatan Pengawasan, Kementerian Luar Negeri akan terus mendorong penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai target Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024.

### **Internalisasi nilai-nilai Kementerian Luar Negeri**

Salah satu elemen pembentuk budaya organisasi adalah nilai-nilai (*values*). Kementerian Luar Negeri telah menetapkan nilai-nilai Kementerian berupa Profesionalisme, Integritas, Manfaat, Proaktif, Inovatif, dan Nilai kejuangan (PIMPIN). Setelah nilai-nilai dibentuk, maka tahapan selanjutnya adalah memotivasi, penghayatan norma, dan terakhir pencapaian hasil. Internalisasi nilai-nilai diperlukan agar menjadi norma bersama dan pedoman perilaku bagi pegawai. Adanya norma bersama akan memperkuat ikatan (*bond*) diantara pegawai dan antara pegawai dengan organisasi.

Karena nilai-nilai tersebut merupakan turunan dari rumusan visi dan misi Kementerian Luar Negeri, maka dengan rumusan visi dan misi yang baru dalam Renstra 2020-2024, dapat juga ditinjau kembali apakah masih relevan atau memerlukan penyesuaian.

Selain itu Kementerian Luar Negeri juga perlu menentukan mekanisme atau metode untuk menilai/evaluasi secara berkala apakah atau sejauh mana nilai-nilai Kemenlu tersebut telah terinternalisasi untuk menentukan strategi lanjutan agar seluruh nilai-nilai tersebut telah terinternalisasi dengan baik (sesuai targetnya).

### **Terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif**

Keterikatan pegawai (*employee engagement*) merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan kinerja. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan *employee engagement*, yakni dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif.

Lingkungan kerja yang inklusif maksudnya adalah lingkungan di mana pegawai merasa dihargai, diterima, dilibatkan, dan terintegrasi dalam tim dan organisasinya. Setiap pegawai mempunyai akses yang sama terhadap peluang untuk kemajuan (dalam hal karier maupun pengembangan kompetensi). Dalam lingkungan kerja yang inklusif, terdapat atmosfer komunikasi dan berbagi informasi yang terbuka, serta akuntabilitas dan tanggung jawab yang diemban secara bersama-sama.

Lingkungan kerja yang kolaboratif mengedepankan *teamwork* dibandingkan pencapaian prestasi individual. Lingkungan kerja demikian akan didorong melalui penguatan organisasi berbasis fungsional, yang tidak kaku dan tersekat berdasarkan struktur.

Penguatan organisasi berbasis fungsional akan menempatkan Jabatan Fungsional sama pentingnya dengan Jabatan Administrasi, dan bahwa setiap Jabatan fungsional sama-sama memberikan kontribusi yang berarti bagi organisasi. Penguatan organisasi berbasis fungsional perlu diarahkan pada penguatan *teamwork* dalam pencapaian kinerja organisasi, terutama untuk target-target kinerja yang lebih tinggi dan menantang.

Lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif dapat dicapai melalui pemantapan budaya mentoring dan *coaching* yang berkesinambungan, serta pendayagunaan pejabat fungsional sesuai jenjang dan kompetensi jabatannya sehingga terbangun semangat kolaborasi antara satu dan yang lainnya, sekaligus menghindari potensi *idle capacity* dalam organisasi.

Lingkungan kerja yang semakin kondusif akan menciptakan *ownership* yang lebih kuat terhadap organisasi, sehingga pada akhirnya meningkatkan loyalitas dan produktivitas pegawai Kementerian Luar Negeri.

## 4. TARGET KINERJA

---

### 4.1. Target Kinerja Kemenlu Tahun 2020 s.d. 2024

*(pada halaman berikut)*

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

### TARGET KINERJA KEMENLU TAHUN 2020 S.D. 2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN SUB IKU	TARGET	TARGET PROYEKSI			
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	29	91	94	96	98
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	15	44	45	45	46
	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	16	88	89	93	94
Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global	Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	88,70	96,00	96,30	97,07	97,07
	Sub IKU : Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral	86,00%	96,00%	96,00%	96,67%	96,67%
	Sub IKU : Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral	95,00%	96,00%	97,00%	98,00%	98,00%

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN SUB IKU	TARGET	TARGET PROYEKSI			
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Integritas kedaulatan NKRI dan citra positif Indonesia di dunia Internasional yang meningkat	Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	45,03	49,64	55,93	56,87	57,8
	Indeks citra Indonesia di dunia internasional	3.8 (skala 5)	3.85 (skala 5)	3.90 (skala 5)	3.95 (skala 5)	4 (skala 5)
Pelindungan WNI/BHI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima	Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	73,00%	74,00%	75,00%	76,00%	77,00%
	Indeks kepuasan pelayanan publik	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)
	Sub IKU : Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
	Sub IKU : Indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
	Sub IKU : Indeks kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
	Sub IKU : Indeks kepuasan pelayanan pelindungan WNI/BHI	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)
Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	76,65%	90,55%	90,95%	91,55%	92,55%

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN SUB IKU	TARGET	TARGET PROYEKSI			
		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
	Sub IKU : Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	71,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%
	Sub IKU : Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholders</i> dalam negeri	80,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
	Sub IKU : Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	75,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%
	Sub IKU : Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%	92,50%
	<b>Indeks Pengaruh Kebijakan Luar Negeri terhadap Kebijakan <i>Stakeholders</i></b>	<b>3 (skala 4)</b>				

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN SUB IKU	TARGET	TARGET PROYEKSI			
			TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
Infrastruktur diplomasi yang kuat	SS Pendukung L1.1 SDM Kemenlu yang kompeten	Persentase pejabat Kemenlu yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	100%	100,00%	50% (fungsional)	75% (fungsional)	100% (fungsional)
	SS Pendukung L1.2 Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	85	87	89	91	93
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)
	SS Pendukung L.1.3 Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Memadai	Persentase sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100%	100%	100%	100%	100%
	SS Pendukung L.1.4 Pengelolaan Anggaran Kemenlu yang Optimal dan Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

## 5. PENUTUP

---

Sesuai dengan amanat konstitusi, politik luar negeri dan diplomasi Indonesia diabdikan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dalam melaksanakan amanat konstitusi tersebut, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif.

Prioritas politik luar negeri Indonesia dalam kurun waktu 2020-2024 akan bertumpu pada prioritas 4+1, yakni penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, plus memperkuat infrastruktur diplomasi.

Sebagai implementasi visi dan misi Presiden RI-Wakil Presiden RI, maka prioritas politik luar negeri Indonesia telah serta merta tercantumkan ke dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian Luar Negeri Tahun 2020-2024 dengan 1 visi, 5 misi, 6 tujuan/sasaran strategis, 10 arah kebijakan dengan strategi beserta alat ukur dan targetnya.

Pencapaian target kinerja Kementerian Luar Negeri dan keberhasilan pelaksanaan politik luar negeri secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh kondisi dalam dan luar negeri. Oleh karena itu peran, keterlibatan, dan sinergisitas seluruh komponen *stakeholders* dan pemanfaatan seluruh lini kekuatan (*multi-track diplomacy*) harus dilaksanakan demi peningkatan pencapaian kinerja pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
<b>KEMENTERIAN LUAR NEGERI</b>								7,662,459.50	8,205,316.86	14,195,557.10	15,269,615.70	16,069,429.00	
	<b>1 Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang optimal</b>												
	1. Jumlah negara akreditasi yang mencapai peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	29	91	94	96	98	Negara						Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, dan Perwakilan RI
	2. Jumlah negara akreditasi yang mencapai peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	15	44	45	45	46	Negara						
	3. Jumlah negara akreditasi yang mencapai peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	16	88	89	93	94	Negara						
	<b>2 Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh di tingkat regional dan global</b>												
	1. Indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional	88.7	96	96.3	97.07	97.07	Indeks						Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Ditjen Kerja Sama ASEAN, dan Ditjen
Sub IKU 1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral	86	96	96	96.67	96.67	Persentase							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	Sub IKU 2: Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral	95	96	97	98	98	Persentase						KERJA SAMA MULTILATERAL
	<b>3 Integritas Kedaulatan NKRI dan citra positif Indonesia di dunia Internasional yang meningkat</b>												
	1. Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	45.03	49.64	55.93	56.87	57.8	Indeks						Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional
	2. Indeks citra Indonesia di dunia internasional	3,8 (skala 5)	3,85 (skala 5)	3,90 (skala 5)	3,95 (skala 5)	4 (skala 5)	Indeks						Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, dan Perwakilan RI
	<b>4 Pelindungan WNI/BHI di luar negeri dan pelayanan publik yang prima</b>												
	1. Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	73	74	75	76	77	Persentase						Ditjen Protokol dan Konsuler, dan Perwakilan RI
	2. Indeks kepuasan pelayanan publik	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	4 (Skala 4)	Indeks						
	Sub IKU 1: Indeks kepuasan pelayanan keprotokolan	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Indeks						
	Sub IKU 2 : Indeks kepuasan pelayanan kekonsuleran	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Indeks						
	Sub IKU 3 : Indeks kepuasan pelayanan fasilitas diplomatik	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Indeks						
	Sub IKU 4 : Indeks kepuasan pelayanan perlindungan WNI/BHI	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Indeks						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
5	<b>Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional yang tinggi</b>													
	1. Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri	76.65	90.55	90.95	91.55	92.55	Persentase							Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Ditjen Kerja Sama ASEAN, dan Ditjen Kerja Sama Multilateral
	Sub IKU 1 : Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	71	92	92	92	92	Persentase							
	Sub IKU 2 : Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	80	95	95	95	95	Persentase							
	Sub IKU 3 : Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	75	80	82	85	90	Persentase							
	Sub IKU 4 : Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	Persentase							
	2. Indeks Pengaruh Kebijakan Luar Negeri terhadap Kebijakan Stakeholders	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	Indeks							
	6	<b>Infrastruktur Diplomasi yang Kuat</b>												
	1. Persentase pejabat Kemenlu yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan	100	100	50	75	100	Persentase							Sekretariat Jenderal

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	2. Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	85	87	89	91	93	Nilai						Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen Protokol dan Konsuler, Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Multilateral, dan BPPK	
	3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	78	79	80	81	82	Nilai							
	4. Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini							Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal
	5. Persentase sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100	100	100	100	100	Persentase							Sekretariat Jenderal
Program : Diplomasi dan Kerja sama Internasional								267,072.60	428,465.90	467,655.70	483,825.20	500,871.40	Sekretariat Jenderal, Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	
		<b>Sasaran Program: Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di kawasan</b>												
	1	Jumlah negara akreditasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	17	54	56	56	57	Jumlah						
	2	Jumlah negara akreditasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	8	21	21	21	21	Jumlah						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	3	Jumlah negara akreditasi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	10	47	47	48	48	Jumlah						
	4	Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh Stakeholder dalam Negeri	53	85	85	85	85	Persentase						
	5	Jumlah Kesepakatan hasil perundingan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	24	51	51	51	51	Jumlah						
	6	Persentase Data Economic Intelligence dari kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti Stakeholders dalam Negeri	50	100	100	100	100	Persentase						
	7	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Kemaritiman, Polkam dan Perbatasan di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	21	46	46	46	46	Jumlah						
	8	Jumlah Negara Akreditasi di Kawasan Amerika dan Eropa yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Perdagangan Dengan Indonesia	12	37	38	40	41	Jumlah						
	9	Jumlah Negara Akreditasi di Kawasan Amerika dan Eropa yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia	7	23	24	24	25	Jumlah						
	10	Jumlah negara akreditasi di kawasan Amerika dan Eropa yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	6	41	42	45	46	Jumlah						
	11	Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri	89	99	99	99	99	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	12	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kawasan Amerika dan Eropa	19	29	32	35	36	Jumlah						
	13	Persentase Data Ekonomi Intelligence yang Ditindaklanjuti Stakeholders Dalam Negeri	92	93	94	94	94	Persentase						
	14	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan Diplomasi Maritim dan Polkam di Kawasan Amerika dan Eropa	20	37	38	41	41	Jumlah						
		<b>Sasaran Program: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang berpengaruh di Kawasan</b>												
	1	Persentase Kepemimpinan Indonesia Pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	95	95	95	95	95	Persentase						
	2	Persentase Prakarsa/Rekomendasi pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri	100	100	100	100	100	Persentase						
	3	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Diterima Pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	0	100	100	100	100	Persentase						
	4	Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia Bidang Kemaritiman dan Polkam yang Diterima di Kawasan Amerika dan Eropa	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum regional Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	70	100	100	100	100	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	6	Persentase Prakarsa/Rekomendasi pada Forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders dalam Negeri	60	90	90	90	90	Persentase						
	7	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterima pada forum regional di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	70	90	90	90	90	Persentase						
	8	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Bidang Maritim, Polkam, dan Perbatasan yang diterima pada forum regional Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	70	90	90	90	90	Persentase						
		<b>Sasaran Program: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Internasional</b>												
	1	Persentase Dukungan Konstituen Internasional terhadap Promosi Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia	97	98	98	99	99	Persentase						
	2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,8 (skala 5)	3,85 (skala 5)	3,9 (skala 5)	3,95 (skala 5)	4 (skala 5)	Indeks						
	3	Jumlah Program/Kegiatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	10	22	25	27	30	Jumlah						
	4	Jumlah Pendanaan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional Termasuk KSST	150	160	165	170	175	Milyar						
	5	Tingkat Partisipasi Aktor Non-Pemerintah dalam Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	2	2.25	2.5	2.75	3	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	6	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Nasional terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	85	92	93	94	95	Persentase						
	7	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Internasional terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI	85	85	86	86	86	Persentase						
	8	Persentase Pencapaian Respon Digital pada Portal Situs Kementerian Luar Negeri	100	100	100	100	100	Persentase						
	9	Persentase Pencapaian Respon Digital pada Media Sosial Kementerian Luar Negeri	40	41	42	43	44	Persentase						
	10	Nilai Capaian Keterbukaan Informasi Publik	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	Nilai						
		<b>Sasaran Program: Kebijakan luar negeri yang berkualitas</b>												
	1	Indeks pengaruh kebijakan luar negeri terhadap kebijakan stakeholders	3	3	3	3	3	indeks						
	2	Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas	95	96	96	96	96	Persentase						
		<b>Sasaran Program: Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkatkan melalui Perwakilan RI</b>												
	1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral	86	96	96	96.67	96.67	Persentase						
	2	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN	95	96	97	98	98	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	3	Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	3	3	3	3	3	Persentase						
	4	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	3	3	3	3	3	Persentase						
	5	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Indonesia ke Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	3	3	3	3	3	Persentase						
	6	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	5	5	5	5	5	Persentase						
	7	Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI/Organisasi Internasional	3,8 (skala 5)	3,85 (skala 5)	3,9 (skala 5)	3,95 (skala 5)	4 (skala 5)	Indeks						
	8	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	85	85	85	85	85	Jumlah						
	9	Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data Economic Intelligence/Market Intelligence Perwakilan RI	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Indeks						
	10	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja	76.65	90.55	90.95	91.55	92.55	Persentase						
	11	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum multilateral/regional	90	90	90	90	90	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	12	Persentase tindak lanjut oleh PTRI di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan atas hasil kesepakatan di Forum Multilateral/Kerja Sama ASEAN	85	85	85	85	85	Persentase						
	13	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Maritim dan Polkam	86	86	86	86	86	Jumlah						
	14	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan sosial budaya yang diterima pada forum multilateral/regional	90	90	90	90	90	Persentase						
	15	Persentase tindak lanjut yang dilakukan PTRI di bidang ekonomi, sosial, dan budaya atas hasil kesepakatan di Forum Multilateral/Kerja Sama ASEAN	85	85	85	85	85	Persentase						
Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika									1,782.40	2,375.00	3,375.00	4,375.00	5,375.00	Direktorat Afrika
		<b>Sasaran Kegiatan : Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal di Kawasan Afrika</b>												
	1	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Afrika Sub Sahara yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	5	6	8	8	9	Negara						
	2	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Afrika Sub Sahara yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	1	2	2	3	3	Negara						
	3	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Afrika Sub Sahara yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	4	5	5	6	8	Negara						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	4	Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang kemaritiman dan polkam di Kawasan Afrika Sub Sahara	2	3	4	6	8	Dokumen							
	5	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di Kawasan Afrika Sub Sahara	3	4	5	6	8	Dokumen							
	6	Persentase data economic intelligence negara atau wilayah akreditasi di Kawasan Afrika Sub Sahara yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	60	65	70	75	80	Persen							
	7	Jumlah promosi Trade Tourism and Investment (TTI) di Kawasan Afrika Sub-Sahara	4	5	6	6	8	Dokumen							
	8	Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di Kawasan Afrika Sub-Sahara yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	60	65	70	75	80	Persen							
<b>Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah</b>									1,800.30	2,375.00	3,375.00	4,000.00	4,500.00	Direktorat Asia Selatan dan Tengah	
		<b>Sasaran Kegiatan : Nilai manfaat diplomasi yang optimal di kawasan Asia Selatan dan Tengah</b>													
	1	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	3	5	6	7	8	Negara							
	2	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	3	4	5	5	5	Negara							
	3	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	3	4	5	6	8	Negara							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	4	Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang kemaritiman dan polkam di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	4	5	7	8	9	Dokumen							
	5	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	3	5	6	7	8	Dokumen							
	6	Persentase data economic intelligence negara atau wilayah akreditasi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	50	75	75	75	75	Persen							
	7	Jumlah promosi Trade Tourism and Investment (TTI) di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	3	5	7	8	10	Laporan							
	8	Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di Kawasan Asia Selatan dan Tengah yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	50	75	75	85	90	Persen							
									1,658.40	3,000.00	3,300.00	3,630.00	3,993.00		
<b>Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik</b>		<b>Sasaran Kegiatan : Nilai Manfaat Diplomasi yang Optimal di Kawasan Asia Timur dan Pasifik</b>													Direktorat Asia Timur dan Pasifik
	1	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	5	6	7	7	7	jumlah (Negara)							
	2	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	1	3	5	5	5	Jumlah (Negara)							
	3	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	0	3	5	5	5	Jumlah (Negara)							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	4	Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	6	6	6	6	6	Jumlah							
	5	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	5	7	10	10	10	Jumlah							
	6	Persentase data economic intelligence yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	20	70	70	70	100	persentase							
	7	Jumlah promosi Trade Tourism and Investment (TTI) di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	1	8	8	8	8	Jumlah							
	8	Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di Kawasan Asia Timur dan Pasifik yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	50	85	85	85	85	Persentase							
<b>Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika</b>									2,079.30	2,375.00	2,493.80	2,618.40	2,749.40		
		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan Indonesia yang berpengaruh dalam Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika</b>													Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
	1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	100	100	100	100	100	Persentase							
	2	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan dan antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	90	90	90	90	90	Persentase							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	3	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang maritim, politik dan keamanan, dan perbatasan yang diterima pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	90	90	90	90	90	Persentase						
	4	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika	90	90	90	90	90	Persentase						
Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Timur Tengah									3,577.60	4,865.50	5,835.00	6,235.00	6,635.00	Direktorat Timur Tengah
		<b>Sasaran Kegiatan : Nilai manfaat diplomasi yang optimal di kawasan Timur Tengah</b>												
	1	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Timur Tengah yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	2	5	7	9	10	Jumlah (Negara)						
	2	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Timur Tengah yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	2	4	5	6	7	Jumlah (Negara)						
	3	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Timur Tengah yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	2	3	4	5	6	Jumlah (Negara)						
	4	Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di Kawasan Timur Tengah yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	33	40	50	60	70	Persentase						
	5	Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang kemaritiman dan polkam di Kawasan Timur Tengah	3	4	5	6	7	Jumlah (Kesepakatan)						
	6	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di Kawasan Timur Tengah	7	8	9	10	11	Jumlah (Kesepakatan)						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	7	Persentase data economic intelligence negara atau wilayah akreditasi di Kawasan Timur Tengah yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	22	30	40	50	60	Persentase						
	8	Jumlah promosi Trade Tourism and Investment (TTI) di Kawasan Timur Tengah	5	6	7	8	9	Jumlah						
	9	Persentase Respon Positif Terhadap Bantuan Kerja Sama Pemri untuk Kedubes Palestina di Jakarta	100	100	100	100	100	Persentase						
Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Tenggara									1,222.30	2,375.00	2,493.80	2,618.40	2,749.40	Direktorat Asia Tenggara
		Sasaran kegiatan : Nilai manfaat diplomasi ekonomi yang optimal di Kawasan Asia Tenggara												
	1	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Tenggara yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	2	9	10	10	11	Negara						
	2	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Tenggara yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	1	3	4	4	5	Negara						
	3	Jumlah negara akreditasi di Kawasan Asia Tenggara yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	1	6	7	7	8	Negara						
	4	Jumlah kesepakatan hasil perundingan di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan di kawasan Asia Tenggara	6	20	20	20	6	Dokumen						
	5	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di Kawasan Asia Tenggara	6	6	6	6	6	Dokumen						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	6	Presentase data economic intelligence negara atau wilayah akreditasi di Kawasan Asia Tenggara yang ditindaklanjuti stakeholders dalam negeri	100	100	100	100	100	Persen							
	7	Jumlah promosi Trade Tourism and Investment (TTI) di Kawasan Asia Tenggara	5	15	16	17	17	Laporan							
	8	08-Persentase kesepakatan kerjasama bilateral di kawasan Asia Tenggara yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	80	87	87	90	90	Persen							
<b>Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Tengah serta Karibia Barat</b>									1,020.00	1,966.30	3,146.10	3,775.30	4,530.40	Direktorat Amerika I	
		<b>Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Amerika I</b>													
	1	Jumlah negara akreditasi di kawasan Amerika I yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	0	6	6	7	7	Negara							
	2	Jumlah negara akreditasi di kawasan Amerika I yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	0	2	3	3	3	Negara							
	3	Jumlah negara akreditasi di kawasan Amerika I yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	0	7	7	8	8	Negara							
	4	Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika I yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri	95	100	100	100	100	Persentase							
	5	Jumlah kesepakatan di bidang ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Amerika I	1	5	6	7	8	Kesepakatan							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	6	Persentase data economic intelligence yang ditindaklanjuti oleh stakeholders	95	100	100	100	100	Persentase							
	7	Jumlah Kesepakatan hasil Perundingan Diplomasi Maritim di Kawasan Amerika I	3	5	5	6	6	Kesepakatan							
	8	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan Diplomasi Politik dan Keamanan di Kawasan Amerika I	3	7	7	8	8	Kesepakatan							
Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia Timur									930	2,048.50	3,277.60	3,933.20	4,719.80	Direktorat Amerika II	
		<b>Sasaran Kegiatan : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Amerika II</b>													
	1	Jumlah negara akreditasi di kawasan Amerika II yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	5	10	10	10	11	Negara							
	2	Jumlah negara akreditasi di kawasan Amerika II yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	1	2	2	2	2	Negara							
	3	Jumlah negara akreditasi di kawasan Amerika II yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia	0	11	11	12	12	Negara							
	4	Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika II yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholders Dalam Negeri	100	100	100	100	100	Persentase							
	5	Jumlah kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kawasan Amerika II	0	4	6	8	8	Kesepakatan							
	6	Persentase data economic intelligence yng ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri	89	90	91	92	93	persentase							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	7 Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan Diplomasi Politik dan Keamanan di Kawasan Amerika II	0	2	3	4	4	Kesepakatan							
Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Barat dan Selatan								1,288.10	3,000.00	3,700.00	4,400.00	5,288.00	Direktorat Eropa I	
		<b>Sasaran Kegiatan : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Eropa I</b>												
	1	Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa I yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	3	6	6	6	6	Negara						
	2	Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa I yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	4	8	8	8	8	Negara						
	3	Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa I yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	3	5	6	6	7	Negara						
	4	Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Eropa I yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kawasan Eropa I	7	7	7	7	7	Kesepakatan						
	6	Persentase Data Economic Intelligence yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders	100	100	100	100	100	Persentase						
	7	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan Diplomasi Maritim di Kawasan Eropa I	2	3	3	3	3	Kesepakatan						
8	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan Diplomasi Politik dan Keamanan di Kawasan Eropa I	3	3	3	3	3	Kesepakatan							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Utara dan Tengah								1,667.70	2,143.00	3,428.80	4,114.60	4,937.50	Direktorat Eropa II	
		Sasaran Kegiatan : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Eropa II												
	1	Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa II yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	1	9	9	9	9	Negara						
	2	Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa II yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	1	9	9	9	9	Negara						
	3	Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa II yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	0	10	10	10	10	Negara						
	4	Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Eropa II yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri	50	95	95	95	95	Persentase						
	5	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kawasan Eropa II	4	6	6	6	6	Kesepakatan						
	6	Persentase Data Economic Intelligence yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders	90	90	90	90	90	Persentase						
	7	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan Diplomasi Maritim di Kawasan Eropa II	1	2	2	2	2	Kesepakatan						
8	Jumlah Kesepakatan hasil Perundingan Diplomasi Politik dan Keamanan di Kawasan Eropa II	2	3	3	3	3	Kesepakatan							
								1,422.70	1,840.00	6,402.70	7,042.90	7,747.20	Direktorat Eropa III	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Timur dan Tenggara	Sasaran Kegiatan : Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal di Kawasan Eropa III												
	1 Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa III yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	3	6	7	8	8	Jumlah negara						
	2 Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa III yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	1	3	3	3	3	Jumlah negara						
	3 Jumlah negara akreditasi di kawasan Eropa III yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	3	8	8	9	9	Negara						
	4 Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Eropa III yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri	100	100	100	100	100	Persentase						
	5 Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kawasan Eropa III	7	6	7	7	7	Kesepakatan						
	6 Persentase Data Economic Intelligence yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders	85	0	87	87	88	Persentase						
	7 Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan Diplomasi Maritim di Kawasan Eropa III	0	1	1	1	1	Kesepakatan						
	8 Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan Diplomasi Politik dan Keamanan di Kawasan Eropa III	6	2	11	11	11	Kesepakatan						
								1,194.80	1,850.40	3,160.60	3,892.80	4,771.30	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan : Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa</b>												Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika dan Eropa	
	1	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada kerja sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerop	95	95	95	95	95	Persentase							
	2	Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa yang ditindak lanjuti oleh stakeholder dalam negeri	100	100	100	100	100	Persentase							
	3	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang diterima pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	0	100	100	100	100	Persentase							
	4	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia bidang kemaritiman yang diterima pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	0	100	100	100	100	Persentase							
	5	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang politik dan keamanan yang diterima pada forum Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Amerika dan Eropa	100	100	100	100	100	Persentase							
Kegiatan : Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran Diplomasi Publik									15,354.00	18,754.00	34,619.90	38,081.80	41,890.00	Direktorat Diplomasi Publik	
		<b>Sasaran Kegiatan : Peran Indonesia yang berpengaruh dalam Diplomasi Publik</b>													
	1	Persentase dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia	85	85	87	89	90	Persentase							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3.8	3.85	3.9	3.95	4	Indeks						
	3	Jumlah inisiatif pemberdayaan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri	4	4	5	5	6	Jumlah inisiatif						
	4	Persentase respon positif dari masyarakat internasional dan domestik terhadap program diplomasi publik	85	91	91	92	92	Persentase						
									3,954.50	4,354.50	8,660.00	9,526.00	10,478.60	Direktorat Informasi dan Media
<b>Kegiatan : Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Informasi dan Pelayanan Media</b>		<b>Sasaran Kegiatan : Peran Indonesia yang berpengaruh di bidang informasi dan pelayanan media</b>												
	1	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,8 (Skala 5)	3,85 (Skala 5)	3,9 (Skala 5)	3,95 (Skala 5)	4 (Skala 5)	Nilai						
	2	Persentase pemberitaan positif media massa nasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	85	92	93	94	95	Persentase						
	3	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap kebijakan hubungan luar negeri RI	85	85	86	86	86	Persentase						
	4	Persentase pencapaian respon digital pada Portal Situs Kemlu	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Persentase pencapaian respon digital pada media sosial Kemlu	40	41	42	43	44	Persentase						
	6	Nilai capaian keterbukaan informasi publik	84.5	84.6	84.7	84.8	84.9	Nilai						
	7	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Informasi dan Media	78	79	80	81	82	Nilai						
									1,395.40	1,899.50	1,994.40	2,094.20	2,198.90	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA		
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024			
Kegiatan : Pembentukan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi isu-isu strategis, dan personil		Sasaran Kegiatan : Dukungan pembentukan citra positif Indonesia di dunia internasional terkait pengamanan dalam negeri, luar negeri, informasi isu-isu strategis dan personil													Direktorat Keamanan Diplomatik	
	1	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3.8	3.85	3.9	3.95	4	Indeks								
	2	Persentase penyusunan laporan Keamanan Informasi, Personil, dan Kerja Sama Keamanan Diplomatik sesuai target	75	80	85	90	95	Persentase								
	3	Jumlah Rekomendasi keamanan Informasi, personel dan kerjasama Keamanan Diplomatik	52	61	65	70	75	Jumlah								
	4	Persentase tindak lanjut rekomendasi keamanan informasi, personal, dan kerja sama keamanan diplomatik	75	75	75	75	75	Persentase								
	5	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Keamanan Diplomatik	78	79	80	81	82	Nilai								
Kegiatan : Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional Melalui Pemberian Bantuan Kerja Sama Teknik									2,043.10	2,443.10	2,566.00	2,695.00	2,830.00	Direktorat Kerjasama Teknik		
		Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh di Dunia Internasional														
	1	Persentase respon positif terhadap bantuan kerja sama teknis melalui mekanisme bilateral dan triangular	95	96	97	98	99	Persentase								
	2	Jumlah kegiatan penguatan/promosi/perluasan jaringan kemitraan dalam rangka pemberian bantuan internasional Indonesia	1	22	24	26	28	laporan								

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Sasaran Kegiatan : Kerja Sama Pembangunan Internasional yang Kuat</b>												
	1 Jumlah program/kegiatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) yang dikoodinasikan oleh Kemenlu	10	22	25	27	30	Kegiatan						
	2 Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST	150	160	165	170	175	Milyar Rupiah						
	3 Tingkat partisipasi aktor non pemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan internasional	2	2.25	2.5	2.75	3	Persentase						
<b>Kegiatan : Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri di Kawasan Amerika dan Eropa</b>								863	1,901.30	2,100.00	2,250.00	2,540.00	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa
	<b>Sasaran Kegiatan : Kebijakan luar negeri yang berkualitas untuk kawasan Amerika dan Eropa</b>												
	1 Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas terkait isu-isu khusus di kawasan Amerika dan Eropa	95	95	95	95	95	Persentase						
	2 Indeks pengaruh kebijakan luar negeri terhadap kebijakan stakeholders	3	3	3	3	3	Indeks						
<b>Kegiatan : Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika</b>								1,294.50	2,303.70	2,388.10	2,474.10	2,555.10	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika
	<b>Sasaran Kegiatan : Kebijakan Luar Negeri yang berkualitas</b>												
	1 Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas	95	95	95	95	95	Persentase						
	2 Indeks pengaruh kebijakan luar negeri terhadap kebijakan stakeholders	3	3	3	3	3	Indeks						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri pada Bidang Multilateral								647.4	1,865.50	2,839.00	3,568.50	3,882.90	Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral
	Sasaran Kegiatan : Kebijakan luar negeri yang berkualitas												
	1 Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas pada lingkup isu-isu multilateral	95	95	96	96		Persentase						
	2 Indeks pengaruh kebijakan luar negeri terhadap kebijakan stakeholders	3	3	3	3	3	Indeks						
Kegiatan : Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional								221,876.90	364,730.70	368,500.00	372,500.00	376,500.00	Perwakilan RI
	Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh, Nilai Manfaat Diplomasi Ekonomi yang Optimal, dan Citra Positif Indonesia yang Meningkatkan melalui Perwakilan RI												
	1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral	86	96	96	96.67	96.67	Persentase						
	2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN	95	96	97	98	98	Persentase						
	3 Persentase Peningkatan Nilai Perdagangan Indonesia dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	3	3	3	3	3	Persentase						
	4 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Asing ke Indonesia dari Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	3	3	3	3	3	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	5	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Indonesia ke Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	3	3	3	3	3	Persentase						
	6	Persentase Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia dari Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI	5	5	5	5	5	Persentase						
	7	Indeks Citra Indonesia di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja Perwakilan RI/Organisasi Internasional	3,8 (skala 5)	3,85 (skala 5)	3,9 (skala 5)	3,95 (skala 5)	4 (skala 5)	Indeks						
	8	Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan bilateral Indonesia dengan Negara Akreditasi/Wilayah Kerja	76.65	90.55	90.95	91.55	92.55	Persentase						
	9	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan sosial budaya yang diterima pada forum multilateral/regional	90	90	90	90	90	Persentase						
	10	Persentase tindak lanjut yang dilakukan PTRI di bidang ekonomi, sosial, dan budaya atas hasil kesepakatan di Forum Multilateral/Kerja Sama ASEAN	85	85	85	85	85	Persentase						
	11	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan yang diterima pada forum multilateral/regional	90	90	90	90	90	Persentase						
	12	Indeks Respon Positif terhadap Informasi Data Economic Intelligence/Market Intelligence Perwakilan RI	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	4 (skala 5)	Indeks						
	13	Jumlah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya	85	85	85	85	85	Jumlah						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	14	Persentase tindak lanjut oleh PTRI di bidang kemaritiman, polkam dan perbatasan atas hasil kesepakatan di Forum Multilateral/Kerja Sama ASEAN	85	85	85	85	85	Persentase						
	15	Jumlah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Maritim dan Polkam	86	86	86	86	86	Jumlah						
Program : Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral									582,194.60	951,027.80	997,974.40	1,170,127.60	983,965.30	Ditjen Kerja Sama Asean, Ditjen Kerjasama Multilateral
		<b>Sasaran Program : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral dan ASEAN</b>												
	1	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral	93	93	93	95	95	Persentase						
	2	Persentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Multilateral	95	96	97	96	98	Persentase						
	3	Persentase Posisi/Prakarsa/rekomendasi di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang Diterima pada Forum Kerja Sama Multilateral	90	90	91	92	92	Persentase						
	4	Persentase Rekomendasi dari Forum Kerja Sama Multilateral yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Nasional	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	Persentase						
	5	Persentase Posisi/Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Polkam di Forum Kerja Sama Multilateral	90	90	91	92	92	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	6	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN	95	96	97	98	99	Persentase						
	7	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	75	80	82	85	90	Persentase						
	8	Persentase rekomendasi dan prakarsa di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama ASEAN	98	98	98	99	99	Persentase						
	9	Persentase rekomendasi dan prakarsa di bidang Maritim dan Politik Keamanan yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama ASEAN	97	97	98	99	98	Persentase						
<b>Kegiatan : Kerja Sama ASEAN Bidang Ekonomi</b>									1,174.40	1,891.10	7,481.10	8,229.20	8,300.00	Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN
		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN</b>												
	1	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Ekonomi ASEAN	95	96	97	98	98	Persentase						
	2	Persentase rekomendasi dan prakarsa di bidang Ekonomi yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama Ekonomi ASEAN	98	98	98	99	99	Persentase						
	3	Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN di dalam negeri	75	80	82	85	90	Persentase						
									1,047.80	2,183.20	5,430.00	11,421.50	5,973.00	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Kerja Sama ASEAN Bidang Sosial Budaya	Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan Indonesia yang berpengaruh dalam Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN												Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya Asean
	1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam bidang Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	95	96	97	98	98	persen						
	2 Persentase rekomendasi dan prakarsa di bidang Sosial dan Budaya yang diterima dalam setiap pertemuan Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN	98	98	98	99	99	Persen						
	3 Persentase saran kebijakan atas kesepakatan Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	75	80	82	85	90	persen						
Kegiatan : Kerja Sama ASEAN dengan Mitra Wicara dan Organisasi Regional/Internasional								1,355.60	2,214.60	7,560.00	33,315.10	8,316.00	Direktorat Kerja Sama Eksternal Asean
	Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan Indonesia yang berpengaruh dalam Kerja Sama Eksternal ASEAN												
	1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri dalam Kerja Sama Eksternal ASEAN	95	96	97	98	98	Persen						
	2 Persentase saran kebijakan atas kesepakatan Kerja Sama Eksternal ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	75	80	82	85	90	Persen						
	3 Persentase rekomendasi dan prakarsa di bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama Eksternal ASEAN	98	98	98	99	99	Persen						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	4	Persentase rekomendasi dan prakarsa di bidang Maritim dan Politik Keamanan yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama Eksternal ASEAN	97	97	98	99	98	Persen						
Kegiatan : Kerja Sama ASEAN Bidang Politik dan Keamanan									2,138.40	4,551.60	25,863.70	55,000.00	14,000.00	Direktorat Politik Keamanan ASEAN
		Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan Indonesia yang berpengaruh dalam Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN												
	1	Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri dalam Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	95	96	97	98	98	Persen						
	2	Persentase saran kebijakan atas kesepakatan Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	75	80	82	85	90	Persen						
	3	Persentase rekomendasi dan prakarsa di bidang Maritim dan Politik Keamanan yang diterima dalam pertemuan Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN	97	97	98	99	98	Persen						
Kegiatan : Kerja Sama Multilateral dalam Rangka Pemajuan dan Perlindungan HAM serta Penanganan Isu Kemanusiaan									2,403.80	5,536.20	11,800.00	5,820.00	5,840.00	Direktorat Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan
		Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan												
	1	Presentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral di Bidang HAM dan Kemanusiaan	93	93	94	94	95	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	2	Presentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri Multilateral	95	96	97	98	98	Persentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan</b>												
	1	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	Persentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan</b>												
	1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi kemaritiman dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral	90	90	91	91	92	Persentase						
	2	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	80	80	81	81	82	Persentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Diplomasi ekonomi, sosial dan budaya yang kuat di forum multilateral di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan</b>												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan di forum multilateral	90	90	91	91	92	Persentase						
	2	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi ekonomi, sosial dan budaya di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan	80	80	81	81	82	Persentase						
<b>Kegiatan : Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme</b>									7,343.40	5,536.20	5,536.20	5,536.20	5,536.20	Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata</b>												
	1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata	93	93	94	94	95	persentase						
	2	Persentase prakarsa dan rekomendasi di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan menteri Multilateral	95	96	97	96	98	Persentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata</b>												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Persentase rekomendasi dari forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata yang di Tanggapi oleh pemangku kepentingan Nasional	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	persentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Diplomasi maritim dan polkam yang kuat di forum Multilateral di Bidang Keamanan Internasional dan perlucutan Senjata</b>												
	1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang di terima dalam diplomasi Kemaritiman dan polkam di Bidang Keamanan Interansional dan Perlucutan Senjata	90	90	91	91	92	persentase						
	2	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim dan polkam di Bidang Keamann Internasional dan Perlucutan Senjata	85	85	86	86	87	Persentase						
<b>Kegiatan : Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup</b>									2,214.10	5,536.20	6,366.60	7,321.60	5,378.10	Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup
		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang Berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup</b>												
	1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup	93	93	93	95	95	Persentase						
	2	Persentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Multilateral	95	96	97	96	98	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup												
	1 Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan nasional	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	Persentase						
	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Diplomasi maritim yang kuat di forum multilateral di bidang pembangunan, ekonomi dan lingkungan hidup												
	1 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup di forum multilateral	90	90	90	95	95	Persentase						
	2 Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi maritim di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	80	80	80	80	80	Persentase						
	<b>Sasaran Kegiatan :</b> Diplomasi Ekonomi yang kuat di forum multilateral di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di forum multilateral dalam isu Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	90	90	90	95	95	Persentase						
	2	Persentase peningkatan kemampuan peserta terkait diplomasi ekonomi di Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup	80	80	80	80	80	Persentase						
Kegiatan : Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Perdagangan, Komoditas, dan Kekayaan Intelektual (PKKI)									2,339.70	5,536.20	3,339.80	3,673.80	4,041.10	Direktorat Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual
		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum multilateral di bidang perdagangan, komoditas dan kekayaan intelektual</b>												
	1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di bidang perdagangan, komoditas dan kekayaan intelektual	93	93	93	95	95	Persentase						
	2	Persentase Prakarsa dan rekomendasi Indonesia di bidang perdagangan, komoditas dan kekayaan intelektual yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri Multilateral	95	96	97	96	98	Persentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam forum Multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual</b>												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5	Persentase						
	<b>Sasaran Kegiatan : Diplomasi maritim yang kuat di forum Multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual</b>												
	1 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual di forum multilateral	90	90	90	95	95	Persentase						
	<b>Sasaran Kegiatan : Diplomasi ekonomi yang kuat di forum multilateral di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual</b>												
	1 Persentase posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi ekonomi di Bidang Perdagangan, Komoditas dan Kekayaan Intelektual di forum multilateral	90	90	90	95	95	Persentase						
	2 Indeks respon positif stakeholders terhadap informasi database kebijakan perdagangan	4 (skala 5)	Jumlah										
	3 Peningkatan kemampuan melalui capacity building diplomasi ekonomi multilateral	85	85	85	90	90	Persentase						
								2,773.10	5,536.20	6,089.80	120,987.80	7,377.70	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan peran Indonesia yang berpengaruh dalam forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang</b>												Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang
	1	Presentase Kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral di bidang sosial budaya dan organisasi negara berkembang	93	93	94	94	95	Presentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Diplomasi Maritim yang kuat di forum multilateral di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang</b>												
	1	Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi maritim di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang	90	90	91	91	92	Persentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Diplomasi Sosial dan Budaya yang kuat di Forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang</b>												
	1	Persentase Posisi/prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam diplomasi sosial dan budaya di Bidang Sosial Budaya dan Organisasi Negara Berkembang di forum multilateral	90	90	91	91	92	Persentase						
		<b>Sasaran Kegiatan : Dukungan dan Komitmen Nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan dalam Forum Multilateral di Bidang Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang</b>												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Persentase rekomendasi dari forum multilateral di Bidang Sosial Budaya yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional	90	90	90	90	90	Persentase						
	2	Persentase penyelesaian permohonan registrasi Ormas Asing	85	85	85	85	85	Persentase						
Kegiatan : Optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional									558,695.20	910,622.50	912,204.60	912,204.60	912,254.60	Sekretariat Ditjen Multilateral
		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan dan Peran Indonesia yang Berpengaruh dalam Forum Kerja Sama Multilateral</b>												
	1	Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Kerja Sama Multilateral	93	93	94	94	95	Persentase						
Kegiatan : Optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada ASEAN									815.5	1,884.00	6,302.70	6,617.80	6,948.70	Sekretariat Ditjen Kerjasama ASEAN
		<b>Sasaran Kegiatan : Dukungan dan komitmen nasional atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan kerja sama ASEAN yang tinggi</b>												
	1	1Persentase Saran Kebijakan atas Kesepakatan ASEAN yang ditindaklanjuti di dalam negeri	75	80	82	85	90	Persentase						
Program : Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik									303,764.40	225,043.40	269,516.90	269,104.70	260,369.70	Ditjen Protokol dan Konsuler, Sekretariat Jenderal
		<b>Sasaran Program : Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima</b>												
	1	Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang diselesaikan	73	74	75	76	77	Persentase						
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	4 (skala 4)	Indeks										

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 (skala 4)	Indeks										
	4	Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran	4 (skala 4)	Indeks										
	5	Indeks Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik	4 (skala 4)	Indeks										
	6	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI	4 (skala 4)	Indeks										
	7	Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran Perwakilan RI	4 (skala 4)	Indeks										
	8	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI Perwakilan RI	4 (skala 4)	Indeks										
<b>Kegiatan : Pelayanan Fasilitas Diplomatik</b>									1,445.70	1,220.00	6,391.60	7,030.70	8,436.90	Direktorat Fasilitas Diplomatik
		<b>Sasaran Kegiatan : Kualitas Pelayanan Fasilitas Diplomatik yang Prima</b>												
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Fasilitas Diplomatik	4 (skala 4)	Indeks										
	2	Indeks Kualitas Pelayanan Fasilitas Diplomatik	4 (skala 4)	Indeks										
	3	Pemenuhan Resertifikasi ISO Pelayanan Penerbitan ID Card	100	100	100	100	100	Persentase						
	4	Persentase Penyelesaian Dokumen Fasilitas Diplomatik	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Persentase Layanan Fasilitas Diplomatik yang diberikan	100	100	100	100	100	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	6	Persentase Tingkat Pemahaman Stakeholders terhadap Proses dan Pelayanan Fasilitas Diplomatik yang Nilainya di atas 80 persen	100	100	100	100	100	Persentase						
	7	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Fasilitas Diplomatik	78	78	78	78	78	Nilai						
Kegiatan : Pelayanan Kekonsuleran									7,694.40	15,002.80	18,092.20	19,329.70	20,079.70	Direktorat Konsuler
		<b>Sasaran Kegiatan : Kualitas Pelayanan Kekonsuleran yang Prima</b>												
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran	4 (skala 4)	Indeks										
	2	Indeks Kualitas Pelayanan Kekonsuleran	4 (skala 4)	Indeks										
	3	Persentase Penyelesaian Dokumen Kekonsuleran sesuai dengan Service Level Agreement	100	100	100	100	100	Persentase						
	4	Persentase Tingkat Pemahaman Stakeholders terhadap Pelayanan Kekonsuleran yang Nilainya di atas 80	85	85	85	85	85	Persentase						
	5	Persentase Pengaduan Publik yang Ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase						
	6	Persentase Pemberian Notifikasi dan Fasilitasi Akses Kekonsuleran kepada Perwakilan Negara Asing	93	93	93	93	93	Persentase						
	7	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Konsuler	78	78	78	78	78	Nilai						
									66,383.00	50,720.00	77,481.80	72,292.40	58,403.80	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri		Sasaran Kegiatan : Pelindungan WNI/BHI dan Pelayanan Publik di Perwakilan RI yang Prima												Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI	4 (skala 4)	Indeks										
	2	Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI	86	87	88	89	90	Indeks						
	3	Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	73	74	75	76	77	Persentase						
	4	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri	96.19	96.42	97.09	97.5	98.84	Indeks						
	5	Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	94.06	95.38	96.63	97.49	98.63	Indeks						
	6	Indeks Diplomasi Pelindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	94.30	95.48	96.39	98	98.59	Indeks						
	7	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Perlindungan WNI/BHI	78	78	78	78	78	Nilai						
Kegiatan : Pelayanan Keprotokolan									1,713.40	1,250.00	8,551.40	9,451.90	10,449.40	Direktorat Protokol
		Sasaran Kegiatan : Kualitas Pelayanan Keprotokolan yang Prima dan sesuai Standar												
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 (skala 4)	Indeks										
	2	Indeks Kualitas Pelayanan Keprotokolan	4 (skala 4)	Indeks										

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	3	Persentase Pelayanan Keprotokolan Sesuai dengan Protap yang Berlaku	100	100	100	100	100	Persentase						
	4	Persentase Jumlah Dokumen Keprotokolan yang Diterbitkan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Persentase Tingkat Pemahaman Stakeholders Terhadap Pelayanan Keprotokolan di atas 80	90	90	90	90	90	Persentase						
	6	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Protokol	78	78	78	78	78	Nilai						
<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Perlindungan WNI dan Pelayanan Publik di Perwakilan RI</b>									226,528.00	156,850.60	159,000.00	161,000.00	163,000.00	Biro Perencanaan dan Organisasi
		<b>Sasaran Kegiatan : Pelindungan WNI/BHI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima</b>												
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Perlindungan WNI/BHI Perwakilan RI	4 (skala 4)	indeks										
	2	Persentase WNI di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja yang Terdaftar di Portal Peduli WNI	20	40	60	80	100	persentase						
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Kekonsuleran Perwakilan RI	4 (skala 4)	indeks										
	4	Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang diselesaikan	73	74	75	76	77	Persentase						
<b>Program : Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional</b>									5,480.40	11,088.70	14,617.00	15,417.00	16,517.00	Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional
		<b>Sasaran Program : Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional</b>												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	1	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional yang diselesaikan	9	18	20	20	20	Persentase						
	2	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional dalam konsep/dokumen yang digunakan oleh K/L	100	100	100	100	100	Persentase						
	3	Indeks kemajuan perundingan penyelesaian perbatasan maritim	45.03	49.64	55.93	56.87	57.80	Indeks						
	4	Persentase Pendapat Hukum di Bidang Kewilyahan, Politik dan Keamanan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam Forum Internasional	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Persentase kemajuan perundingan perjanjian perdagangan bebas dan investasi	100	100	100	100	100	Persentase						
	6	Persentase pendapat hukum di Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum Internasional	100	100	100	100	100	Persentase						
Kegiatan : Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya									961.3	1,242.50	1,542.00	1,842.00	2,142.00	Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya
		Sasaran Kegiatan : Penyelesaian hukum dan perjanjian Internasional di bidang Sosial dan Budaya												
	1	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial budaya yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase						
	2	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial budaya dalam konsep dokumen yang digunakan K/L	100	100	100	100	100	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	3	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang sosial budaya yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	100	100	100	100	100	Persentase							
Kegiatan : Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Ekonomi									1,952.70	3,686.10	4,200.00	4,100.00	4,700.00	Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi	
		<b>Sasaran Kegiatan : Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional di Bidang Ekonomi</b>													
	1	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase							
	2	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang ekonomi dalam konsep/dokumen yang digunakan oleh K/L	100	100	100	100	100	Persentase							
	3	Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	100	100	100	100	100	Persentase							
	4	Persentase kemajuan perundingan perdagangan bebas dan investasi	100	100	100	100	100	Persentase							
Kegiatan : Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Kewilayahan									1,700.40	4,995.00	6,075.00	6,675.00	7,075.00	Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan	
		<b>Sasaran Kegiatan : Penyelesaian hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan</b>													
	1	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan kerja sama kelautan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional di bidang kewilayahan dalam konsep/dokumen yang digunakan oleh K/L	100	100	100	100	100	Persentase						
	3	Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim	45.03	49.64	55.93	56.87	57.80	Indeks						
	4	Persentase Pendapat Hukum bidang kewilayahan yang diterima sebagai posisi Indonesia di forum internasional	100	100	100	100	100	Persentase						
<b>Kegiatan : Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan</b>									866	1,165.20	2,800.00	2,800.00	2,600.00	Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan
		<b>Sasaran Kegiatan : Penyelesaian Hukum dan Perjanjian Internasional bidang Politik dan Keamanan</b>												
	1	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang Politik dan Keamanan yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase						
	2	Persentase pendapat hukum dan perjanjian internasional bidang politik dan keamanan dalam konsep/dokumen yang digunakan K/L	100	100	100	100	100	Persentase						
	3	Persentase pendapat hukum di bidang Politik dan Keamanan yang diterima sebagai posisi Indonesia dalam forum internasional	100	100	100	100	100	Persentase						
<b>Program : Dukungan Manajemen</b>									6,503,947.60	6,541,595.70	12,410,591.60	13,292,419.60	14,265,111.70	Ditjen Asia Pasifik dan Afrika, Ditjen Amerika dan Eropa, Ditjen Kerja Sama Asean, Ditjen
		<b>Sasaran Program : Tata Kelola Organisasi Kemenlu yang Baik</b>												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	85	87	89	91	93	Nilai						Kerjasama Multilateral, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Ditjen Protokol dan Konsuler, Inspektorat Jenderal, Badan Pengkajian
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini						
4	Persentase Sarana dan Prasarana Kemenlu yang dipenuhi sesuai rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
5	Nilai Kinerja Anggaran Kemenlu	90	91	92	93	94	Nilai						
6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
7	Persentase Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang Dipenuhi sesuai dengan Rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
8	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	90	91	92	93	94	Nilai						
9	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
10	Persentase Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika yang Dipenuhi sesuai dengan Rencana	95	100	100	100	100	Persentase						
11	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	90	90	90	90	90	Nilai						
12	Nilai Evaluasi AKIP BPPK	78	79	80	81	82	Nilai						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	13 Persentase Sarana dan Prasarana BPPK yang Dipenuhi sesuai dengan Rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	14 Nilai Kinerja Anggaran BPPK	90	91	92	93	94	Nilai						
	15 Nilai Evaluasi AKIP Ditjen Kerja Sama ASEAN	79	79.5	80	80.5	81	Nilai						
	16 Persentase Sarana dan Prasarana Ditjen Kerja Sama ASEAN yang Dipenuhi sesuai dengan Rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	17 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Kerja Sama ASEAN	90	91	92	93	94	Nilai						
	18 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	78	79	80	81	82	nilai						
	19 Persentase Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional yang Dipenuhi sesuai dengan rencana	100	100	100	100	100	persentase						
	20 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	90	91	92	93	94	nilai						
	21 Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
	22 Persentase Sarana dan Prasarana yang Dipenuhi sesuai dengan Rencana di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	100	100	100	100	100	Persentase						
	23 Nilai Kinerja Anggaran di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	90	90	90	90	90	Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	24	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (BB)	82 (BB)	Nilai						
	25	Persentase Sarana dan Prasarana yang dipenuhi sesuai dengan rencana di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	100	100	100	100	100	Persentase						
	26	Nilai Kinerja Anggaran di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	90	91	92	93	94	Nilai						
	27	Nilai AKIP di Ditjen Protokol dan Konsuler	78	79	80	81	82	Nilai						
	28	Persentase sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan rencana di Ditjen Protokol dan Konsuler	100	100	100	100	100	Persentase						
	29	Nilai Kinerja Anggaran di Ditjen Protokol dan Konsuler	90	90	90	90	90	Nilai						
	30	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Inspektorat Jenderal	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
	31	Persentase Sarana dan Prasarana Inspektorat Jenderal yang Dipenuhi Sesuai Rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	32	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	90	90	90	90	90	Nilai						
Kegiatan : Pelayanan Hukum, Administrasi dan Dukungan Teknis Lainnya Kementerian dan Perwakilan									22,800.00	38,600.00	35,110.00	33,400.00	35,910.00	Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan
		<b>Sasaran Kegiatan : Pencapaian Reformasi Birokrasi lingkup Penataan Peraturan Perundang-undangan yang Optimal</b>												
	1	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi lingkup penataan Peraturan Perundang-undangan	3,75 (dari nilai 5)	4,25 (dari nilai 5)	4,5 (dari nilai 5)	5 (dari nilai 5)	5 (dari nilai 5)	Nilai						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	2	Nilai evaluasi AKIP Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan	78	79	80	81	82	Nilai						
	3	Indeks kepuasan Pimpinan Kemenlu, Satker dan Perwakilan terhadap pelayanan administrasi	3,6 (skala 4)	3,7 (skala 4)	3,7 (skala 4)	3,8 (skala 4)	3,8 (skala 4)	Indeks						
	4	Indeks kepuasan pelayanan kantong diplomatik	3,6 (skala 4)	3,7 (skala 4)	3,7 (skala 4)	3,8 (skala 4)	3,8 (skala 4)	Indeks						
	5	Indeks Efektivitas Tanggapan Hukum dan Layanan Hukum	3 (Skala 4)	Indeks										
	6	Jumlah Penghargaan Kearsipan yang Diperoleh Kemenlu	3	3	3	3	3	Jumlah						
	7	Indeks pemahaman responden terhadap kebijakan dan program antar K/L	4 (skala 4)	Indeks										
	8	Indeks pemahaman responden terhadap produk hukum di Kemenlu	4 (skala 4)	Indeks										
	9	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	90	91	92	93	94	Nilai						
<b>Kegiatan : Pelayanan dukungan substansi, administrasi dan dukungan teknis lainnya untuk Menteri dan Wakil Menteri</b>									30,000.10	38,585.10	42,443.60	46,687.90	51,356.70	Biro Dukungan Strategis Pimpinan
		<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Dukungan Strategis Kepada Pimpinan</b>												
	1	Indeks kepuasan Pimpinan Kemenlu atas dukungan strategis	3,7 (skala 5)	3,8 (skala 5)	3,8 (skala 5)	3,8 (skala 5)	3,8 (skala 5)	Indeks						
	2	Persentase tindak lanjut arahan Pimpinan Kemenlu yang diselesaikan	100	100	100	100	100	Persentase						
	3	Nilai evaluasi AKIP Biro Dukungan Strategis Pimpinan	78	79	80	81	82	Nilai						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	4	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	90	91	92	93	94	Nilai						
1298-Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri									301,355.20	232,290.20	378,609.10	406,899.90	447,589.90	Biro Sumber Daya Manusia
		<b>Sasaran Kegiatan : Pencapaian Reformasi Birokrasi lingkup Penataan Sistem Manajemen SDM yang Optimal</b>												
	1	Persentase Pejabat Kemenlu yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan sampai dengan tingkat Eselon 3	100	100	50 (fungsional)	75 (fungsional)	100 (fungsional)	Persentase						
	2	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Lingkup Penataan Sistem Manajemen SDM	12,5 (dari nilai 15)	13,5 (dari nilai 15)	14,5 (dari nilai 15)	14,75 (dari nilai 15)	15 (dari nilai 15)	Nilai						
	3	Nilai Evaluasi AKIP Biro SDM	78	79	80	81	82	Nilai						
	4	Indeks Kepuasan Pegawai Kemenlu Terhadap Pelayanan Biro SDM	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	4 (skala 4)	Indeks						
	5	Persentase Responden yang Paham Terhadap Peraturan/Kebijakan Kepegawaian Kemenlu dengan Nilai diatas 85	80	80	85	85	90	Persentase						
	6	Persentase Penempatan SDM Kemenlu Sesuai Dengan Formasi dan Kompetensi	100	100	100	100	100	Persentase						
	7	Persentase Kasus-Kasus Kedisiplinan Pegawai yang Diselesaikan	85	90	90	95	100	Persentase						
	8	Persentase Rekomendasi Hasil Employee Engagement Survey 2019 yang Ditindaklanjuti	100	100	0	100	100	Persentase						
	9	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	90	91	92	93	94	Nilai						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan Kementerian Luar Negeri								186,976.60	201,077.00	211,077.00	218,000.00	225,000.00	Biro Keuangan
	Sasaran Kegiatan : Pengelolaan Opini BPK atas Laporan Keuangan Kemenlu yang Akuntabel												
	1 Persentase temuan BPK lingkup keuangan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase						
	2 Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	90	91	92	93	94	Nilai						
	3 Persentase Pertanggungjawaban Keuangan Perwakilan RI yang Sesuai dengan Peraturan	100	100	100	100	100	Persentase						
	4 Persentase kasus kerugian negara yang diselesaikan	75	76	77	77	78	Persentase						
5 Nilai evaluasi AKIP Biro Keuangan	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai							
Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Penguatan Organisasi Kementerian Luar Negeri								21,922.60	34,315.00	37,746.50	41,521.10	45,673.30	Biro Perencanaan dan Organisasi
	Sasaran Kegiatan : Reformasi Birokrasi Kemenlu yang Optimal												
	1 Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	85	87	89	91	93	Nilai						
	2 Nilai AKIP Kemenlu	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
	3 Nilai AKIP Setjen	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	83 (A)	Nilai						
4 Jumlah unit organisasi Kementerian dan Satker Perwakilan RI yang memiliki nilai AKIP dengan predikat minimal "Sangat Baik" (BB)	112	122	130	135	141	Unit							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	5	Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	90	91	92	93	94	Nilai						
	6	Persentase alokasi Anggaran yang memiliki catatan blokir pada halaman IV DIPA	10	10	10	9	8	Persentase						
	7	Indeks Revisi Anggaran Satker dan Perwakilan	4 (skala 5)	Indeks										
	8	Nilai AKIP BPO	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
Kegiatan : Penyediaan Layanan pengadaan dan Pengelolaan Sarana Prasarana, BMN serta Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga Kementerian Luar Negeri									89,077.90	84,888.40	100,900.90	92,528.20	94,536.90	Biro Umum
		Sasaran Kegiatan : Layanan Biro Umum yang Prima												
	1	01-Indeks kepuasan pengguna layanan Biro Umum	4 (skala 4)	Indeks										
	2	02-Persentase laporan BMN Kemenlu yang tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang-undangan	100	100	100	100	100	Persentase						
	3	03-Nilai Evaluasi AKIP Biro Umum	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
	4	04-Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal	90	91	92	93	94	Nilai						
Kegiatan : Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan									86,326.90	126,960.99	139,657.10	153,622.80	168,985.10	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan
		Sasaran Kegiatan : Infrastruktur TIK dan Sistem Informasi Kementerian Luar Negeri yang Terintegrasi												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1 Nilai Evaluasi AKIP Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan	78	79	80	81	82	Nilai						
	2 Nilai Komponen Reformasi Birokrasi lingkup Penataan Tatalaksana dan e-Government	4	4.5	4.75	5	5	Nilai						
	3 Persentase Penerapan Infrastruktur Digital (TIK) dan Integrasi Sistem Informasi di Kementerian Luar Negeri	20	40	60	80	90	Persentase						
	4 Indeks Kualitas Layanan Data dan Informasi Diplomatik	3.1	3.4	3.9	4.1	4.2	Indeks						
	5 Indeks Kepuasan Pengguna Aplikasi	3.5	3.6	3.8	4	4.21	Indeks						
	6 Persentase Ketersediaan Infrastruktur TIK Layanan Publik yang Terintegrasi	85	87	90	92	95	Persentase						
	7 Persentase Kapabilitas Penerapan Keamanan Informasi	40	50	60	70	80	Persentase						
	8 Persentase Tingkat Penerapan Keamanan Informasi	67	77	82	85.75	89.5	Persentase						
	9 Persentase Kapabilitas Tata Kelola TIK	38	47	57	68	80	Persentase						
	10 Persentase Rumusan Kebijakan TIK yang Terselesaikan	20	40	60	80	100	Persentase						
	11 Persentase Sarana dan Prasarana Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	12 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan	90	91	92	93	94	Nilai						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik								30,239.70	41,338.00	82,000.00	82,400.00	88,300.00	Pusat Pendidikan dan Latihan	
		Sasaran Kegiatan : Meningkatnya SDM Kemlu yang kompeten												
	1	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Lingkup Penataan Sistem Manajemen SDM	12.5	13	13.5	14	14.5	Nilai						
	2	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Lingkup Manajemen Perubahan	3.75	4	4.5	4.75	5	Nilai						
	3	Persentase peserta diklat yang lulus	100	100	100	100	100	Persentase						
	4	Persentase realisasi diklat sesuai rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Implementasi MOU kerjasama diklat sesuai rencana	6	6	7	7	8	MoU						
	6	Indeks kepuasan terhadap pelayanan Pusdiklat	4	4	4	4	4	Indeks						
	7	Nilai evaluasi AKIP Pusdiklat	78	79	80	81	82	Nilai						
	8	Persentase sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan rencana Pusdiklat	100	100	100	100	100	Persentase						
9	Nilai Kinerja Anggaran Pusdiklat	90	91	92	93	94	Nilai							
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana								218,678.40	243,328.20	478,211.20	480,271.10	480,277.20	Biro Umum	
		Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Memadai												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kementerian Luar Negeri	1	Persentase Sarana dan Prasarana Kemenlu yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perwakilan RI di Luar Negeri									737,862.60	685,330.20	685,000.00	723,210.10	775,000.10	Biro Umum
		<b>Sasaran Kegiatan : Sarana dan Prasarana Kemenlu yang Memadai</b>												
	1	Persentase Sarana dan Prasarana Perwakilan RI yang Dipenuhi Sesuai dengan Rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Asia Pasifik dan Afrika									34,567.30	34,469.00	36,192.40	38,002.00	39,902.20	Sekretariat Ditjen Asia Pasifik dan Afrika
		<b>Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik yang Baik</b>												
	1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	85	87	89	91	93	Nilai RB						
	2	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai AKIP						
	3	Persentase sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dokumen rencana pengadaan	95	100	100	100	100	Persentase						
	4	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika	79	79	80	80	81	Nilai AKIP						
	5	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Asia pasifik dan Afrika	90	90	90	90	90	Nilai						
6	Jumlah fasilitasi kerja sama ekonomi dengan stakeholders di kawasan Asia Pasifik dan Afrika	10	10	10	12	12	Laporan							
									35,609.30	36,258.30	39,884.10	43,872.60	48,259.80	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Amerika dan Eropa		Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Organisasi yang Baik di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa												Sekretariat Ditjen Amerika dan Eropa
	1	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
	2	Persentase sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	3	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	90	91	92	93	94	Nilai						
	4	Jumlah fasilitasi kerja sama ekonomi dengan stakeholders dikawasan Amerika dan Eropa	4	4	4	4	4	Jumlah						
	5	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kerja Sama ASEAN									32,759.50	32,772.40	41,827.70	43,919.10	46,115.00	Sekretariat Ditjen Kerjasama ASEAN
		Sasaran Kegiatan : Tata kelola organisasi yang baik di Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN												
	1	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	79	79.5	80	80.5	81	Nilai						
	2	Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	90	91	92	93	94	Persentase						
	3	Persentase Sarana dan Prasarana Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN yang dipenuhi sesuai dengan Rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	4	Nilai AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN	78	78.5	79	79.5	80	Nilai						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya pada Ditjen Kerja Sama Multilateral								34,164.90	35,735.90	35,747.50	35,747.50	35,847.50	Sekretariat Ditjen Multilateral
		<b>Sasaran Kegiatan : Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Internasional</b>											
	1	Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum Multilateral	80	80	80	80		Persentase					
		<b>Sasaran Kegiatan : Tata kelola Organisasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral yang Baik</b>											
	1	Kepemimpinan Indonesia yang Berpengaruh dalam Kerja Sama Multilateral	85	85	85	85		Persentase					
	2	Tata Kelola Organisasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral yang Baik	77	77	77	77		Persentase					
	3	Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan dalam Forum Multilateral	80	80	80	80		Persentase					
	4	SDM yang Kompeten di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	100	100	100	100		Persentase					
	5	Sarana dan Prasarana yang Memadai di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	100	100	100	100		Persentase					
6	Pengelolaan Anggaran yang Optimal di Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	100	100	100	100		Persentase						
7	Peningkatan Kapasitas Terkait Isu-isu Multilateral yang Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	90	90	90	90		Persentase						

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	8	Tata Kelola yang Baik di Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	77	77	77	77		Persentase						
	9	Pengelolaan Anggaran yang Optimal di Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral	100	100	100	100		Persentase						
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik									36,473.30	36,256.90	44,097.10	46,301.90	48,617.00	Sekretariat Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik
		<b>Sasaran Kegiatan : Organisasi dan Tata Kelola yang baik di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik</b>												
	1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	85	86	87	88	89	Nilai						
	2	Nilai evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (BB)	82 (BB)	Nilai						
	3	Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	3,8 (skala 5)	3,85 (skala 5)	3,9 (skala 5)	3,95 (skala 5)	4 (skala 5)	Indeks						
	4	Persentase sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan rencana di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Nilai kinerja anggaran di Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	90	91	92	93	94	Nilai						
6	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (BB)	82 (BB)	Nilai							
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional									24,857.30	25,055.50	26,176.00	26,206.00	26,206.00	Sekretariat Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional
		<b>Sasaran Kegiatan : Organisasi dan tata kelola yang baik di Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional</b>												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu	85	87	89	91	93	Nilai						
	2	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	78	79	80	81	82	Nilai						
	3	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi sesuai dengan rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	4	Nilai Kerja anggaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional	90	91	92	93	94	Nilai						
	5	Indeks Kepuasan Pelayanan Naskah Perjanjian Internasional	3	3	3	4	4	Nilai						
	6	Jumlah Hasil Monitoring dan Evaluasi Naskah Perjanjian Internasional	200	200	200	200	200	Jumlah						
									40,933.00	39,954.30	45,560.80	48,300.00	51,000.00	Sekretariat Ditjen Protokol dan Konsuler
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Protokol dan Konsuler</b>		<b>Sasaran Kegiatan : Organisasi dan Tata Kelola yang Baik di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler</b>												
	1	Nilai Evaluasi AKIP Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	78	78	78	78	78	Nilai						
	2	Nilai Kinerja Anggaran di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	90	90	90	90	90	Nilai						
	3	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai DIPA di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	100	100	100	100	100	Persentase						
	4	Nilai Evaluasi AKIP di Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler	78	78	78	78	78	Nilai						
									743.5	1,516.60	3,709.30	4,080.20	4,488.20	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR	TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan : Pengawasan Unit Organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Wilayah I	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengawasan Inspektorat Wilayah I yang Berintegritas dan Akuntabel													Inspektorat Wilayah I
	1 Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah I	3 (Skala 4)	Indeks											
	2 Persentase rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	50	50	55	55	60	Persentase							
	3 Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	100	100	100	100	100	Persentase							
	4 Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	75	75	80	80	80	Persentase							
	5 Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I	60	60	65	65	65	Persentase							
	6 Nilai AKIP Inspektorat Wilayah I	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai							
Kegiatan : Pengawasan Unit Organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Wilayah II	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya pengawasan Inspektorat Wilayah II yang berintegritas dan akuntabel							775.7	1,840.50	4,516,423.20	4,968,065.50	5,464,872.00	Inspektorat Wilayah II	

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	1	Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah II	3 (skala 4)	Indeks										
	2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	50	50	55	55	60	persentase						
	3	Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	100	100	100	100	100	persentase						
	4	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	75	75	80	80	80	persentase						
	5	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah II	60	60	65	65	65	persentase						
	6	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah II	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	nilai						
Kegiatan : Pengawasan Unit Organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Wilayah III									787.8	1,686.00	3,924.70	4,317.20	4,748.90	Inspektorat Wilayah III
		Sasaran Kegiatan : Terwujudnya pengawasan Inspektorat Wilayah III yang berintegritas dan akuntabel												
	1	Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah III	3 (skala 4)	Indeks										

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA	
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
	2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	50	50	55	55	60	persentase							
	3	Persentase rekomendasi hasil reviu dokumen keuangan yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	100	100	100	100	100	persentase							
	4	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	75	75	80	80	80	persentase							
	5	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah III	60	60	65	65	65	persentase							
	6	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah III	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai							
<b>Kegiatan : Pengawasan Unit Organisasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Wilayah IV</b>									770.3	1,939.20	5,933.90	6,527.30	7,180.00	Inspektorat Wilayah IV	
		<b>Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Pengawasan Inspektorat Wilayah IV yang Berintegritas dan Akuntabel</b>													
	1	Indeks survei persepsi dan tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Wilayah IV	3 (skala 4)	Indeks											
	2	Persentase rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	50	50	55	55	60	Persentase							

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	3	Persentase rekomendasi hasil revidu dokumen keuangan yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	100	100	100	100	100	Persentase						
	4	Persentase temuan APIP yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	75	75	80	80	80	Persentase						
	5	Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah IV	60	60	65	65	65	Persentase						
	6	Nilai AKIP Inspektorat Wilayah IV	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
									22,383.60	24,007.00	34,611.80	37,251.50	38,403.00	
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri		<b>Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Organisasi Inspektorat Jenderal yang Baik</b>												
	1	Nilai Komponen Reformasi Birokrasi Lingkup Penguatan Pengawasan	8,2 (nilai 12)	8,2 (nilai 12)	8,3 (nilai 12)	8,4 (nilai 12)	8,5 (nilai 12)	Nilai						
	2	Nilai AKIP Inspektorat Jenderal	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
	3	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3 (skala 5)	Level IACM										
	4	Persentase sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	5	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	90	90	90	90	90	Nilai						
	6	Indeks kualitas analisis kajian pengawasan	3 (skala 4)	Indeks										

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
	7	Nilai AKIP Sekretariat Inspektorat Jenderal	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan									21,070.60	20,233.90	20,833.90	20,833.90	20,833.90	Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
		Sasaran Kegiatan : Kebijakan luar negeri yang berkualitas												
	1	01-Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang berkualitas terkait isu-isu khusus	5	0	0	0	0	Rekomendasi						
	2	02-Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan	4	4	4	4	4	indeks						
		Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Organisasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan yang baik												
	1	Nilai evaluasi AKIP Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	78	79	80	81	82	Nilai						
	2	Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	90	91	92	93	94	Nilai						
	3	Persentase sarana dan prasarana di Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
4	Nilai evaluasi AKIP Sekretariat BPPK	78	79	80	81	82	Nilai							
Kegiatan : Pengelolaan Jabatan Fungsional Rumpun Hubungan Luar Negeri									9,139.00	10,651.90	11,484.50	12,514.50	13,912.00	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional
		Sasaran Kegiatan :Terwujudnya pengelolaan jabatan fungsional yang baik												

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR		TARGET					SATUAN	ALOKASI (JUTA RUPIAH)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI	1	Persentase Harmonisasi Peraturan tentang Jabatan Fungsional Binaan Kemenlu	100	100	100	100	100	Persentase						
	2	Nilai Komponen Birokrasi lingkup Penataan dan Penguatan Organisasi	4.5	5	6	6	6	Nilai						
	3	Nilai Komponen Birokrasi lingkup Penataan Sistem Manajemen SDM	12.5	13	14.5	14.75	15	Nilai						
	4	Nilai AKIP Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	78	79	80	81	82	Nilai						
	5	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pusbinjabfung	4	4	4	4	4	Indeks						
	6	Persentase Rekomendasi Penempatan Pegawai Jabatan Fungsional Pasca Inpassing Nasional yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase						
	7	Indeks Pemahaman Responden tentang Jabatan Fungsional tertentu Binaan Kemenlu	4	4	4	4	4	Indeks						
	8	Persentase Sarana dan Prasarana Pusbinjabfung yang dipenuhi sesuai dengan rencana	100	100	100	100	100	Persentase						
	9	Nilai Kinerja Anggaran Pusbinjabfung	90	93	95	98	100	Nilai						
Kegiatan : Penyelenggaraan kegiatan dukungan manajemen pada Perwakilan RI di Luar Negeri									4,483,566.10	4,560,600.80	5,388,630.80	5,716,660.80	6,044,690.90	Perwakilan RI
		<b>Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Organisasi Perwakilan RI yang Baik</b>												
	1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	78 (BB)	79 (BB)	80 (BB)	81 (A)	82 (A)	Nilai						
	2	Nilai Kinerja Anggaran	90	91	92	93	94	Nilai						

## Lampiran 2: Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Rancangan UU tentang Perubahan atas UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	<p>Adanya perkembangan di tingkat domestik dan internasional diantaranya proses reformasi, meningkatnya peran pemerintah daerah, peran <i>non-state actors</i> dalam kerja sama luar negeri, adanya peran <i>non-state actors</i> global, perkembangan teknologi informasi, isu nasionalisme serta proteksionisme, kepentingan nasional yang berhadapan dengan regionalisme serta peningkatan pemberian kerja sama teknis oleh Indonesia dan lain-lain.</p> <p>Urgensi atas perubahan terhadap UU Hublu dimaksudkan sebagai upaya untuk semakin menyempurnakan undang-undang tersebut agar dapat mengantisipasi dan mengakomodasikan berbagai perkembangan yang terjadi, khususnya untuk melengkapi kodifikasi praktik penyelenggaraan hubungan luar negeri</p>	BHAKP dan Ditjen HPI	Kemenkumham Kemsetneg Setkab KemenPAN RB BPHN	2020-2024

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		oleh Pemerintah RI yang belum termuat dalam undang-undang sebelumnya. Sementara itu ketentuan-ketentuan yang masih relevan dalam UU Hublu akan tetap dipertahankan, dan apabila perlu diperkuat.			
2.	Rancangan UU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	<p>Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 terhadap UU PI No.24/2000 yang memberikan makna baru terhadap jenis dan proses pengesahan suatu Perjanjian Internasional dalam pemberlakukannya di dalam hukum internasional.</p> <p>Perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal di dalam UU PI No. 24/2000 agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak nasional yang melaksanakan suatu Perjanjian Internasional, termasuk kriteria penetapan/pengesahan perjanjian internasional.</p>	Ditjen HPI dan BHAKP	Kemkumham Kemendag Kemsetneg BPHN	2020-2024

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Hal ini juga merupakan dukungan atas prioritas Kemenlu terkait reformasi birokrasi khususnya bidang pengesahan PI.			
3.	RPerpres Perwakilan Rawan dan Berbahaya	Memberikan jaminan perlindungan, dan penghargaan, serta dukungan moral bagi pejabat yang ditugaskan pada Perwakilan Rawan dan Berbahaya	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	KemenPANRB Kementerian Keuangan Kemensetneg Kemenkumham	2020
4.	RPerpres tunjangan bagi PTRI ASEAN	Memberikan kepastian hukum pemberian tunjangan bagi Pejabat yang ditugaskan pada PTRI ASEAN sebagai Perwakilan RI yang berkedudukan di dalam negeri	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	KemenPANRB Kementerian Keuangan Kemensetneg Kemenkumham	2020
5.	RPerpres tentang Kementerian Luar Negeri	Mengatur organisasi Kementerian Luar Negeri	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	KemenPANRB (instansi pemrakarsa)	2020

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6.	RPerpres tentang Organisasi Perwakilan RI	Mengatur organisasi Perwakilan RI	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	KemenPANRB Kemenkeu KemenPPN Kemenhan/BAIS TNI Kemendag Kemenperin Kemendikbud Kemenag Kemenhut Kementan Kemenhub Kemenaker Kejakgung Polri Kemensetneg Kemenkumham	2020
7.	Perpres tentang Setnas ASEAN	Memperkuat kelembagaan dan fungsi koordinasi Setnas ASEAN	Ditjen KSA	Kemenkopolhukam Kemenkoperekono Mian Kemenko PMKKemenhumka m Kemensetneg	2020 (Perpres Nomor 53 Tahun 2020)

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
8.	RPerpres Tentang ADTLN	Melakukan pemutakhiran ADTLN menyesuaikan dengan kondisi perekonomian	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	Kemenkeu	2020-2024
9.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat, Jabatan Penata Kanselera dan Pranatan Informasi Diplomatik	Mengatur mengenai usulan mengenai penyesuaian nominal besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Diplomat, dana usulan nominal besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Kanselera dan Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	KemenPANRB	2020-2024
10.	Permenlu tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri	Mengatur struktur organisasi, tugas, dan fungsi Kementerian Luar Negeri	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	KemenPANRB	2020
11.	Permenlu tentang jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan	Mengatur jenis-jenis jabatan, kelas jabatan dan peta jabatan dalam organisasi Kemenlu	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	KemenPANRB	2020
12.	Permenlu tentang organisasi dan tata kerja Perwakilan RI	Mengatur organisasi dan tata kerja Perwakilan RI, termasuk tata kerja dengan pejabat dari K/L selain Kemenlu	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	KemenPANRB	2020-2024

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
13.	Permenlu tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya	Mengatur kriteria, tata cara penetapan, dan kekhususan perwakilan dengan status rawan atau berbahaya	Sekretariat Jenderal c.q. BPO	Kementerian PANRB	Permenlu Nomor 5 Tahun 2020
14.	Permenlu Tentang Peraturan Pelaksana Perpres KKOI mengenai Pengelolaan Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI	Mandat dari Perpres Nomor 30 Tahun 2019 dimana memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI	Ditjen KS Multilateral	K/L yang tergabung dalam Pokja	2020
15.	Keppres Pengukuhan Keanggotaan Indonesia pada Organisasi Internasional	Mandat pasal 8 atas Perpres nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI untuk membuat Keppres Pengukuhan	Ditjen KS Multilateral	K/L yang tergabung dalam Pokja	2020
16.	Permenlu tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	Mandat UU no. 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 51, Pasal 68, Pasal 69, Peraturan Pemerintah no. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan PermenpanRB no. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan	Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM	KemenpanRB	2020

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	di Kementerian Luar Negeri				
17.	Permenlu tentang Tunjangan Kinerja Menteri dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	Mandat Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM		Permenlu Nomor 7 Tahun 2020
18.	Permenlu tentang Penugasan PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI ke Perwakilan RI		Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM		Permenlu Nomor 6 Tahun 2020
19.	Permenlu tentang Pegawai Perwakilan		Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM		2021
20.	Permenlu tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/ Lembaga Asing	Revisi atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada	Ditjen IDP, Setjen		2020

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		Pemerintah, di mana Menteri Luar Negeri berkedudukan sebagai Ketua Bersama Komite Pengarah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI / <i>Indonesian AID</i> )			
21.	Permenlu tentang Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah/Lembaga Asing	Revisi atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Pemberian Hibah Kepada Pemerintah/Lembaga Asing, sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah, di mana Menteri Luar Negeri berkedudukan sebagai Ketua Bersama Komite Pengarah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI / <i>Indonesian AID</i> )	Ditjen IDP, Setjen		2020
22.	Permenlu tentang Monitoring dan Evaluasi Pemberian	Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48	Ditjen IDP, Setjen		2020

## RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi <i>Existing</i> , Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung-jawab	Unit terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Hibah Kepada Pemerintah/Lembaga Asing	Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah kepada Pemerintah, di mana Menteri Luar Negeri berkedudukan sebagai Ketua Bersama Komite Pengarah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI / <i>Indonesian AID</i> )			



## TRAVEL CHECKLIST

*for the smart traveller*

### Sekretariat Jenderal

---

Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta, 10110

 (+62) 21 344 1508

 Kementerian Luar Negeri RI

 [www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id)

 [bpo@kemlu.go.id](mailto:bpo@kemlu.go.id)